



BADAN POM



BALAI BESAR POM DI BANDUNG



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2022
BALAI BESAR POM DI BANDUNG

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BBPOM di Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 ini.

LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi

informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada masa yang akan datang.

Bandung, Februari 2023

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	v

Bab 1 Pendahuluan	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	4
	1.4	ISU STRATEGIS	4
Bab 2 Perencanaan Kinerja	2.1	REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	17
	2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	24
	2.3	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022	26
	2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022	28
	2.5	METODE PENGUKURAN	30
Bab 3 Perencanaan Kinerja	3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
	3.2	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	173
Bab 4 Perencanaan Kinerja	4.1	KESIMPULAN	185
	4.2	SARAN	187
LAMPIRAN			188



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama tahun 2022. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama 2022 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.


Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan.

Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 16 Desember 2021. Perjanjian kinerja tersebut



merupakan ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun Bandung Tahun 2020-2024.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan, Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan indikator) indikator sasaran kegiatan. Dengan hasil sebagai berikut: terdapat tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria memenuhi ekspektasi, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun.

Pada tahun 2022, BBPOM di Bandung, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk ke dalam kategori kategori Efisien dengan TE 0,42 dengan Capaian TE 92%. BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE 0,25 dengan capaian TE sebesar 95%. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (TE=2.84), nilai TE terendah adalah Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00), Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (TE=-0,00), dan Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada 2022 terlaksana secara efisien (TE=0,25,) dengan capaian TE 95%.

Sedangkan anggaran Balai Besar POM di Bandung tahun 2022 sebesar Rp. 61.356.815.000,- dengan rincian: (1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.761.070.000,- dan (2) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26,595,745,000,-. Selisih anggaran sebesar Rp. 1.532.040.000,- dari anggaran semula yaitu sebesar Rp. 57.361.818.000,- untuk penambahan pelaksanaan titik KIE berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.03.03.21.212.05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 tentang Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 2022, anggaran BBPOM di Bandung meningkat menjadi Rp. 63.916.221.000,-. Penambahan anggaran tersebut antara lain : (1) Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: B-PR.03.03.21.212 05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, disampaikan BBPOM di Bandung mendapatkan tambahan pelaksanaan KIE sebanyak 17 titik dengan alokasi anggaran tambahan

sebesar Rp. 1.532.040.000,-; (2) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022, disampaikan revisi kekurangan belanja pegawai; (3) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.03.03.2.21.09.22.675 tanggal 13 September 2022 perihal Realokasi dan Optimalisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KIE Obat dan Makanan, disampaikan Hasil Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman, maka Balai Besar POM di Bandung ditambahkan sebanyak 7 titik KIE dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 591.990.000,-. Berdasarkan OMSPAN realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 60.812.224.069 yaitu 99.73%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Februari 2023

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG




1.4 ISU STRATEGIS

Sering dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2021 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.



Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).


Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium



terus dilakukan. Pada tahun 2019, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Laboratorium BSL-2

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung merupakan salah satu Balai yang ditunjuk untuk melakukan pengujian spesimen Covid-19 oleh Badan POM. Untuk itu, dilakukan pembangunan BSL2 pada tahun 2021 dan dilanjutkan dengan pemasangan AHU pada tahun 2022. Pada TW 2, proses pemasangan AHU masih berjalan, direncanakan selesai pada bulan Juli 2022.

Kendala yang dihadapi Laboratorium BSL2 sampai dengan TW 2 tahun 2022 adalah terkait perijinan sebagai Laboratorium Pemeriksa Covid-19. Telah dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli 2021. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK 01.07/Menkes/4642/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan Corona virus disease 2019 (Covid) 19, Laboratorium BSL2 BBPOM di Bandung masih belum memenuhi persyaratan untuk spesifikasi penanggung jawab (Dokter penanggung jawab dokter patologi klinik).

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut:


Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada



masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kapasitas produksi industry farmasi maupun obat tradisional yang menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri


kosmetik yang menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand sanitizer menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan KIE mengenai cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 88 industri farmasi, 54 industri Obat Tradisional, 24.291 industri PKRT, 187 industri kosmetik, 1802 industri suplemen makanan, 104 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 141 industri alat kesehatan dan 926 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-



2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.


Pandemi covid-19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang UPT-nya termasuk Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian sampel swab antigen dan RT-PCR.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.



Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.


Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan



Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat


Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di




Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium



dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun

internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)*, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System (ICJS)*, dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)*, *World Health Organization (WHO)*, *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories (AFL)*, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*, dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersama tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemik

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Selama masa pandemik tersebut menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan

menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.

Namun pada awal tahun 2022, banyaknya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif, sehingga Indonesia sudah mulai bersiap-siap membuat langkah menuju ke arah endemik. Transisi endemik merupakan suatu proses dimana periode dari pandemik menuju ke arah endemik dengan sejumlah indikator, antara lain laju penularan harus kurang dari 1, angka *positivity rate* harus kurang dari 5%, kemudian tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka *fatality rate* harus kurang dari 3%, dan level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kondisi – kondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu tertentu misalnya 6 bulan. Proses transisi itu sejalan dengan kebijakan pelonggaran-pelonggaran yang diputuskan pemerintah. Pelonggaran tersebut dilakukan antara lain dengan menurunkan level PPKM menjadi level 2, menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi laut, darat maupun udara bagi masyarakat yang sudah vaksin hingga dosis ke-2. Dengan adanya transisi endemik, tugas pengawasan Obat dan Makanan akan lebih optimal, namun inovasi yang telah dibuat harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, banyak respon positif dari lintas sektor dan masyarakat terhadap inovasi khususnya layanan publik berbasis digital yang telah dilakukan di masa pandemik Covid 19. Hal ini, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BBPOM di Bandung untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

**2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-
2024**

**2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN
2022**

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

**2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)
TAHUN 2022**

2.5 METODE PENGUKURAN

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

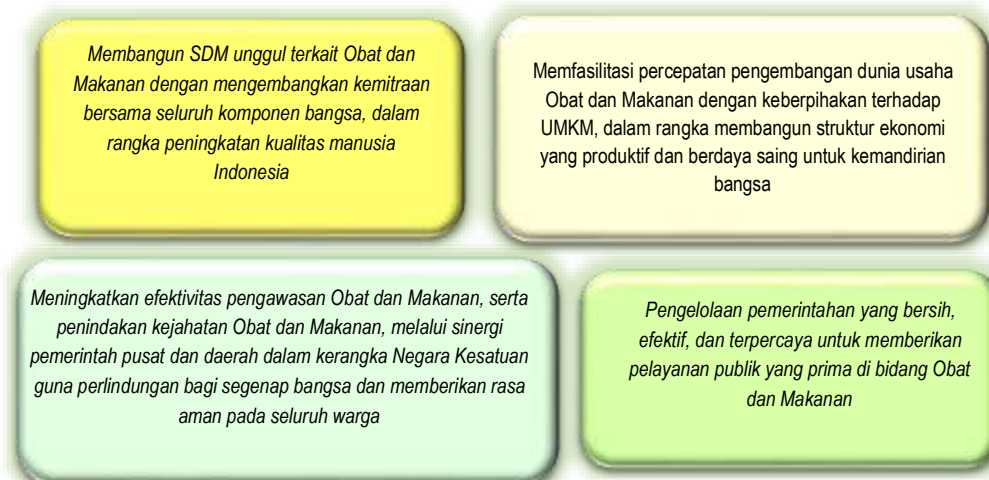
- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome* dan *i*

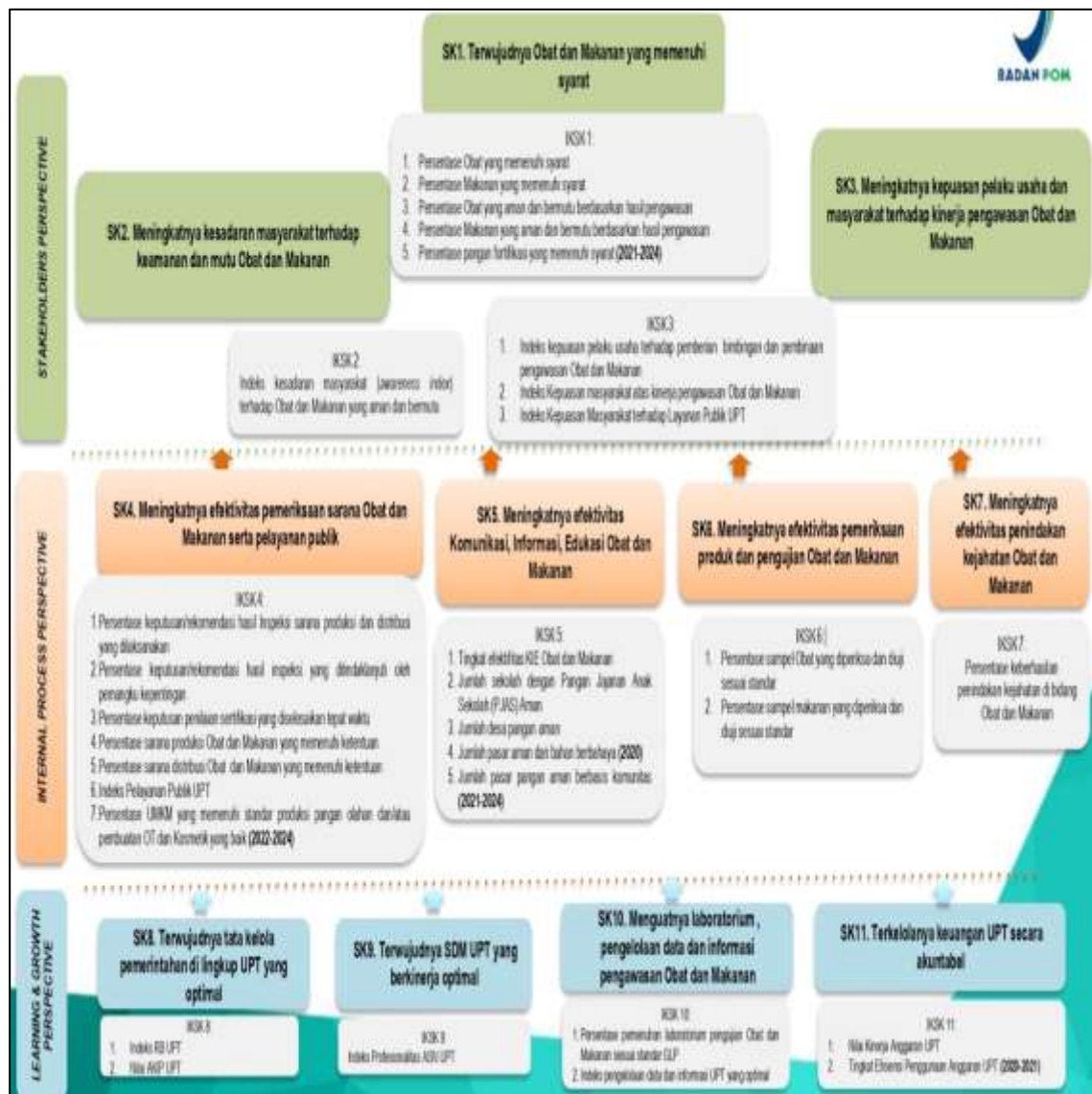
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:



Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024

SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadi sebagai berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perubahan
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.06.20.1060B tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung Tahun 2022

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET SEMULA (4)	TARGET MENJADI (5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		97.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		97

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET SEMULA (4)	TARGET MENJADI (5)
	pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		71
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		91
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		76
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung		4,45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik		77
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		76
		19. Jumlah desa pangan aman		28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		67
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung		83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung		80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		95.3
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung		-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan RKT Tahun 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 59.824.775.000.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4.45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET MENJADI (5)
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.3
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	-

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Anggaran (Menjadi)

Rp. 59.824.775.000,-

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	727.971.420,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	82%	82%	82%	436.247.500,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5 %	95.5 %	95.5 %	95.5 %	95.5 %	95.5 %	375.015.580,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%	72%	72%	72%	72%	72%	234.902.500,-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				72%	72%	72%	80.526.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu						74	45.712.000,-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan						92.3	204.200.000,-
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						80.22	30.720.000,-
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung						90.50	25.202.500,-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	97%	97%	97%	97%	97%	97%	267.880.000,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
	Bandung	dilaksanakan							
		11. Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%	71%	71%	71%	71%	71%	390.262.000,-
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%	91%	91%	91%	91%	91%	988.636.000,-
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61%	61%	61%	61%	61%	61%	745.414.000,-
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%	76%	76%	76%	76%	76%	1.236.470.000,-
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung						4,45	25.202.500,-
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	30	36.67	63.33	70	93.33	77	624.875.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	8.549.580.000,-
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	20%	44%	70%	82%	76	977.871.000,-
		19. Jumlah desa pangan aman	25%	65%	85%	95%	100%	28	1.190.726.000,-
		20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	20%	40%	90%	90%	90%	13	359.627.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	80%	90%	100%	618.228.000,-
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	80%	90%	100%	204.009.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	28%	41%	58%	61%	64%	67%	1.455.307.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di bandung						83,8	4.322.083.000,-
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung						85.5	340.780.000,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung						80	25.028.978.000,-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						84	9.624.790.000,-
		28. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	398.285.000,-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	23.7	47.4	71.1	79	86.9	95.3	315.274.000,-
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung							

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	X < 80%	Merah	Tidak Efektif

TABEL 2.6. CAPAIAN DAN EFISIENSI KINERJA BBPOM DI BANDUNG

	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.50	88.48	90.74	727,207,800	727,097,447	99.98	0.91	-0.09	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	89.42	109.05	427,272,300	427,162,815	99.97	1.09	0.09	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50	87.79	91.92	374,622,200	374,565,351	99.98	0.92	-0.08	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00	81.54	113.25	230,069,700	230,010,746	99.97	1.13	0.13	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00	83.23	115.59	64,850,000	64,820,350	99.95	1.16	0.16	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	74.00	82.63	111.66	34,885,000	34,881,000	99.99	1.12	0.12	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	94.40	102.28	181,200,000	181,039,000	99.91	1.02	0.02	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22	77.61	96.75	34,880,000	34,880,000	100.00	0.97	-0.03	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	92.24	101.92	33,817,500	33,817,500	100.00	1.02	0.02	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.00	97.71	100.73	43,861,000	43,510,300	99.20	1.02	0.02	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00	80.40	113.24	304,351,000	301,337,150	99.01	1.14	0.14	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00	100.00	109.89	810,165,000	808,922,495	99.85	1.10	0.10	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00	61.50	100.82	772,073,000	770,928,764	99.85	1.01	0.01	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00	80.59	106.04	1,065,647,000	1,064,909,986	99.93	1.06	0.06	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4.45	4.67	104.94	53,613,500	53,328,720	99.47	1.06	0.06	100 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	90.48	117.51	404,601,000	404,348,713	99.94	1.18	0.18	100 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.98	100.19	10,168,403,000	10,126,696,326	99.59	1.01	0.01	100 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76.00	76.00	100.00	896,331,000	888,185,852	99.09	1.01	0.01	100 %
19	Jumlah desa pangan aman	28.00	28.00	100.00	1,165,106,000	1,154,499,301	99.09	1.01	0.01	100 %
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13.00	13.00	100.00	357,227,000	354,078,735	99.12	1.01	0.01	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji	100.00	96.02	96.02	770,517,000	768,241,461	99.70	0.96	-0.04	75 %

	sesuai standar									
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	99.91	99.91	198,256,000	196,863,134	99.30	1.01	0.01	100 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.00	86.64	120.00	1,164,622,000	1,164,445,466	99.98	1.20	0.20	100%
24	Indeks RB UPT	83.80	89.17	106.41	3,950,203,000	3,949,348,579	99.98	1.06	0.06	100 %
25	Nilai AKIP UPT	85.50	80.76	94.46	6,630,000	6,630,000	100.00	0.94	-0.06	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80.00	85.90	107.38	27,229,129,000	27,145,568,235	99.69	1.08	0.08	100 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00	82.40	98.10	8,755,897,000	8,753,417,824	99.97	0.98	-0.02	75 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.88	120.00	410,872,000	410,868,669	100.00	1.20	0.20	100%
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.30	90.74	95.21	337,822,000	337,820,150	100.00	0.95	-0.05	75 %

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI





3.2 REALISASI ANGGARAN

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024, Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2022 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2022 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104.11	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	111.66	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100.31	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	107.60	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100.05	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	97.97	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	 KURANG EFEKTIF
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120.00	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	100.43	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	107.38	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	109.05	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	95.22	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	 KURANG EFEKTIF
TOTAL	104.93	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF

Jika dibandingkan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung dengan Balai Besar POM lain dengan beban kerja yang setara yaitu: Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang, dan Balai Besar POM di Makassar, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2022
KLASTER 1

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI BANDUNG	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI SURABAYA	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI SEMARANG	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI MAKASSAR
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104.11	101.66	96.45	108.79
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	111.66	102.86	101.09	98.04
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100.31	104.67	104.89	100.60
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI	107.60	104.05	105.92	105.83

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI BANDUNG	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI SURABAYA	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI SEMARANG	NILAI PENCAPAIAN SASARAN BBPOM DI MAKASSAR
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG				
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100.05	100.18	102.64	100.03
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	97.97	99.23	100.00	100.00
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120.00	100.09	120.00	106.89
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	100.43	104.02	105.92	105.75
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	107.38	100.63	99.99	108.86
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	109.05	111.33	111.55	108.64
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	95.22	96.76	97.02	93.31
TOTAL	104.93	102.38	103.86	103.27

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat seluruh Balai Besar POM pada Klaster 1 belum keseluruhannya dapat mencapai sasaran kegiatan yang diharapkan, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar POM di Semarang belum mencapai 2 sasaran kegiatan, sedangkan Balai Besar POM di Makassar belum dapat mencapai 3 sasaran kegiatan. Namun secara keseluruhan keempat Balai Besar POM tersebut telah **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**, dengan Nilai Pencapaian Sasaran dari

yang tertinggi adalah **Balai Besar POM di Bandung (104.93%)**, Balai Besar POM di Semarang (103.86%), Balai Besar POM di Makassar (103.27), Balai Besar POM di Surabaya (102.38%).

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

TABEL 3.3
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	97.50%	88.48%	90.75%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00%	89.42%	109.05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	87.79%	91.93%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	81.54%	113.25%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	83.23%	115.60%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				104.11%	MEMENUHI EKSPEKTASI
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74.00	82.63	111.66	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				111.66%	MEMENUHI EKSPEKTASI
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha	7. Indeks kepuasan pelaku usaha	92.30	94.40	102.28%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
	dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					
8.		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22	77.61	96.75%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
9.		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90.50	92.24	101.92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					100.31%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97.00%	97.71%	100.73%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
11.		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	80.40%	113.24%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
12.		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	100.00%	109.89%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
13.		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	61.50%	100.82%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
14.		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	80.59%	106.04%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.67	104.94%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00%	90.48%	117.50%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			107.60%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.98	100.19%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	76	100.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		19. Jumlah desa pangan aman	28	28	100.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		20. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	13	13	100.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	96.02%	96.02%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	99.91%	99.91%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			97.97%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,00%	86.64%	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
	wilayah kerja BBPOM di Bandung	NILAI PENCAPAIAN SASARAN			120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.80	89.17	106.41%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.50	80.76	94.46%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.43%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80.00	85.90	107.38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			107.38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%	82.40%	98.10%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.88	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			109.05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.30	90.74	95.22%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			95.22%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Pada tahun 2022, terdapat delapan (9) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria memenuhi ekspektasi, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2022 berdasarkan *Perspective Balance Score Card* sebesar **104.93**, dengan rincian Nilai Kinerja *Stakeholder Perspective* (105.36); Nilai Kinerja *Internal Process Perspective* (106.40) dan Nilai Kinerja *Learning and Growth Perspective* (103.02), secara rinci sebagaimana tabel 3.4 berikut:

TABEL 3.4
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TAHUN 2022

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104.11	105.36
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	111.66	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100.31	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	107.60	106.40
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100.05	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	97.97	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120.00	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	100.43	103.02
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	107.38	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	109.05	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	95.22	
NILAI KINERJA ORGANISASI	104.93		

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM
DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **104,11%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

**TABEL 3.5
KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.50%	88.48%	90.75%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82.00%	89.42%	109.05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	95.50%	87.79%	91.93%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72.00%	81.54%	113.25%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	83.23%	115.60%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN	104.11%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF		

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022

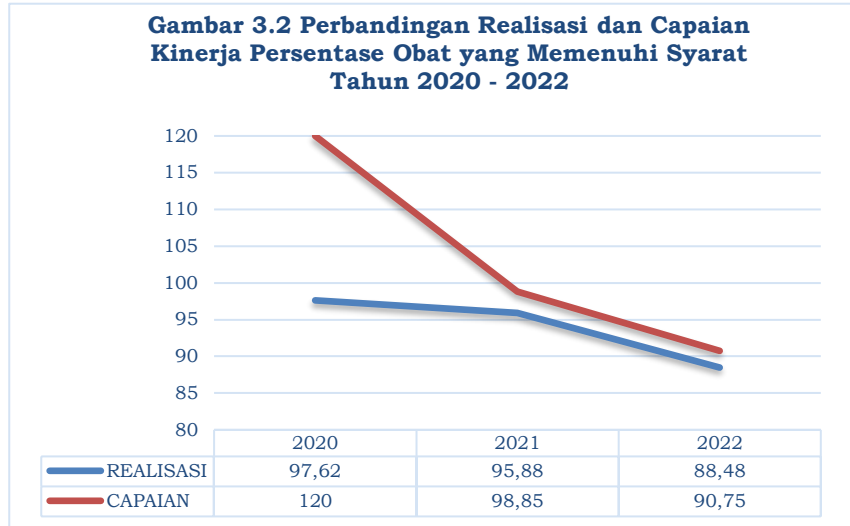
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.50%	88.48%	90.75%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan adalah sebesar 97,50%. Sebanyak 1935 sampel acak telah



diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 1712 sampel memenuhi syarat, 223 sampel yang tidak memenuhi syarat. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 88,48%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **90,75%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021



Pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya

peningkatan jumlah sampel TMS dari evaluasi penandaan pada tahun 2020 sebanyak 27 sampel, tahun 2021 sebanyak 37 sampel dan tahun 2022 sebanyak 205 sampel.

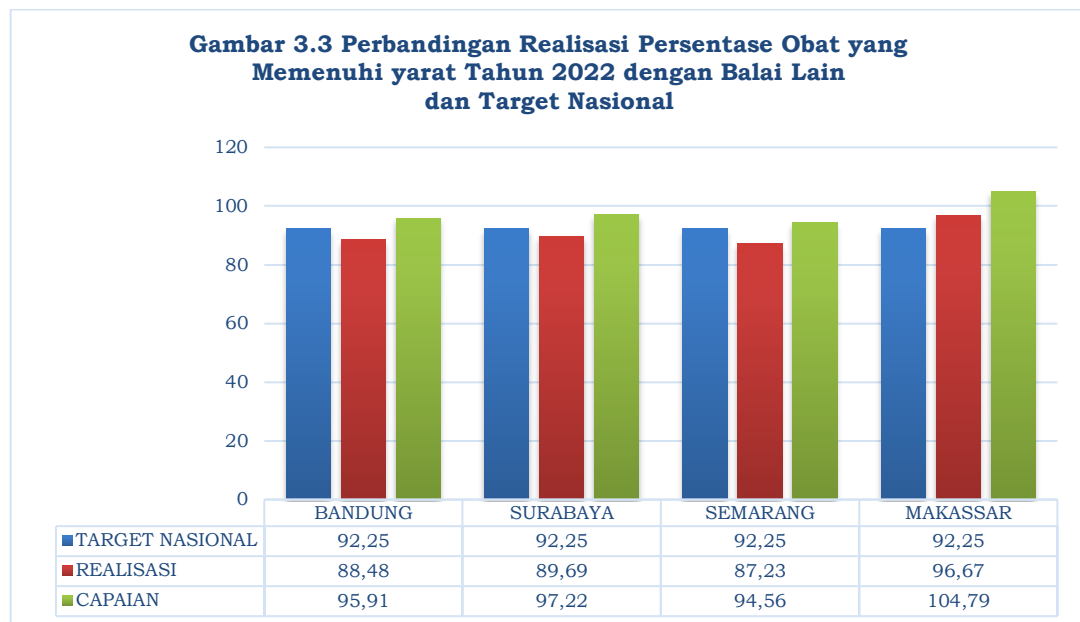
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.7
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98.50%	88.48%	89.82%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 89.82% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 dengan target nasional (92.25%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (104.79%), Balai Besar POM di Surabaya (97.22%), Balai Besar POM di Bandung (95.91%) dan Balai Besar POM di Semarang (94.56%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas penurunan kinerja disebabkan antara lain:

- Pada tahun 2022 hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 223 sampel. Terdiri dari 199 sampel TMK Penandaan, 6 sampel TMK penandaan dan TMS pengujian, dan 18 sampel TMS Mutu Pengujian. Selain sampel tersebut di atas, terdapat sampel Obat Tradisional yang Tanpa Izin Edar sebanyak 5 sampel dan tidak dilakukan pengujian. Sedangkan pada tahun 2021 hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 54 sampel terdiri dari 37 sampel TMK Penandaan dan 17 sampel TMS Mutu Pengujian. Pada tahun 2020 hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 47 sampel terdiri dari 27 sampel TMK Penandaan dan 20 sampel TMS Mutu Pengujian.
- Selama periode tahun 2020 - 2022 sampel TMS Pengujian berasal dari parameter uji mikrobiologi (Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir) dan parameter uji kimia (disolusi, kadar zat aktif, kadar air, Bahan Kimia Obat).
- Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait label/penandaan produk sediaan farmasi, khususnya obat tradisional dan kosmetik.

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat, *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Melaksanakan KIE Bersama lintas sektor (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).
- Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- Melakukan patroli Siber terhadap peredaran Obat, Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar yang beredar di wilayah BBPOM di Bandung. Tindak lanjut patroli siber berupa penelusuran terhadap

alamat dari akun di market place dan melakukan take down terhadap akun di market place yang menjual Obat, Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.8
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.50	88.48	90.74	727,207,800	727,097,447	99.98	0.91	-0.09	75 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar -0.09 (75.00%) dengan kriteria tidak efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengukuran kinerja indikator tersebut tidak dapat diintervensi secara langsung karena merupakan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, namun dalam pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian membutuhkan penggunaan anggaran dengan besaran sebagaimana tertera pada tabel tersebut. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 🏠 Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian. Pemeriksaan
- 🏠 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada tahun 2022 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 158 sarana.

- ☛ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan media sosial.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.9
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring sesuai dengan target yang telah ditetapkan.		
b Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.	Dilakukan monitoring dan evaluasi CAPA yang masuk dan dilaporkan secara berkala. Telah dilakukan bimtek dan desk CAPA tanggal 26 Agustus 2022 untuk sarana puskesmas		
c Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka		
d Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakan setiap bulan.			
e Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 2022 2. Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema Penggalan Informasi Empiris bahan alam 		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
	berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 2022 3. Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tanggal 15 Desember 2022 4. Melakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang disampaikan kepada instansi terkait		
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.		

2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin

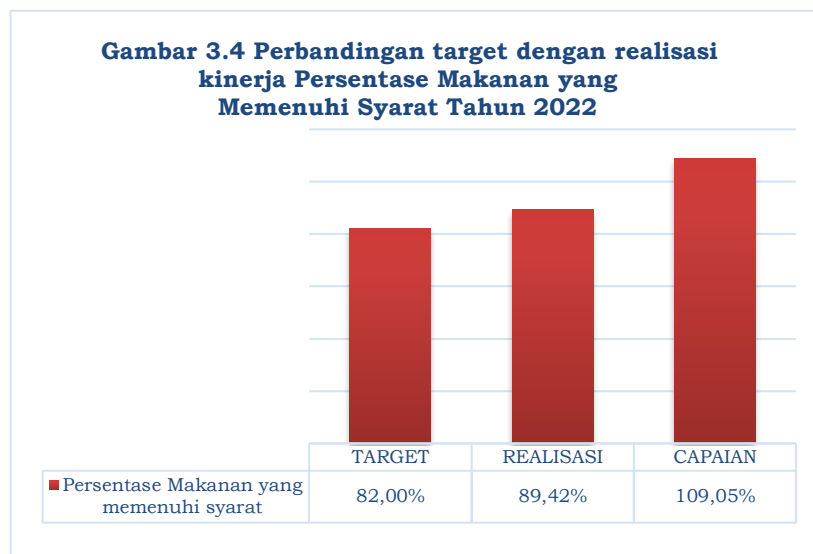
1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10.

TABEL 3.10
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022

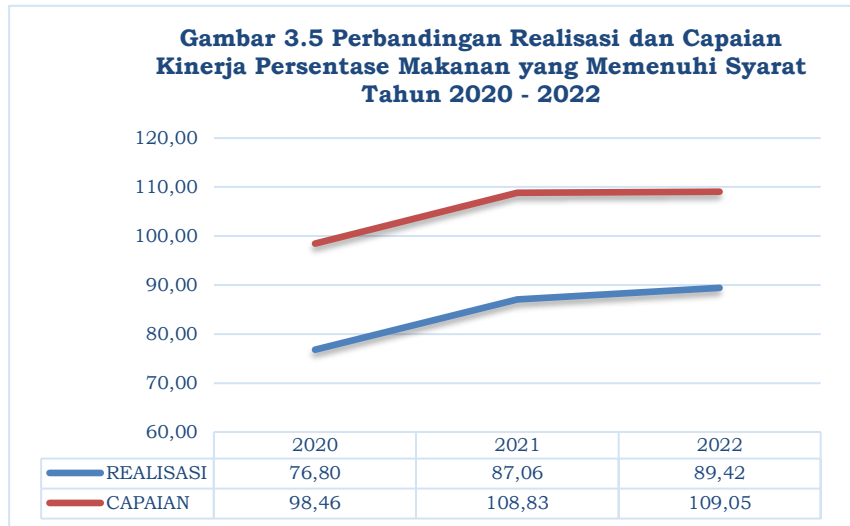
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00%	89,42%	109,05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 82,00%. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 89,42%, dengan rincian 668 sampel memenuhi syarat dan 79 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 747 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **109,05%** dengan kriteria **Baik**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021



Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya

penurunan jumlah sampel TMS pada tahun 2020 sebanyak 142 sampel dari 612 sampel yang disampling, tahun 2021 sebanyak 63 sampel dari 487 sampel yang disampling dan tahun 2022 sebanyak 79 sampel dari 747 sampel yang disampling.

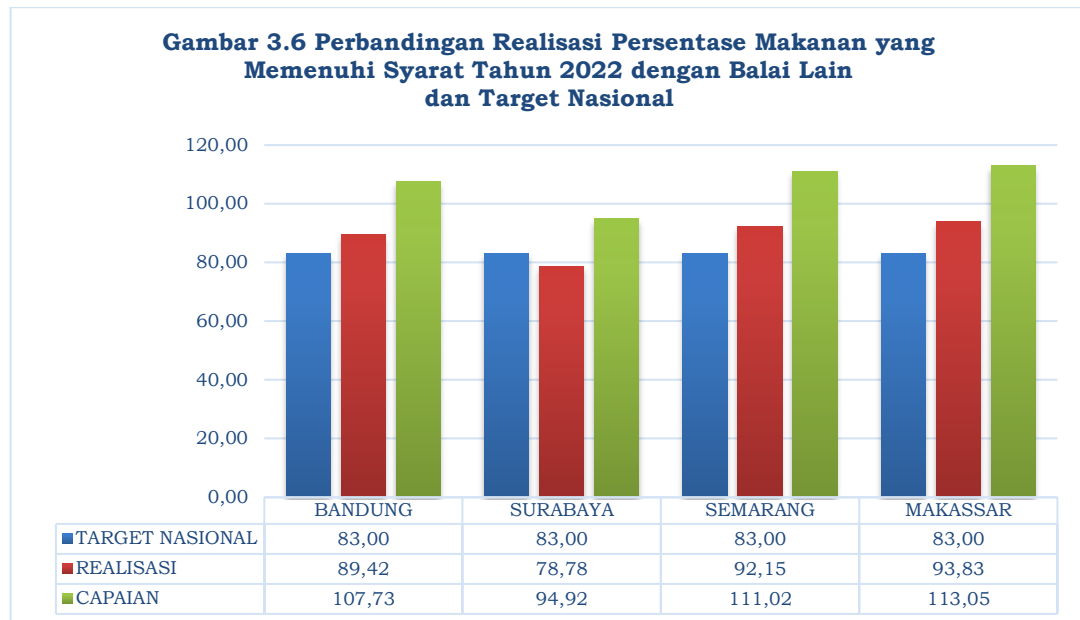
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.11
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86.00	89.42	103.98	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 103.98% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 dengan target nasional (83.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (113.05%), Balai Besar POM di Semarang (111.02%), Balai Besar POM di Bandung (107.73%) dan Balai Besar POM di Surabaya (94.92%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pada tahun 2020 sebanyak 142 sampel dari 612 sampel yang disampling, tahun 2021 sebanyak 63 sampel dari 487 sampel yang disampling dan tahun 2022 sebanyak 79 sampel dari 747 sampel yang disampling.
- ☛ Selama periode tahun 2020 - 2022 sampel TMS Pengujian berasal dari parameter uji mikrobiologi (MPN E. Coli, Enterobacteriaceae, ALT dan Kapang Khamir) dan parameter uji kimia (Bahan Tambahan Pangan, Kafein, HMF dan Enzim Diastase).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio serta SMS Blast tentang Obat dan Makanan.
- ☛ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☛ Penerapan sanksi pidana terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar antara lain melalui kegiatan Operasi Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya.
- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.12
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	89.42	109.05	427,272,300	427,162,815	99.97	1.09	0.09	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.09 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil

dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ☛ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2022, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 255 sarana.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.13
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.	Kegiatan KIE dilaksanakan dengan melibatkan Tokoh Masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media, selain itu dilakukan monitoring dan evaluasinya.		
b Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan tanggal 21 November 2022		
c Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
	hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022		
d Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.	Desk Teknis Penilaian Mandiri Post Market PIRT tanggal 3-4 Oktober 2022		

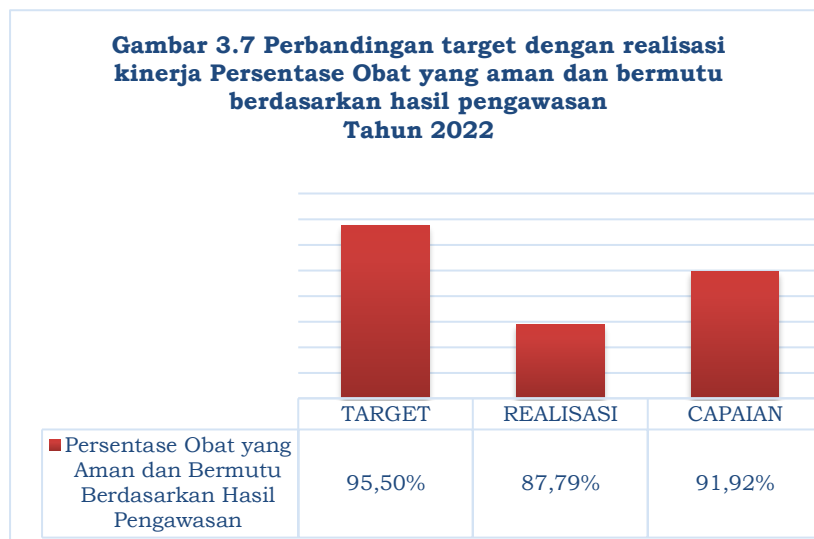
3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2022. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka., Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	87,79%	91.92%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

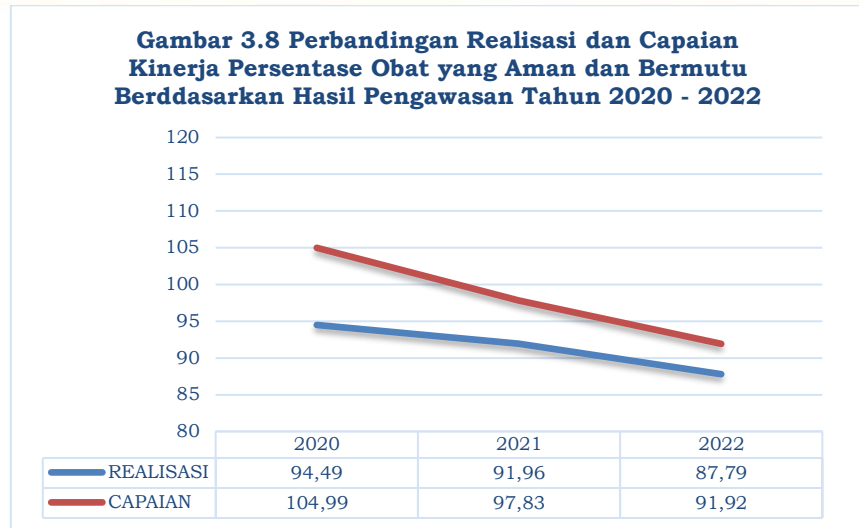


Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 95.50%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 745 sampel dengan rincian sebanyak 654 sampel

memenuhi syarat dan 91 sampel tidak memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 87.79%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **91.92%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah sampel TMS dari evaluasi penandaan pada tahun 2020 sebanyak 23 sampel, tahun 2021 sebanyak 30 sampel dan tahun 2022 sebanyak 69 sampel.



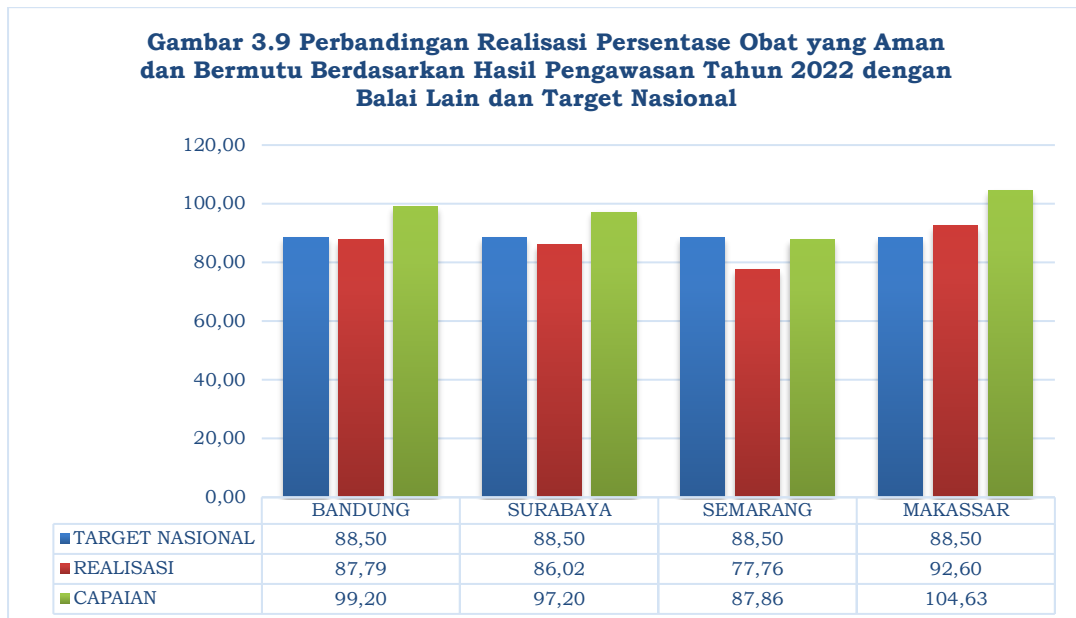
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.15
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96.50	88.48	91.69	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 91.69% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 dengan target nasional (88.50%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (104.63%), Balai Besar POM di Bandung (99.20%), Balai Besar POM di Surabaya (97.20%) dan Balai Besar POM di Semarang (87.86%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas penurunan kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling.
- ☛ Pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah sampel TMS dari evaluasi penandaan pada tahun 2020 sebanyak 23 sampel, tahun 2021 sebanyak 30 sampel dan tahun 2022 sebanyak 69 sampel.

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui

media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

- ☛ Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE.
- ☛ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- ☛ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☛ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.16
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50	87.79	91.92	374,622,200	374,565,351	99.98	0.92	-0.08	75 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar -0.08 (75.00%) dengan kriteria tidak efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengukuran kinerja indikator tersebut tidak dapat diintervensi secara langsung karena merupakan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, namun dalam pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian membutuhkan penggunaan anggaran dengan besaran sebagaimana tertera pada tabel tersebut. Meskipun

demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

- ☛ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi obat terkait pengambilan sample produk yang mengandung cemaran etilenglikol dan dietilenglikol.
- ☛ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada tahun 2022 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 158 sarana.
- ☛ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada tahun 2022 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 1221 sarana.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.17
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2022

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional,		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring	Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring		
b Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022		
c Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.	Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka		
d Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakn setiap bulan.	Melakukan penyebaran informasi terkait peraturan bagi pelaku usaha dan masyarakat, publik warning melalui subsite, media sosial, media luar ruang dan KIE melalui Program Warta POPA bulanan		
e Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 2022 2. Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema Penggalan Informasi Empiris bahan alam berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 2022 3. Kegiatan Sinergitas Penguatan 		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
	<p>Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tanggal 15 Desember 2022</p> <p>4. Kegiatan Farmacovigilance terkait penelusuran kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada Anak bersama dengan Dinkes KBB pada tanggal 25 Oktober 2022</p>		
<p>f Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.</p>	<p>Melakukan pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap sarana produksi atau distribusi yang memproduksi/mendistribusikan obat tanpa izin edar (TIE) melalui media sosial atau media elektronik</p>		

4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman

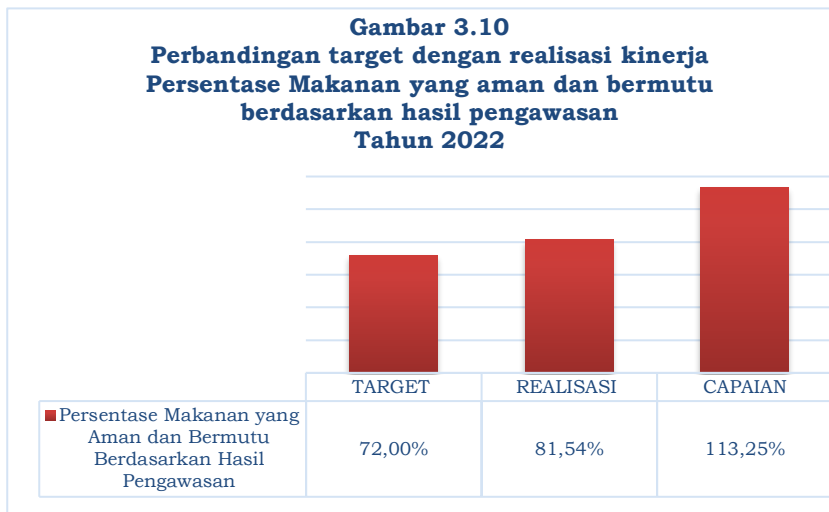
Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.18.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72,00%	81,54%	113,25%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 72,00%.

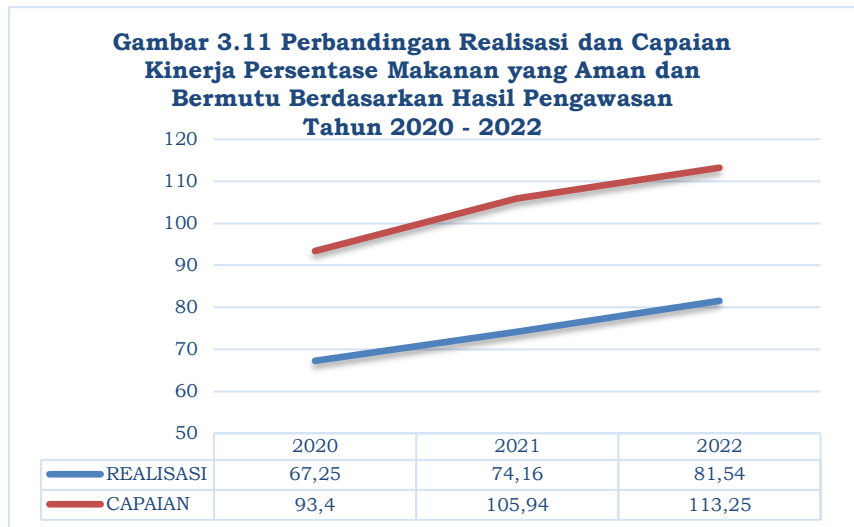


Persentase Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 sebesar 81,54%, dengan rincian

sebanyak 212 sampel targeted memenuhi syarat dan 48 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 260 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **113,25%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pengujian pada tahun 2020 sebanyak 132 sampel dari 403 sampel targeted, tahun 2021 sebanyak 69 sampel dari 267 sampel targeted dan tahun 2022 sebanyak 48 sampel dari 260 sampel targeted.



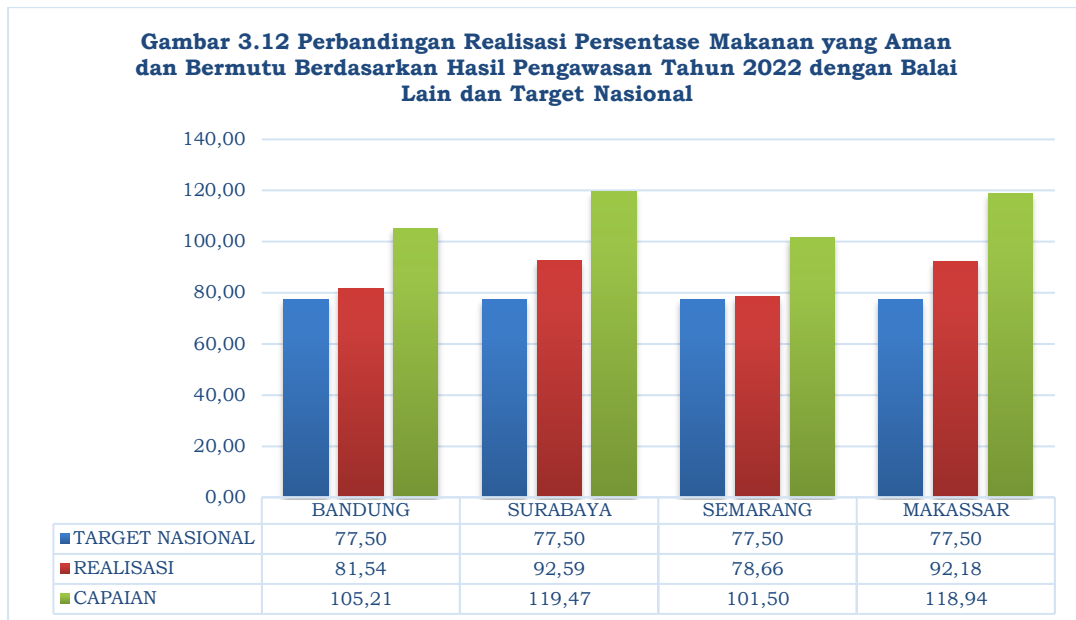
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.19
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	76	81.54	107.29	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 107.29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 dengan target nasional (77.50%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (119.47%), Balai Besar POM di Makassar (118.94%), Balai Besar POM di Bandung (105.21%) dan Balai Besar POM di Semarang (101.50%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Sampel targeted yang telah disampling pada tahun 2022 adalah sebanyak 260 sampel yang meliputi sampel PJAS, sampel kemasan, sampel kasus pemeriksaan (uji cemaran EG dan DEG serta AMDK), DNA porcine dan sampel UMKM.
- ☛ Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pengujian pada tahun 2020 sebanyak 132 sampel dari 403 sampel targeted, tahun 2021 sebanyak 69 sampel dari 267 sampel targeted dan tahun 2022 sebanyak 48 sampel dari 260 sampel targeted.

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.20
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00	81.54	113.25	230,069,700	230,010,746	99.97	1.13	0.13	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.18 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- ☛ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2022, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 255 sarana.
- ☛ Telah dilaksanakannya Sebagian tahapan kegiatan program nasional keamanan pangan yang meliputi PJAS Aman, Gerakanan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di 2 Kab/Kota.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.21
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN"
TAHUN 2022**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter adan Youtube. KIE melalui Webinar warta POPA dan Sosialisasi dalam rangka KIE Film Pendek bekerjasama dengan Pramuka.	1) Melaksanakan program talkshow mengenai Pengawasan Obat dan Makanan bersama Radio, 2) Talkshow melalui Instagram live "Kelom Geulis"		
b Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPOOB.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan tanggal 21 November 2022		
c Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022		
d Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.	Desk Teknis Penilaian Mandiri Post Market PIRT tanggal 3-4 Oktober 2022		

5. PRESENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

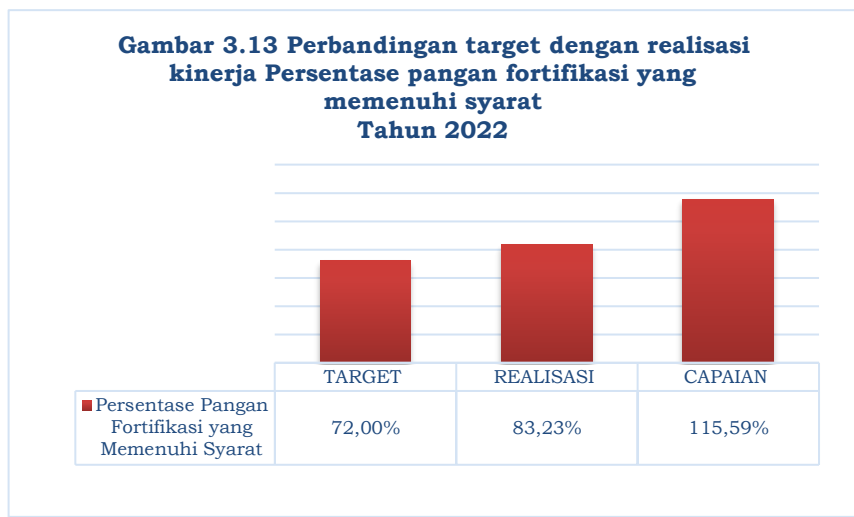
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada

tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.22
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022

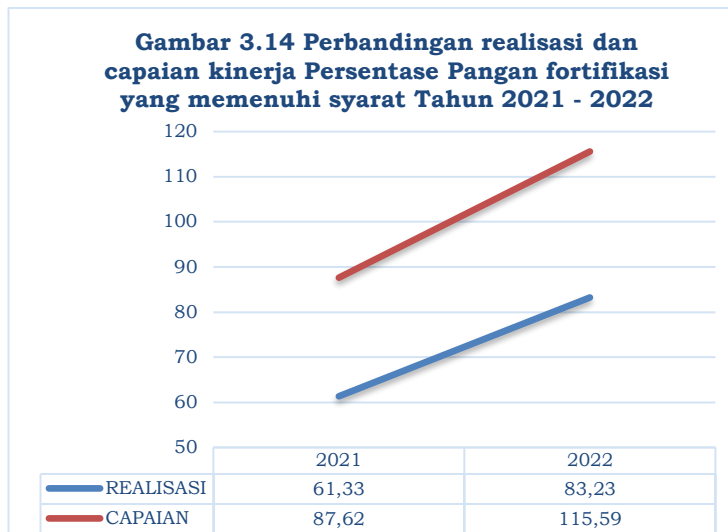
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	72,00%	83,23%	115,59%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan

Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 72,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 83,23%, dengan rincian sebanyak 129 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dan 26 sampel fortifikasi tidak memenuhi syarat dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 155 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **115,59%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021



Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah sampel TMS pengujian pada tahun 2021 sebanyak 58 sampel dari 150 sampel,

dan tahun 2022 sebanyak 26 sampel dari 155 sampel. Untuk tahun 2020 sampel fortifikasi termasuk ke dalam indikator kinerja persentase sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

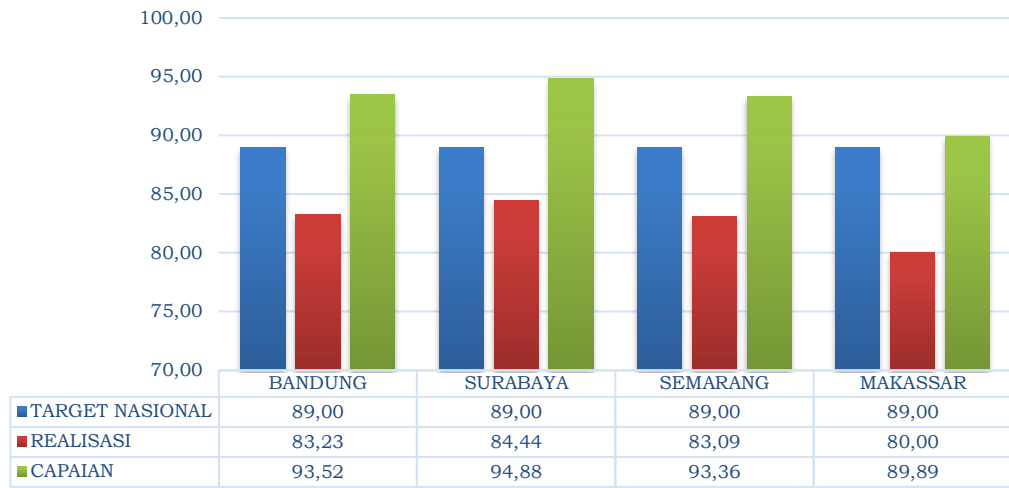
**TABEL 3.23
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	76.00	83.23	109.51	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kerjanya sebesar 109.51% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Balai Lain dan Target Nasional



Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 dengan target nasional (89.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (94.88%), Balai Besar POM di Bandung (93.52%), Balai Besar POM di Semarang (93.36%) dan Balai Besar POM di Makassar (89.89%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- 🏠 Pada tahun 2022 hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebagian besar berasal dari sampel fortifikasi garam beryodium, yaitu sebanyak 23 sampel mengandung KIO₃ yang substandard. Akan tetapi sampel fortifikasi secara keseluruhan yaitu sampel tepung terigu dan minyak goreng sawit terjadi peningkatan sampel memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.
- 🏠 Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM.

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- 🏠 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan

Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

- ☞ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.24
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00	83.23	115.59	64,850,000	64,820,350	99.95	1.16	0.16	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.16 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- ☞ Meningkatnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.25
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan tanggal 21 November 2022		
b Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022 Pembinaan pelaku usaha distribusi pangan untuk menerapkan CPerPOB. Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada sarana distribusi pangan olahan untuk menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) direncanakan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022		
c Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.	Desk Teknis Penilaian Mandiri Post Market PIRT tanggal 3-4 Oktober 2022 Terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan sarana produksi dan distribusi pangan fortifikasi		
a Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.	Pembinaan pada produsen pangan yang memproduksi pangan fortifikasi dilakukan saat pemeriksaan sarana baik rutin maupun verifikasi CAPA. Pembinaan dan pendampingan untuk pemenuhan CPPOB dilakukan secara bertahap		

SASARAN KEGIATAN KE-2

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **111.66%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.26.

**TABEL 3.26
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-2
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74.00	82.63	111.66	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			111.66	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan Tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh

mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara pengukurannya melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Sebagaimana disampaikan bahwa Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

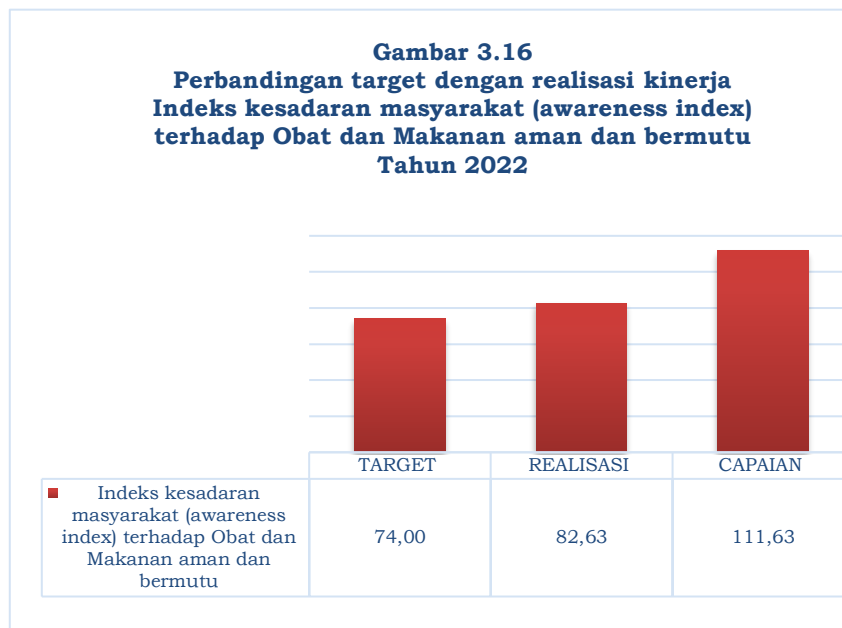
TABEL 3.27
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP
OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
≤ 45,00	Tidak Baik
45,01 – 60,00	Kurang Baik
60,01 – 75,00	Cukup Baik
75,01 – 90,00	Baik
≥ 90,00	Sangat Baik

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.28
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74.00	82.63	111.66	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

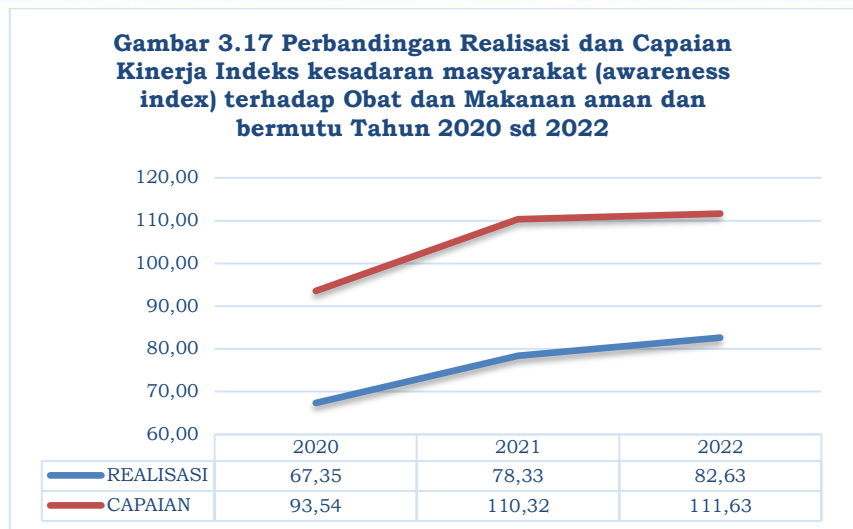


Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 74.00, sedangkan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan

Makanan aman dan bermutu sebesar 82.63. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 111.66% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE secara berkala, pengembangan kegiatan KIE yang lebih variative sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat, serta mengoptimalkan peran media sosial elektronik dan media cetak untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan.



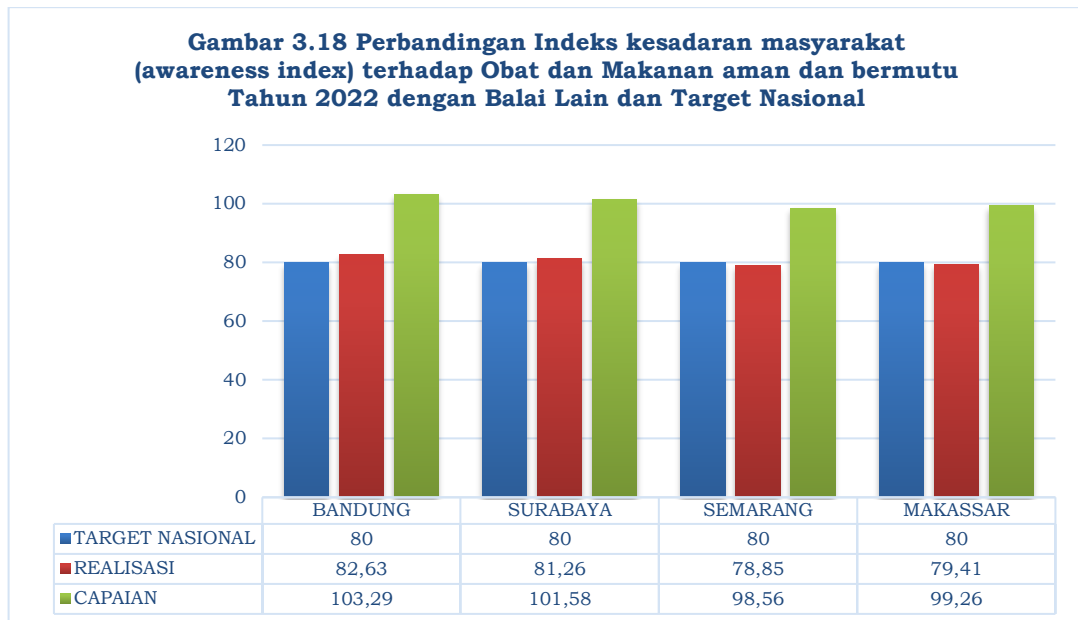
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.29
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80	82.63	103.28	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 103.28% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah terlampaui, namun perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap target Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada tahun 2022 dengan target nasional (80.00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (103.29%), Balai Besar POM di Surabaya (81.26%), Balai Besar POM di Makassar (99.26%) dan Balai Besar POM di Semarang (78.85%). Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tingkat nasional sebesar 81.56 (Kategori Baik), jika dibandingkan realisasi Balai Besar POM di Bandung diatas realisasi nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 masuk dalam kategori Baik (82.63), yang artinya sudah adanya kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai obat dan makanan aman dan bermutu, namun perlu ditingkatkan. Keberhasilan atas peningkatan kinerja ini disebabkan antara lain:

- ☛ Sosialisasi tugas dan fungsi, program dan layanan yang dilakukan BBPOM di Bandung melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik seperti kegiatan penyebaran informasi, intensifikasi penyuluhan/komunikasi terkait keamanan produk.

- 🕌 Menggencarkan penggunaan tagline KLIK melalui berbagai media.
- 🕌 Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan BBPOM di Bandung.
- 🕌 Melakukan pembaharuan website BBPOM di Bandung agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat.
- 🕌 Kegiatan KIE dengan melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat.
- 🕌 Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan disesuaikan dengan usia dan platform media sosial.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PI.06.2.14.01.23.04 tanggal 02 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- 🕌 Meningkatkan sinergi dengan kementerian/Lembaga/stakeholder, antara lain dengan:
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio local di seluruh Indonesia (TVRI, RRI).
 - Kementerian Dalam Negeri: bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan, diantaranya melalui pergerakan Posyandu.
 - Kementerian Kesehatan: berkolaborasi untuk menyebarkan informasi keamanan obat melalui sarana layanan Kesehatan (puskesmas, dll).
 - Kementerian Pendidikan: bekerjasama untuk mendesiminasikan materi KIE melalui kurikulum mata pelajaran atau melalui ekstra kurikuler.
- 🕌 Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
 - Memfokuskan tujuan dan tema KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE;
 - Penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerimaan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, Pendidikan dan cakupan wilayah;
 - Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah;
 - Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb);

- Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yakni media televisi, kemasan produk dengan cara pencantuman Nomor Izin Edar (NIE) yang lebih jelas dan mudah terlihat serta mencantumkan logo BPOM pada kemasan, media sosial disesuaikan dengan usia dan platform media sosial serta media luar ruang.
- 🏠 Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi Kesehatan masyarakat seperti pengenalan logo obat pada kemasan obat sebagai penanda klasifikasi obat dan membaca informasi yang tertera pada label Obat dan Makanan terutama pada masyarakat di wilayah rural.
- 🏠 Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
- 🏠 Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website.
- 🏠 Melakukan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut terhadap hasil dan rekomendasi pengukuran indeks.

G. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.30
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	74.00	82.63	111.66	34,885,000	34,881,000	99.99	1.12	0.12	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar 0.12 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ☛ Kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan media sosial.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.31
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan kerjasam melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
b Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara: (1) memfokuskan tujuan KIE; (2) menentukan materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia; (3) mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing; (4) menggunakan media yang banyak diakses masyarakat al. Media TV, Media sosial dan internet, Sosialisasi websit, Media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, postery.	-	-	-
c Melakukan upaya persuasive yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya memperhatikan petunjuk penyimpanan produk yang benar dan membeli produk dengan kemasan yang masih baik/bagus. Kedua informasi tersebut perlu ditingkatkan kepada masyarakat untuk seluruh kategori produk. Upaya	-	-	-

Rekomendasi	Tindakan lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
	persuasif dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian materi KIE dan lebih interaktif.		
d	Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat Konten dari program KIE BPOM dapat dirumuskan dengan berbagai topik, seperti menampilkan berbagai berita aktual, foto foto kegiatan pimpinan BPOM, edukasi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan nomor izin edar logo obat label obat dan tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan produk yang dibeli/dikonsumsi.	-	
e	Meningkatkan upaya untuk membentuk sikap yang lebih positif khususnya untuk produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan terkait kebiasaan membaca petunjuk penggunaan dan mencari tahu tentang efek samping yang mungkin timbul dari produk yang digunakan/dikonsumsi.	-	
f	Mendorong terciptanya perilaku yang lebih baik terkait pemilihan/ penggunaan/konsumsi produk obat dan makanan dengan fokus sebagai berikut : (a) Untuk seluruh kategori produk , prioritas upaya pembentukan perilaku yang lebih baik perlu difokuskan diantaranya pada: menumbuhkan kebiasaan untuk membaca petunjuk penyimpanan produk sesuai dengan informasi yang tertera pada label, membaca informasi pada label/ kemasan sebelum menggunakan, dan membeli/menggunakan produk yang terdaftar di BPOM dan (b) Pada produk Pangan Olahan dan Kosmetik, perlu difokuskan pembentukan perilaku yang lebih baik dengan membeli produk yang kemasannya baik.	-	
g	Prioritas daerah dengan Indeks kesadaran yang masih rendah dengan meningkatkan intensitas KIE. Fokus utama adalah	-	

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
pemberian pengetahuan dan pembentukan sikap yang positif dan bijak dalam memilih/membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan Upaya edukasi perlu diutamakan untuk lebih menyentuh pada aspek emosi, perasaan, dan kepercayaan yang akan mempengaruhi kesadaran terhadap obat dan makanan. Media edukasi dan bentuk kegiatan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat untuk meningkatkan kemungkinan penyerapan informasi yang diberikan			

SASARAN KEGIATAN KE-3

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan Inspektorat Utama Badan POM. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **100.31%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.32.

**TABEL 3.32
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-3
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	94.40	102.28%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22	77.61	96.75%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Bandung	90.50	92.24	101.92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.31%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

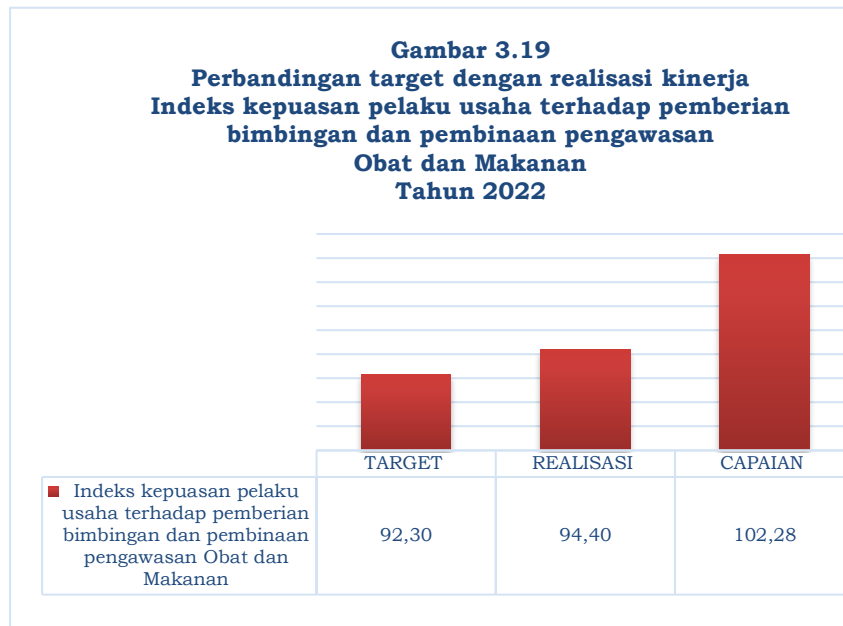
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.33
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	94.40	102.28%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

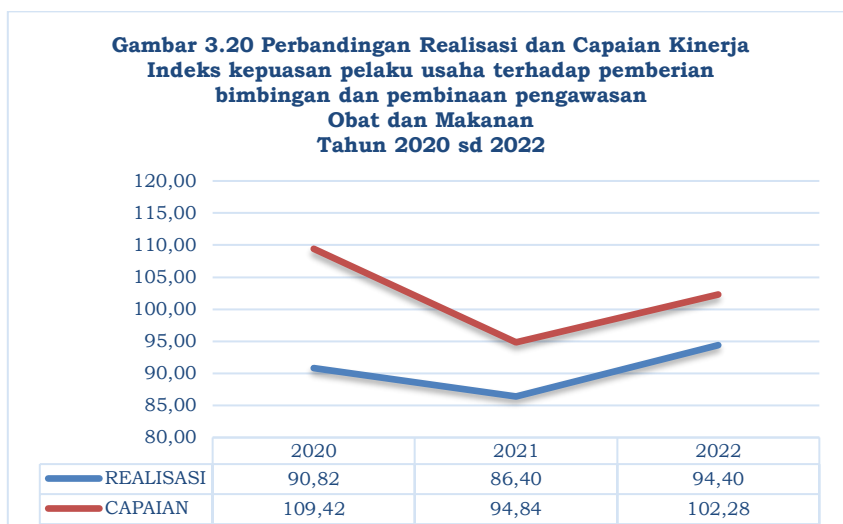
Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92.30, sedangkan realisasi Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 94,40. Dengan

demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 102,28% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Capaian tahun 2022 meningkat sebesar 9% (8 poin) dibandingkan tahun 2021 dan 4% (3,58 poin) dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan capaian ini disebabkan adanya perubahan pola pendampingan kepada pelaku usaha. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui desk tatap muka, baik secara online ataupun onsite sehingga para pelaku usaha dapat didampingi secara langsung dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha tersebut. Selain itu peningkatan kompetensi para petugas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelaku usaha.



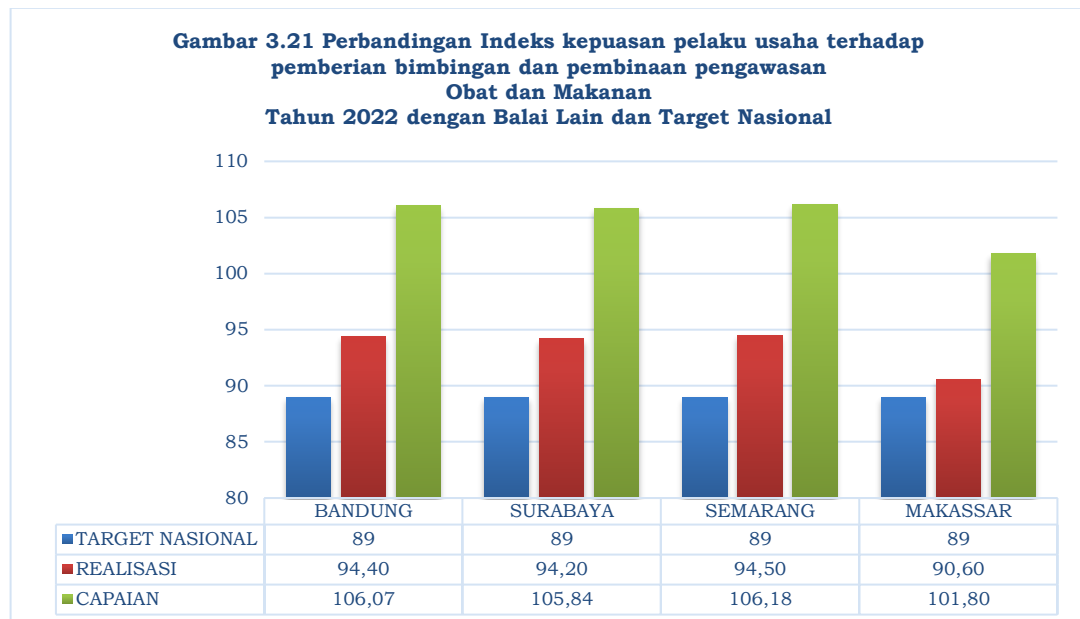
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.34
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.6	94.40	99.78%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 99.78% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 dengan target nasional (89.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (101,80%), Balai Besar POM di Semarang (106.18%), Balai Besar POM di Bandung (106.07%) dan Balai Besar POM di Surabaya (105.84%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kebahagiaan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2022 disebabkan antara lain:

- 👉 Peningkatan *reliability* dari materi yang disampaikan, meliputi kemanfaatan materi dan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh pelaku usaha.
- 👉 Peningkatan kompetensi dari petugas/narasumber. Kompetensi yang dimiliki oleh narasumber, selain dari kemampuan teknis, juga kemampuan lainnya yang dibutuhkan, antara lain kemampuan berkomunikasi dengan pelaku usaha. Kemampuan narasumber dalam merespon peserta dengan cara yang ramah dan tepat memberikan kepuasan kepada pelaku usaha. Disamping memberikan jawaban yang tepat, sesuai dengan standar/peraturan.
- 👉 Peningkatan kualitas layanan konsultasi/pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha melalui tatap muka langsung, online dan kunjungan lapangan telah berdampak langsung terhadap proses perizinan/sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PI.06.2.14.01.23.04 tanggal 02 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- 👉 Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas hasil survey atau hasil pengukuran indeks.
- 👉 Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM.
- 👉 Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.
- 👉 Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, Teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan

mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.35
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	94.40	102.28	181,200,000	181,039,000	99.91	1.02	0.02	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar 0.02 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ☛ Penyampaian informasi sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan bimtek/sosialisasi/desk melalui media sosial sangat efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- ☛ Peningkatan kompetensi petugas/narasumber/evaluator, melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan POM atau pihak lain.
- ☛ Koordinasi lintas sektor berlangsung sangat intens, terutama dengan dinas-dinas yang mengkoordinasi usaha mikro kecil, antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.



- ☛ Desk CAPA yang dilakukan secara langsung antara evaluator dengan pelaku usaha yang sedang berproses di perizinan, baik secara daring ataupun luring

Desk CAPA Daring



Desk CAPA Luring

- ☛ Dilakukan Sosialisasi dan Desk Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang tahun 2022 dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada Bulan Maret, Bulan November dan Bulan Desember. Kegiatan ini direspon sangat positif oleh para pelaku usaha, karena secara signifikan mempercepat proses penerbitan ijin edar pangan olahan. Dari kegiatan ini mengundang sebanyak 130 pelaku usaha, dan telah diterbitkan ijin edar sebanyak 50 NIE dan 43 akun perusahaan.





H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.36
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN
PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas hasil survei atau hasil pengukuran indeks.	Telah dilakukan monitoring dan pelaksanaan tindaklanjut dari hasil survei	-	-
b Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM	Seluruh saran dan masukan dari responden telah ditindaklanjuti	-	-
c Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan	Petugas yang melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan Pendidikan dan pelatihan	-	-

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan

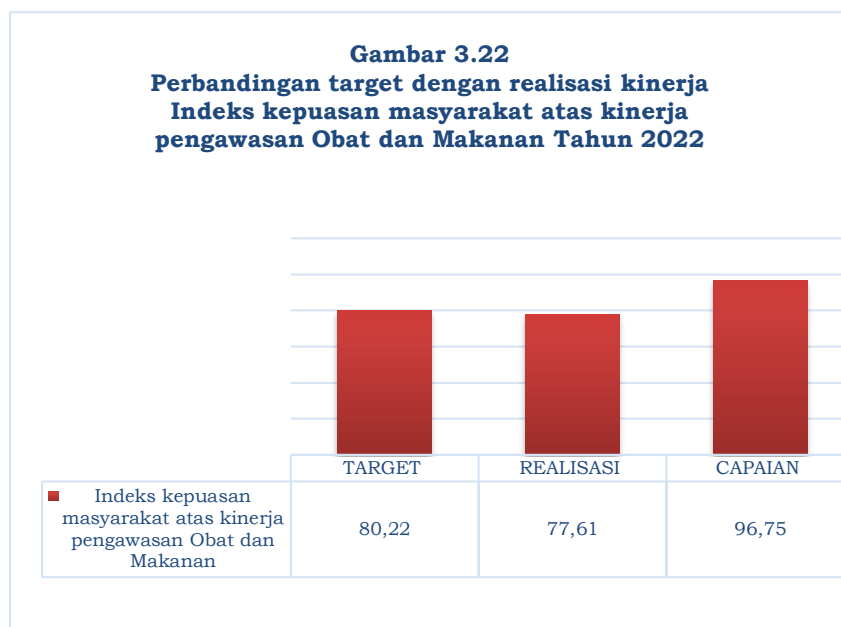
produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.37
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022

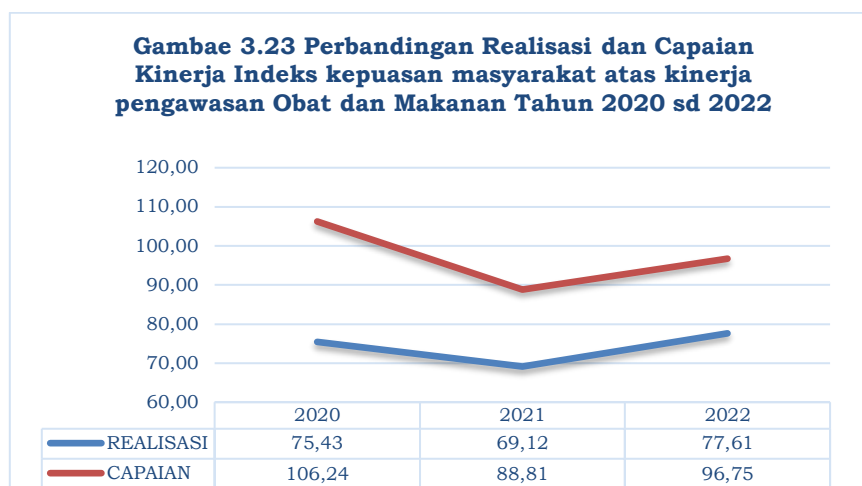
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22	77.61	96.75%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80.22, sedangkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar 77.61. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 96.75% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 2.1% dibandingkan tahun 2020 dan 8.49% dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan capaian ini disebabkan adanya berbagai kegiatan publikasi berbagai aktivitas BBPOM di Bandung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kegiatan KIE kepada masyarakat, sosialisasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi pengukuran indeks dan menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan untuk peningkatan kinerja.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

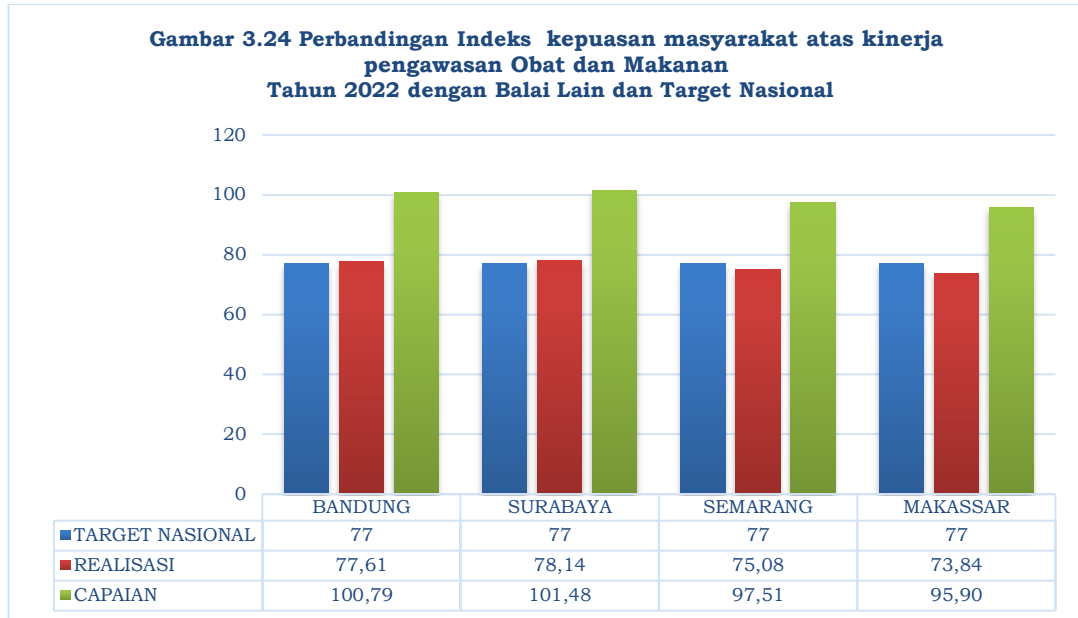
TABEL 3.38
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85.01	77.61	91.29%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kerjanya sebesar 91.29% dengan kriteria

Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif). Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 dengan target nasional (77.00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (101.48%), Balai Besar POM di Bandung (100.79%), Balai Besar POM di Semarang (97.51%) dan Balai Besar POM di Makassar (95.90%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

- Adanya isu cemaran EG/DEG pada kasus gagal ginjal akut yang terjadi skala nasional, berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM secara keseluruhannya. Meskipun Badan POM diseluruh UPT di lingkungan BPOM termasuk Balai Besar POM di Bandung telah melakukan tindaklanjut terkait isu tersebut al. dengan melakukan investigasi dan penelusuran terhadap obat yang digunakan oleh pasien Gagal Ginjal Akut. Kemudian dilakukan sampling dan pengujian sehingga didapatkan obat yang tidak memenuhi syarat. Dilanjutkan dengan penarikan obat yang tidak

memenuhi syarat dan terhadap Industri Farmasi dan pihak-pihak yang terkait dilakukan tindakan pro justicia. Seluruh obat-obat yang tidak aman diumumkan kepada masyarakat, selain obat-obat yang aman,

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PI.06.2.14.01.23.04 tanggal 02 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- ☛ Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Badan POM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas Badan POM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah Badan POM melindungi masyarakat.
- ☛ Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang lebih dipahami oleh masyarakat.
- ☛ Mendorong UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing-masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Badan POM dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi ilmu Kesehatan setempat pada program pengabdian masyarakat.
- ☛ Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
- ☛ Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- ☛ Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil dan rekomendasi pengukuran indeks.
- ☛ Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan di tahun mendatang.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.39
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
-----------	--------	-----------	-----------------	------	-----------	------------------	----	----	------------

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22	77.61	96.75	34,880,000	34,880,000	100.00	0.97	- 0.03	75 %
---	-------	-------	-------	------------	------------	--------	------	--------	------

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar -0.03 (75.00%) dengan kriteria kurang efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Karenanya Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kerjanya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

- 🏠 Kegiatan publikasi berbagai aktivitas balai Besar POM di Bandung kepada masyarakat melalui berbagai media massa, baik media elektronik dan media sosial.
- 🏠 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat dan kegiatan KIE lainnya.
- 🏠 Kegiatan penindakan Obat dan Makanan yang secara konsisten disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media massa, baik media elektronik dan media sosial.
- 🏠 Peningkatan layanan publik Balai Besar POM di Bandung dalam hal peningkatan sarana prasarananya juga termasuk berbagai inovasi terkait layanan public berbasis teknologi informasi.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.40
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan public relation dan publikasi liputan (media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diselenggarakannya berbagai kegiatan publikasi dan KIE sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui berbagai media. • Telah diselenggarakan kegiatan Penindakan dan penertiban terhadap produk 	-	-

Rekomendasi	Tindaklanjuti		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat	Obat dan Makanan yang TMS.		

3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

**TABEL 3.41
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM**

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan Surat Inspektorat Utama Badan POM Nomor B-PI.06.07.7.71.06.22.87 Tanggal 29 Juni 2022 perihal Permintaan Pemutakhiran Data Perkembangan

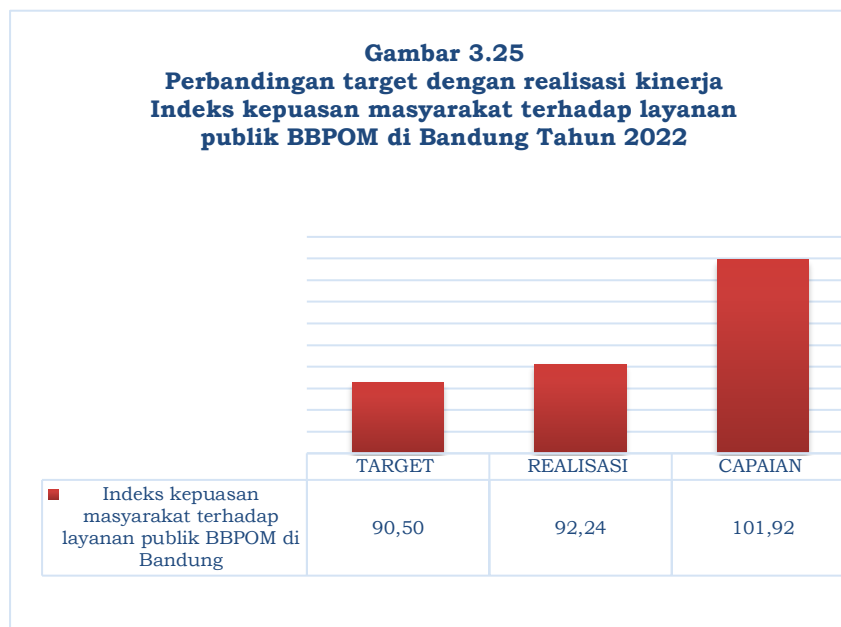
Tindaklanjut Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022, diperoleh Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Balai Besar POM di Bandung sebesar 92,24.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.42
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90.50	92.24	101.92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

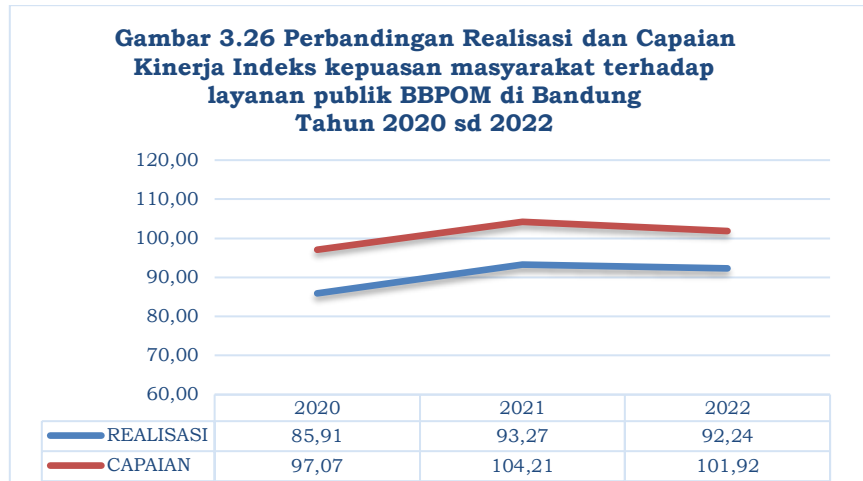
Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90.50, sedangkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung sebesar 92.24. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 96.75% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 6.33 dibandingkan tahun 2020 dan menurun sebesar 1.03 dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan capaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2021

disebabkan adanya isu EG/DEG yang terjadi di skala nasional sedikit banyak mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap layanan public BBPOM di Bandung.



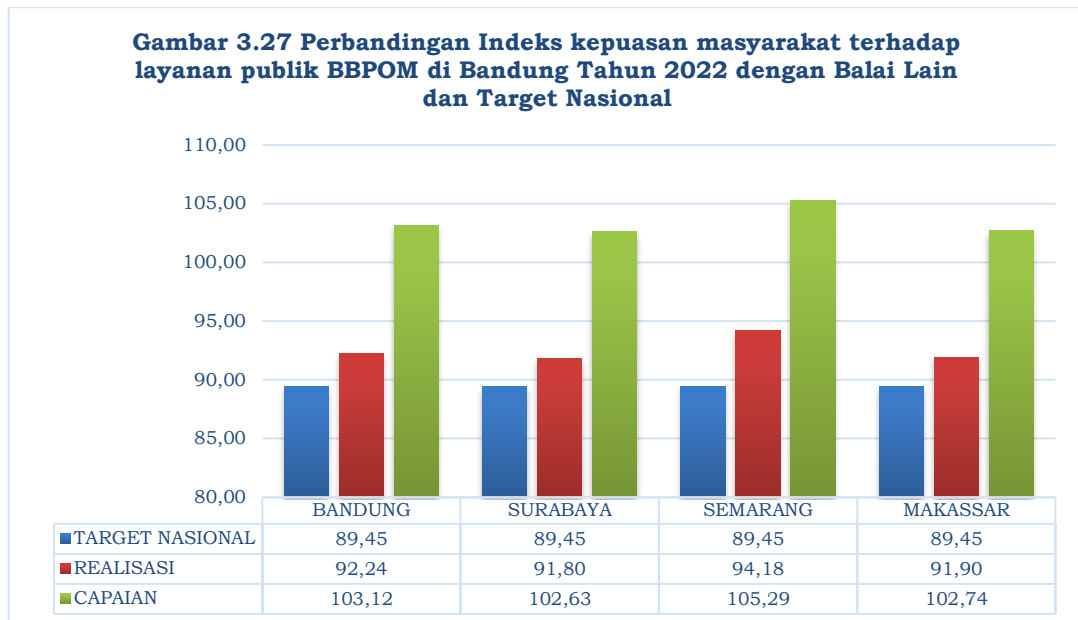
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.43
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK
BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	92.00	92.24	100.26%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 100.26% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Meskipun demikian perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 dengan target nasional (89.45), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (105.29%), Balai Besar POM di Bandung (103.12%), Balai Besar POM di Surabaya (102.63%) dan Balai Besar POM di Makassar (102.74%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Seluruh kegiatan pelayanan publik BBPOM di Bandung mengacu pada peraturan yang berlaku, selain itu dilakukan upaya peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik.
- ☛ Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik BBPOM di Bandung.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☛ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM melalui kegiatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM seperti Halo BPOM, website dan media sosial BPOM Pesan tema utama yang disampaikan adalah terkait sumber layanan informasi tentang keamanan Obat dan Makanan di BPOM.

- ☛ Meningkatkan Upaya komunikasi yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh BPOM, juga perlu disertai dengan pemberian informasi tentang dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat Sementara itu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM yang bisa diakses secara langsung, maka informasi tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM bagi masyarakat perlu dilakukan dengan lebih gencar dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang banyak diakses masyarakat setempat maupun melalui tokoh masyarakat.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.44
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	92.24	101.92	33,817,500	33,817,500	100.00	1.02	0.02	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar 0.02 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian Balai Besar POM di Bandung tetap perlu melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kerjanya.

I. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ☛ Focus Grup Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan settiap tahun.

- 🏠 Berbagai inovasi pelayanan publik.
- 🏠 Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik BBPOM di Bandung

J. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.45
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM”**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	Telah disusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
b Melaksanakan seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.	Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
c Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.	Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		

SASARAN KEGIATAN KE-4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 7 (tujuh) indikator yang seluruhnya Merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ketujuh indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **107.60%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabe 3.46.

**TABEL 3.46.
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	97.00%	97,71%	100,73%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
yang dilaksanakan.					
2. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	80,40%	113,24%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	100.00%	109.89%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	61,50%	100,82%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	80,59%	106,04%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.67	104.94%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00%	90.48%	117.51%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN	107.60%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF		

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

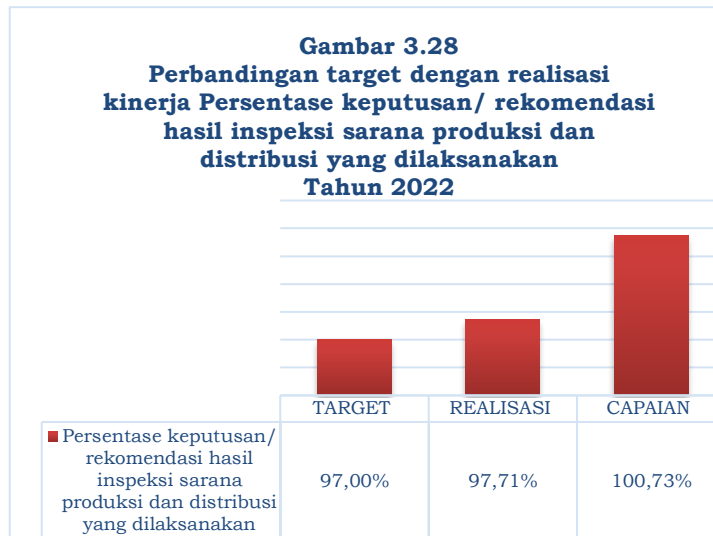
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT,

persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d tahun 2022.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.47
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97.00%	97,71%	100,73%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



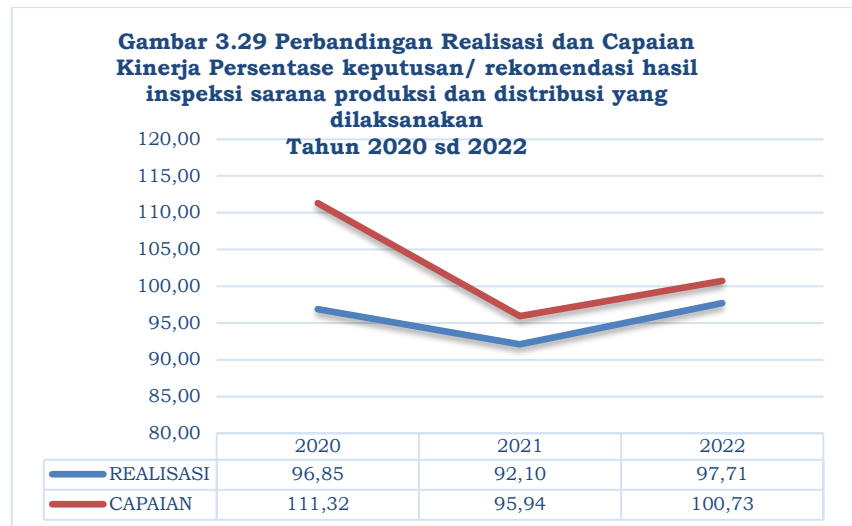
Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 97,00%, sedangkan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 97,71%, dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 90,85%; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **100,73%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

E. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh pada tahun 2022 telah dilakukan

monitoring dan evaluasi pelaporan SIPT, rekomendasi yang diterima dari Badan POM, pengaduan atau permintaan dari lintas sektor dan stakeholder pada setiap bulan secara efektif.



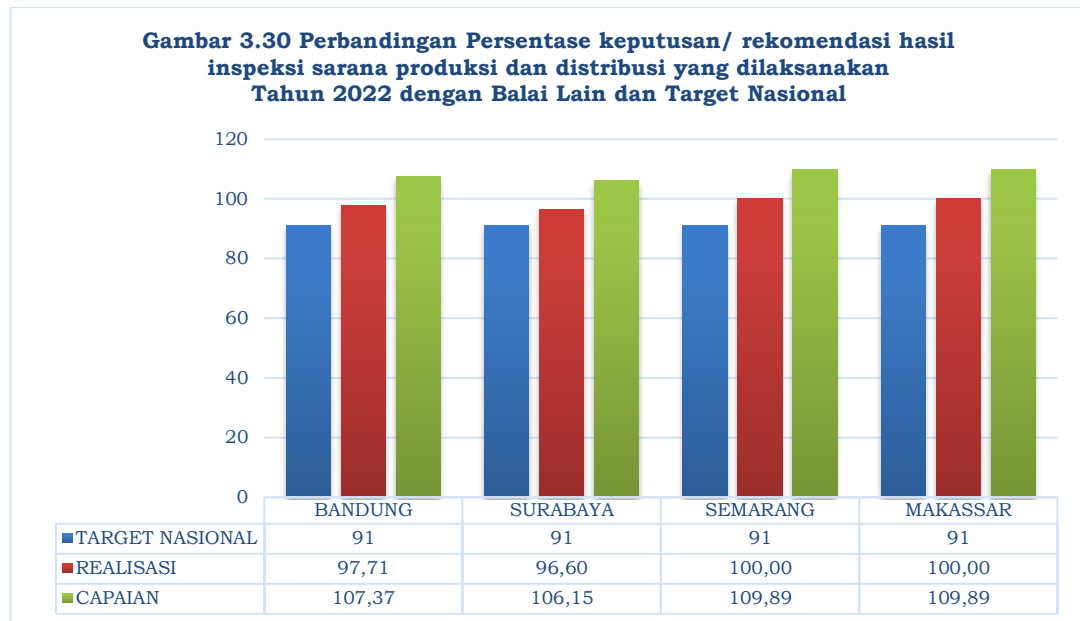
F. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.48
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN / REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	99.00%	97.71%	98,70%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 98.70% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

G. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan target nasional (91.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (109.89%), Balai Besar POM di Semarang (109.89%), Balai Besar POM di Bandung (107.37%) dan Balai Besar POM di Surabaya (106.15%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- 🏠 Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan sudah dilaksanakan secara efektif.
- 🏠 Koordinasi internal dan eksternal lebih intens.
- 🏠 Pengumpulan dan pengolahan data sudah dilakukan secara sistematis.
- 🏠 Rekonsiliasi data oleh Petugas setiap awal bulan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☛ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.49
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE KEPUTUSAN / REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.00	97.71	100.73	43,861,000	43,510,300	99.20	1.02	0.02	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.02 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menyebabkan peningkatan pencapaian kinerja:

- ☛ PIC SIPT melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data yang diinput ke dalam SIPT agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- ☛ Setiap PIC melakukan pemantauan tindak lanjut dari pusat berdasarkan hasil inspeksi yang dikirimkan.
- ☛ Setiap PIC melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap permintaan/pengaduan dari pemangku kepentingan terkait secara berkala.
- ☛ Setiap PIC melakukan rekonsiliasi data setiap awal bulan.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.50
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 20222. Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema Penggalan Informasi Empiris bahan alam berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 20223. Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tanggal 15 Desember 2022.4. Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022.5. Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan tanggal 21 November 2022	Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) lebih ditingkatkan	2024
b Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi secara berkala setiap bulan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi secara berkala lebih ditingkatkan	2024

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

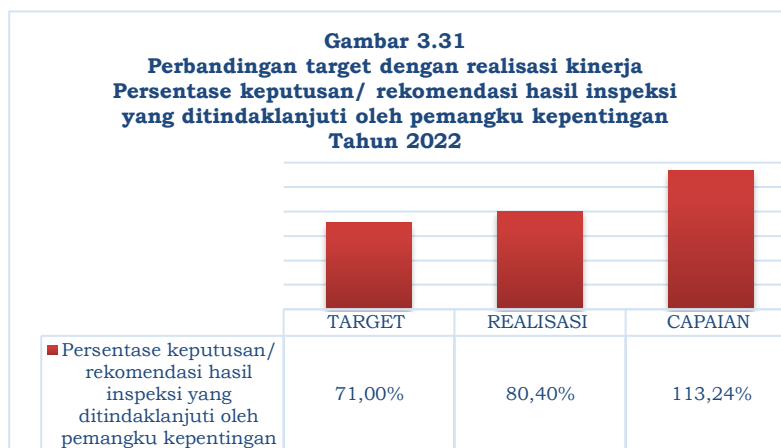
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan

persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.51
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	80.40%	113.24%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

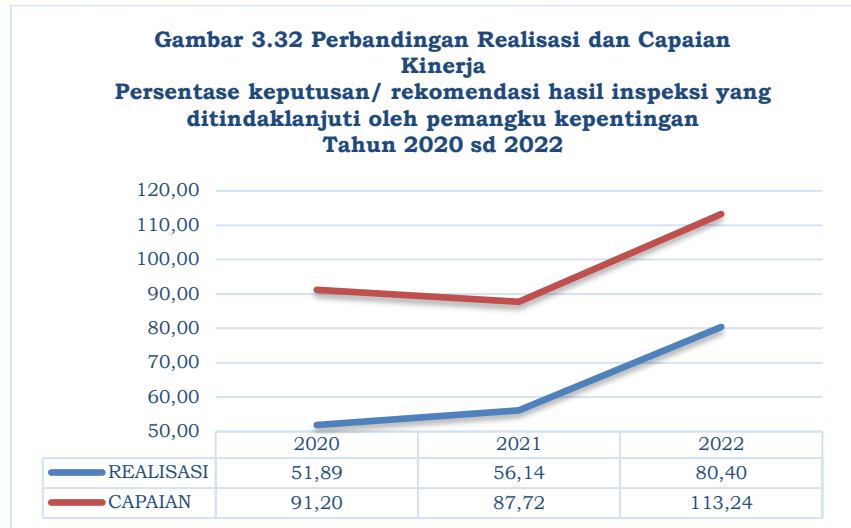


Pada tahun 2022, target yang ditetapkan adalah sebesar 71,00%, dengan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh

pemangku kepentingan sebesar 80,40%. Rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 67,05% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 93,75%. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar **113,24%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan desk CAPA terhadap sarana produksi maupun sarana distribusi sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 26 Agustus 2022, 26 Oktober 2022 dan 21 November 2022.



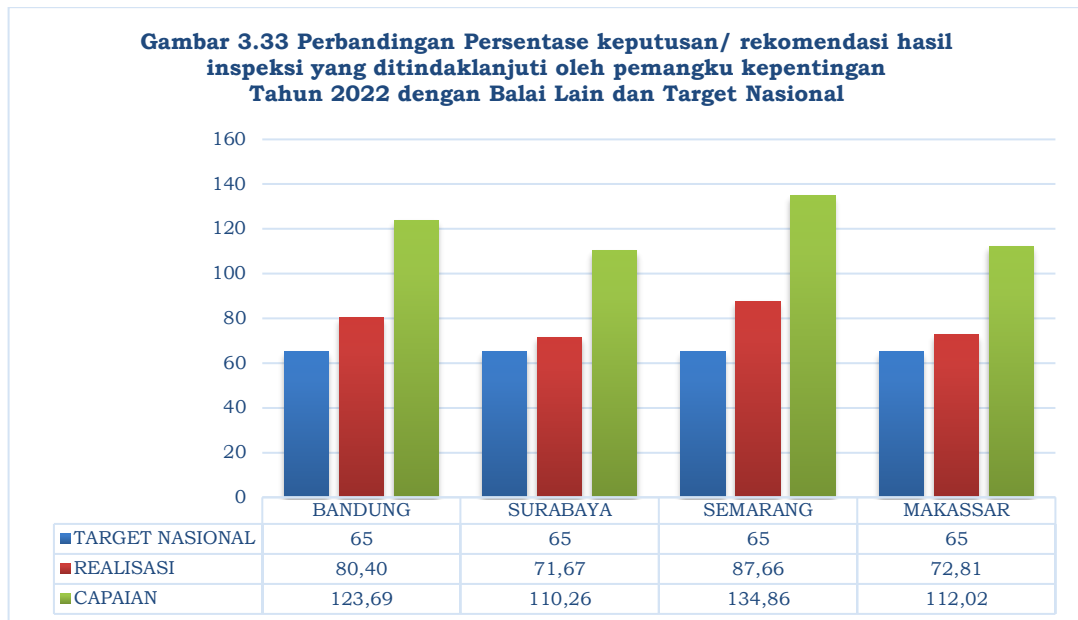
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.52
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85.00%	80.40%	94.59%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 94.59% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 dengan target nasional (65.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (134.86%), Balai Besar POM di Bandung (123.69%), Balai Besar POM di Makassar (112.02%) dan Balai Besar POM di Surabaya (110.26%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022 disebabkan antara lain:

- 🏠 Respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat karena dilaksanakannya kegiatan Desk CAPA.
- 🏠 Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan sudah efektif.
- 🏠 Pengumpulan dan pengolahan data sudah difasilitasi oleh Aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP), namun masih perlu disempurnakan kembali.
- 🏠 Rekonsiliasi data oleh Petugas setiap awal bulan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☛ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- ☛ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.
- ☛ Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung
- ☛ Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.53
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00	80.40	113.24	304,351,000	301,337,150	99.01	1.14	0.14	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.14 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ☛ Frekuensi pemantauan tindak lanjut dari pemangku kepentingan dilakukan sebulan sekali dengan konsisten

- ☪ Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan tanggal 21 November 2022
- ☪ Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022
- ☪ Desk Teknis Penilaian Mandiri *Post Market* PIRT tanggal 3-4 Oktober 2022
- ☪ Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 2022
- ☪ Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema Penggalan Informasi Empiris bahan alam berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 2022
- ☪ Dilakukan monitoring CAPA dan bimtek cara pembuatan CAPA untuk Importir Kosmetik dan BUPN pada tanggal 28 Oktober 2022



Bimtek SMKPO & Desk CAPA 20 Oktober



Desk PIRT 3-4 Oktober



Bimtek CPPOB & Desk CAPA 21 November 2022



FGD Psikotropika 14 Desember 2022



Bimtek importir & BUPN 28 oktober 2022



Sarasehan Pangan & OT 13 Desember

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.54
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha	Melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi sanksi administrasi. Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada importir dan BUPN Kosmetik sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022	Pembinaan pada pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi sanksi administrasi lebih ditingkatkan	2024
b Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala	Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala lebih ditingkatkan	2024
c Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.	Melakukan pertemuan dengan lintas sektor terkait untuk menyampaikan dan mengevaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Pertemuan dalam bentuk FGD terkait penyalahgunaan Psikotropika dengan organisasi profesi dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022	Pertemuan dengan lintas sektor terkait penyampaian dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih efektif	2024
d Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan	Pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan lebih ditingkatkan	2024

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
e Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha	Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha	Evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha lebih ditingkatkan	2024

3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

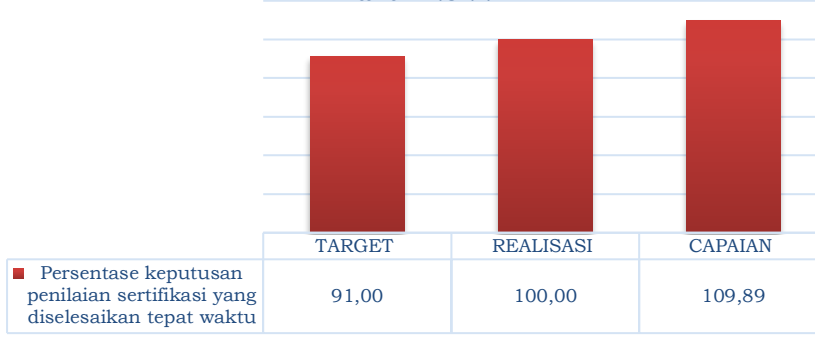
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Rekomendasi/keputusan/Izin penerapan CPPOB pendaftaran produk pangan pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Rekomendasi Importir Kosmetik/Badan Usaha Pemberi Kontrak Kosmetik sebagai Pemohon Notifikasi; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; (8). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan (9) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.55
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	100.00%	109.89%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Gambar 3.34
Perbandingan target dengan realisasi kinerja
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang
diselesaikan tepat waktu
Tahun 2022



Pada tahun 2022, target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 91.00%, sedangkan realisasi

sebesar 100.00%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 1916 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 1916 permohonan. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 109.89% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

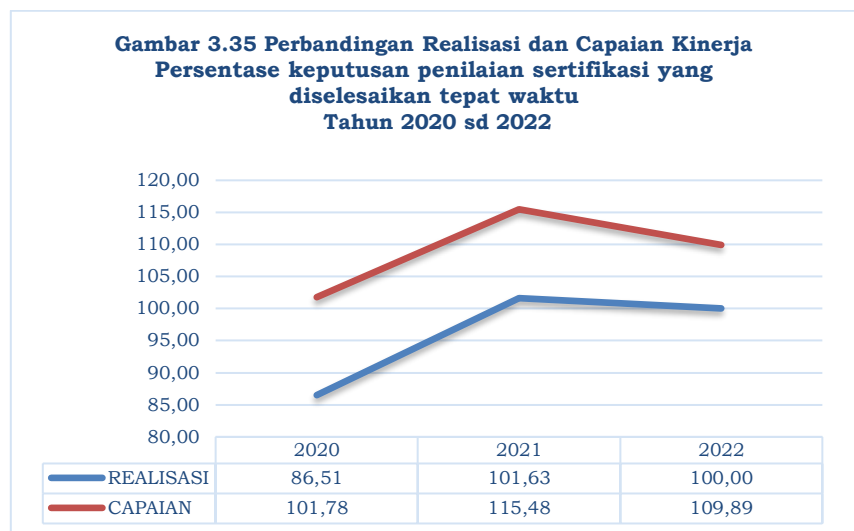
TABEL 3.56
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
TAHUN 2022

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah permohonan	% Sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0
2	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Rekomendasi /Surat Keterangan	1234	1234	100%
3	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	682	682	100%
TOTAL			1916	1916	100%

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 2066 sertifikat, sedangkan permohonan yang masuk

sebanyak 2024 permohonan (117,25%), sedangkan tahun 2022 permohonan yang masuk sebanyak 1916 permohonan, sertifikat yang diterbitkan tepat waktu 1916 sertifikat (100%). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan yang terjadi, karena adanya penurunan dari jumlah permohonan yang masuk, terutama dari permohonan SKE, (tahun 2021 : 1537, tahun 2022 : 858). Selain itu adanya perubahan proses sertifikasi pangan olahan berdasarkan skala usaha. Usaha mikro kecil hanya berdasarkan evaluasi dokumen, sedangkan usaha menengah dan besar, setelah evaluasi dokumen dilanjutkan dengan proses pemeriksaan sarana. Hal ini menyebabkan adanya tambahan waktu untuk evaluasi dokumen yang diajukan. Namun demikian, timeline penerbitan sertifikat masih sesuai dengan standar yang ditetapkan.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

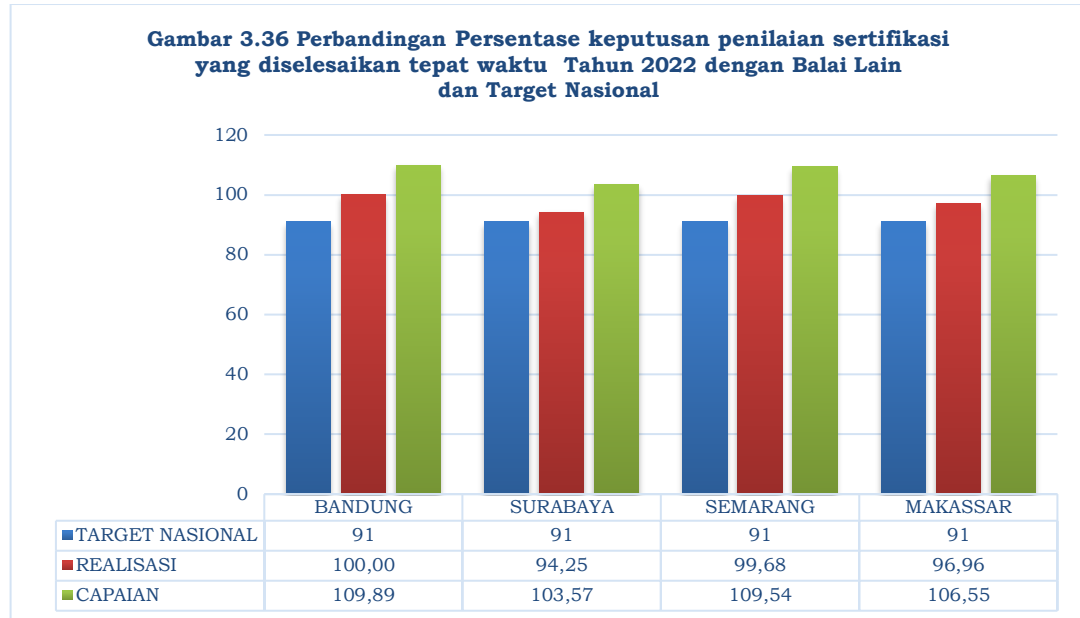
**TABEL 3.57
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100.00%	103.09%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 103.09% dengan

kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dengan target nasional (91.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (109.89%), Balai Besar POM di Semarang (109.54%), Balai Besar POM di Makassar (106.55%) dan Balai Besar POM di Surabaya (103.57%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja dikarenakan adanya hal berikut:

- 🏠 Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Import (API).
- 🏠 Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di

Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual, di tahun 2022 ini beralih ke sistem elektronik yang berlaku untuk semua komoditi baik obat tradisional, kosmetik maupun pangan.

- Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika. Terkait pelaksanaannya, permohonan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik ini berubah dari manual ke sistem elektronik melalui PB-UMKU di sistem/aplikasi OSS.
- Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB. Dalam hal pengajuan permohonannya pun kini berubah dari yang sebelumnya diajukan langsung di e-sertifikasi. Saat ini pendaftaran masuk melalui PB-UMKU di sistem/aplikasi OSS yang selanjutnya akan terhubung ke sistem/aplikasi e-e-sertifikasi.
- Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi izin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan POM No. 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maka terdapat perubahan mekanisme dalam rangka pendaftaran pangan, yang sebelumnya pengajuan permohonan rekomendasi PSB melalui email ke UPT menjadi permohonan izin. Berdasarkan peraturan ini, rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan secara online dibagi berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko dari produk yang akan didaftarkan. Pemeriksaan sarana yang sebelumnya merupakan syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mendapatkan rekomendasi, saat ini hal tersebut sudah tidak diberlakukan. Sesuai dengan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021, pemeriksaan sarana yang dilakukan di awal, hanya berlaku untuk perusahaan dengan skala menengah dan besar, sedangkan untuk perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil maka penilaian dilakukan melalui evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 1 (satu) tahun setelah terbit izin

penerapan CPPOB. Hal tersebut dapat mempercepat terbitnya sertifikat Ijin Penerapan CPPOB untuk pelaku usaha Mikro Kecil.

- 🏠 Dalam hal penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Ekspor, capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan, karena didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 🏠 Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
 - 🏠 Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
 - 🏠 Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
 - 🏠 Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- 🏠 Kompetensi SDM terus ditingkatkan, terutama personel baru, sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pendampingan oleh personel senior, pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- 🏠 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- 🏠 Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- 🏠 Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.58
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00	100.00	109.89	810,165,000	808,922,495	99.85	1.10	0.10	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja sebesar 0.10 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☛ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ☛ Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan merupakan kegiatan yang ditujukan bagi pelaku usaha pangan yang sedang berproses dalam permohonan Izin Penerapan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id. Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA secara rutin sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat.



Gambar 3.37 Kegiatan Desk CAPA

- Pada tanggal 25-26 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA merupakan kelanjutan dari kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Januari 2022. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator.



Gambar 3.38 Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA

- Pada tanggal 15-16 Maret 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang diikuti oleh 48 pelaku usaha yang telah diaudit PSB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 18 nomor izin edar (NIE) dan 10 akun perusahaan.



Gambar 3.39 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Pada tanggal 19-20 April 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang diselenggarakan secara luring untuk 5 UMKM obat tradisional dan 5 UMKM kosmetik. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.



Gambar 3.40 Pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM OT dan Kosmetik

- Pada tanggal 18-19 Mei 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara luring untuk 25 UMKM pangan olahan. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.



Gambar 3.41 Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM Pangan Olahan

- 🏠 Pada tanggal 2 Juni 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan Bimbingan Teknis Booster UMKM Juara yang merupakan tahap awal dari rangkaian Program Booster UMKM Juara yang merupakan kolaborasi BBPOM di Bandung dengan Pemda Propinsi Jawa Barat yaitu dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat.



Gambar 3.42 Bimtek Booster UMKM Juara

- 🏠 Pada tanggal 5 Agustus 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi Program Booster UMKM Juara secara daring. Pada kegiatan ini para UMK binaan diberikan materi terkait dokumen panduan mutu yang diperlukan dalam pemenuhan Cara Produk Pangan Olahan Yang Baik dan dijelaskan pula bagaimana cara penyusunan dokumen mutu tersebut.



Gambar 3.43 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- 🏠 Pada tanggal 5 Agustus 2022 diadakan kegiatan Desk CAPA bagi para pelaku usaha yang sedang berproses untuk mendapatkan Izin Penerapan CPPOB.



Gambar 3.44 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

➤ Pada tanggal 25-26 November 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Booster UMKM Juara yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2022. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 21 nomor izin edar (NIE) dan 17 akun perusahaan.



Gambar 3.45 Kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

➤ Pada tanggal 8-9 Desember 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan Batch terakhir di tahun 2022 yang diikuti oleh 20 pelaku usaha yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 15 nomor izin edar (NIE) dan 16 akun perusahaan.



Gambar 3.46 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

👤 Pendampingan/fasilitasi registrasi melalui online dengan fasilitator/petugas sertifikasi.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.59
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”**

Rekomendasi	Tindaklanjut
	Selesai
a Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses secara online atau onsite sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian CAPA
b Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Membuat tools untuk memudahkan monitoring dan evaluasi CAPA sehingga pemantauan evaluasi CAPA oleh petugas menjadi lebih terkendali
c Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun	Monitoring dan evaluasi terus dilaksanakan sehingga dapat mengidentifikasi kendala dan permasalahan lebih dini.

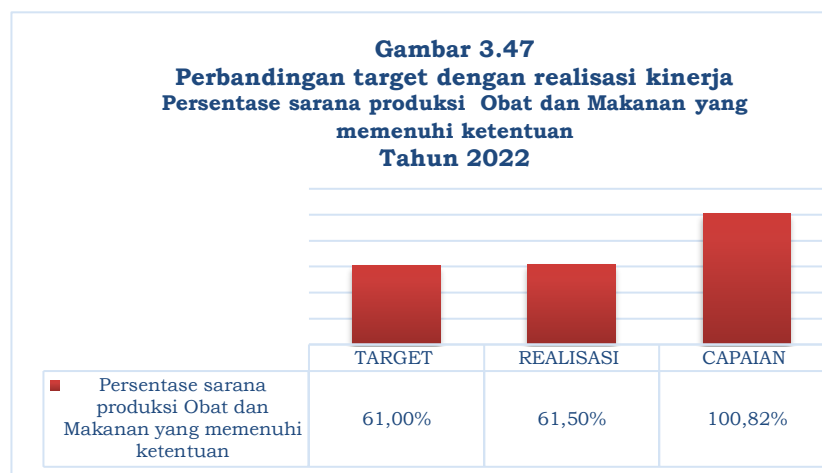
4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun 2022.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.60
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	61.50%	100,82%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

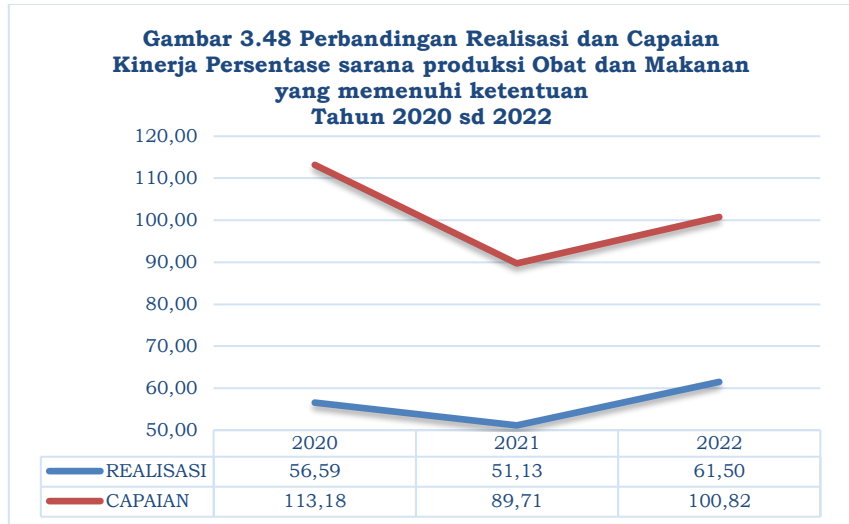


Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 61.00%. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022

sebesar 61,50%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **100,82%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 254 sarana dari target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa (413 sarana).

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan pengetahuan pelaku usaha terkait GMP (Cara Produksi yang baik) meningkat karena dilaksanakannya bimtek tersebut.



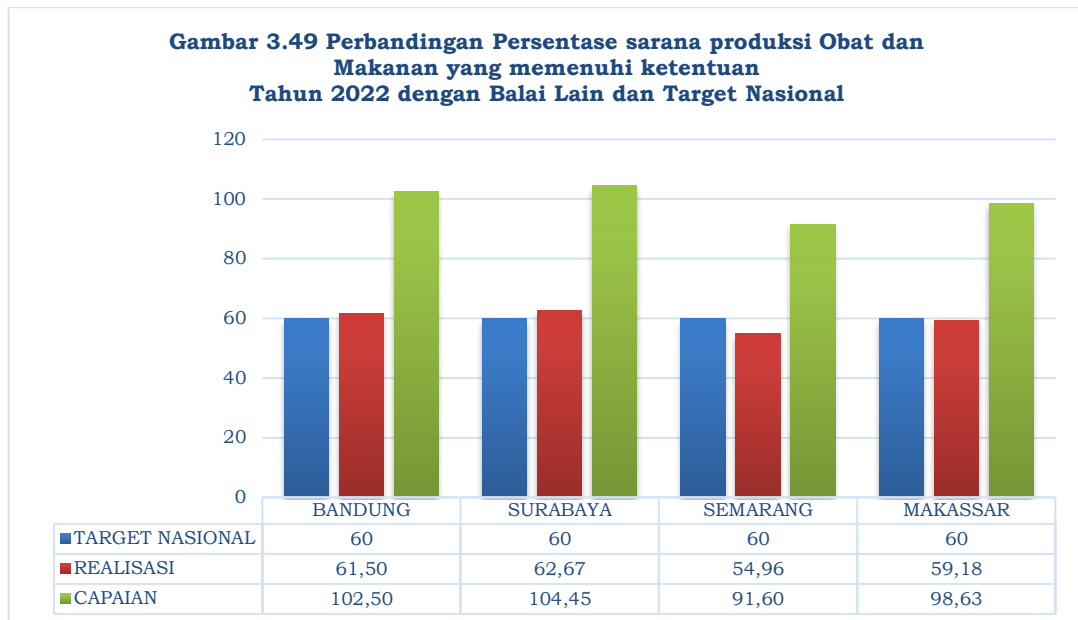
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.61
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00%	61.50%	87.86%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 87.86% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 dengan target nasional (61.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (104.45%), Balai Besar POM di Bandung (102.50%), Balai Besar POM di Makassar (98.63%) dan Balai Besar POM di Semarang (91.60%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kebahagiaan capaian kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi obat dan makanan cukup memadai.
- ☛ Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan
- ☛ Intervensi untuk memperkecil GAP pengetahuan terkait GMP optimal dilaksanakan
- ☛ Pelaksanaan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi cukup memadai.
- ☛ Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan,
- ☛ Mengadakan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☛ Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB.
- ☛ Sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GMP.
- ☛ Pembinaan terkait pembuatan CAPA untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana.
- ☛ Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring hasil Pemeriksaan (DMP) untuk monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.62
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00	61.50	100.82	772,073,000	770,928,764	99.85	1.01	0.01	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja al:

- ☛ Membuat perencanaan prioritas pemeriksaan sarana produksi berdasarkan analisis resiko.
- ☛ Membuat perencanaan jadwal dinas pemeriksaan sarana secara bulanan.
- ☛ Melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana setiap minggu melalui google drive koordinasi jadwal dinas.
- ☛ Melaksanakan kegiatan Bimtek CPPOB dan Desk CAPA pada tanggal 21 November 2022

- ☛ Dilakukan FGD Sarasehan bersama lintas sektor dengan tema fasilitasi UMKM Juara dan Penggalan Informasi Empiris bahan alam berdasarkan Kearifan Lokal tanggal 13 Desember 2022



Bimtek CPPOB & Desk CAPA 21 November 2022



Sarasehan Pangan & OT 13 Desember 2022

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.63
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPOB, CPPOB, CPOTB dan CPKB.	Mengikuti Pelatihan, Bimtek, workshop yang diadakan oleh pusat, UPT lain atau diseminasi internal untuk peningkatan kompetensi petugas.	Pelatihan, Bimtek, workshop yang diadakan oleh pusat, UPT lain atau diseminasi internal untuk peningkatan kompetensi petugas lebih ditingkatkan	2024

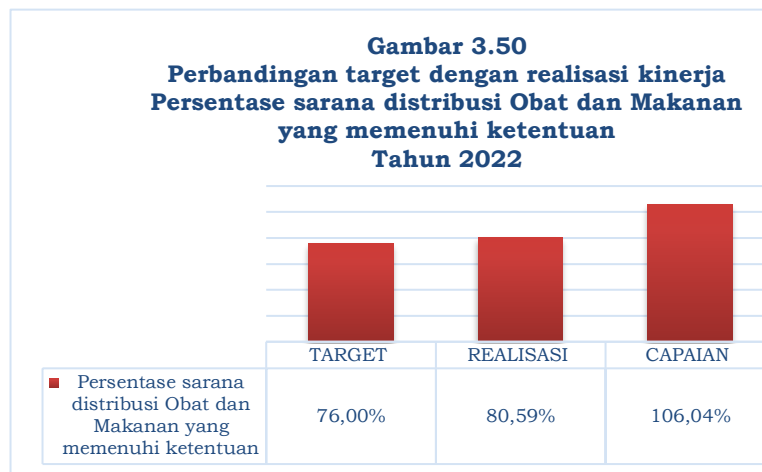
5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun 2022.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.64
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	80.59%	106.04%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

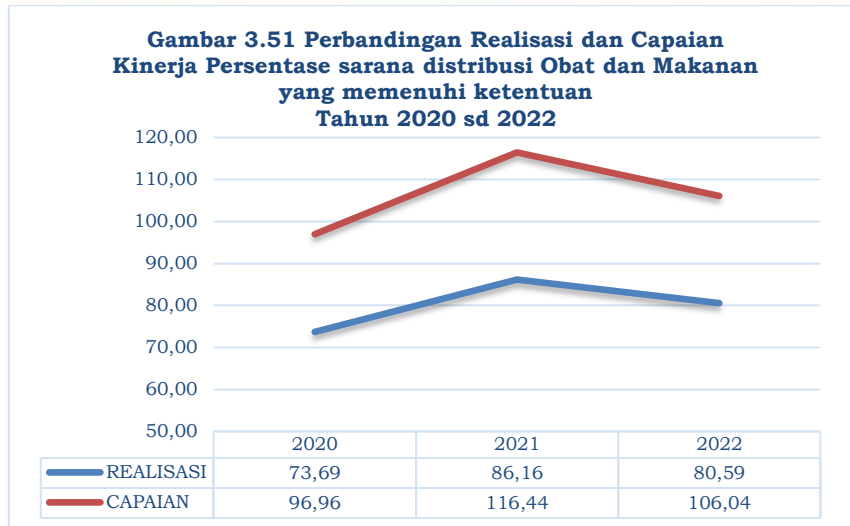


Target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 76,00%. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 80,59%. Dengan demikian persentase

capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **106,04%** dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi (Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 1.258 sarana dari target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa (1.561 sarana).

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan oleh perubahan tools inspeksi distribusi pada sarana peredaran pangan olahan yang mana penilaiannya lebih komprehensif.



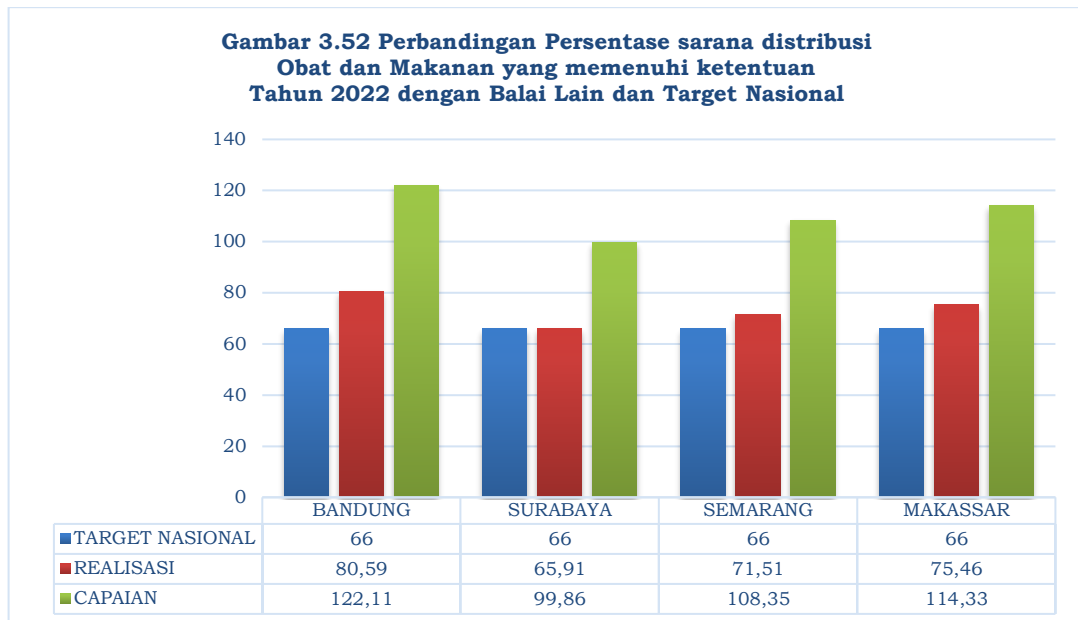
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.65
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80.00%	80.59%	100.73%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 100.73% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah dapat terlampaui, namun perlu dilakukan upaya-upaya dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk periode berikutnya agar tidak terjadi penurunan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 dengan target nasional (66.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (122.11%), Balai Besar POM di Makassar (114.33%), Balai Besar POM di Semarang (108.35%) dan Balai Besar POM di Surabaya (99.86%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan capaian kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Pemenuhan kepatuhan GDP sarana distribusi obat dan makanan sudah memadai.
- ☛ Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana sesuai perencanaan.
- ☛ Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi sudah memadai. Pada tanggal 28 Oktober 2022 dilaksanakan bimtek pengawasan untuk Importir Kosmetik dan BUPN beserta cara pembuatan CAPA nya.
- ☛ Peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan antara lain diseminasi SMKPO tanggal 22 Februari 2022; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi AMR tanggal 31 Maret 2022; Forkom pengawasan distribusi pelayanan kefarmasian 23-25 Februari 2022; Pengawasan SAS obat tanggal 10 Maret 2022.

- Adanya kegiatan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada tanggal 26 Agustus 2022 untuk sarana puskesmas; tanggal 20 Oktober 2022 untuk sarana distribusi pangan olahan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.
- Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CDOB, SMKPO dan BUPN/Importir kosmetik.
- Sosialisasi, bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP.
- Menyempurnakan aplikasi Digital Monitoring hasil Pemeriksaan (DMP) untuk monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.66
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00	80.59	106.04	1,065,647,000	1,064,909,986	99.93	1.06	0.06	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan

sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Membuat perencanaan prioritas pemeriksaan sarana produksi berdasarkan analisis resiko.
- Membuat perencanaan jadwal dinas pemeriksaan sarana secara bulanan.
- Melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana setiap minggu melalui google drive koordinasi jadwal dinas.
- Mengadakan bimtek dan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
- Kegiatan Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Sangkuriang) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi (SMKPO) tanggal 20 Oktober 2022.
- Dilakukan FGD Upaya Pengendalian Peredaran Psikotropika di Jawa Barat Tanggal 14 Desember 2022.
- Koordinasi dengan pusat dan lintas sektor berupa Kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Anti Microbial Resistance (AMR) tanggal 31 Maret 2022.



Bimtek SMKPO & Desk CAPA 20 Oktober 2022



FGD Psikotropika 14 Desember 2022



Kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Anti Microbial Resistance (AMR)

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.67
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	Pembinaan kepada pelaku usaha ditribusi pangan berupa bimbingan teknis SMKPO dan CPerPOB dan bimbingan teknis untuk importir dan BUPN Kosmetik dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022	Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha sarana distribusi lebih ditingkatkan	2024
b Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Melaksanakan bimtek dan desk CAPA untuk sarana distribusi pangan dan kosmetik pada bulan Oktober dan untuk sarana produksi pangan pada tanggal 21 November 2022	Monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) untuk sarana distribusi lebih ditingkatkan	2024
c Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.	Monitoring dan evaluasi penyampaian CAPA yang disampaikan melalui email corporate dan email tertentu secara berkala		
d Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi	Koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi dan asosiasi	Koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan,	2024

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.	berupa FGD terkait penyalahgunaan Psikotropika di apotek dan PBF dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022	Organisasi Profesi dan asosiasi lebih ditingkatkan	

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Dengan Kategori nilai sebagai berikut:

TABEL 3.68
KATEGORI PENILAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C -	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B -	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A -	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.69
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
““INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.67	104.94%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 4.45. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung pada tahun 2022 sebesar 4.67. Dengan demikian persentase capaian

target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104.94%** dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi (Efektif)**.

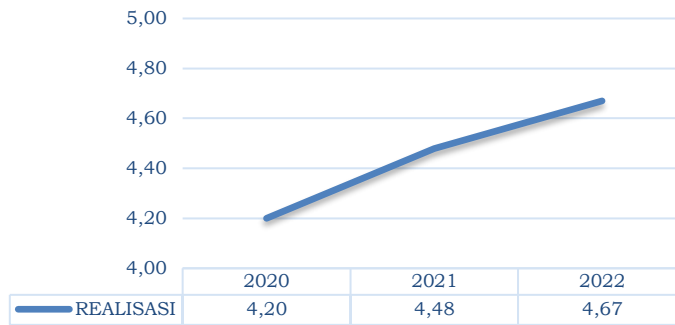
GAMBAR 3.54
PIAGAM PENGHARGAAN
UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022



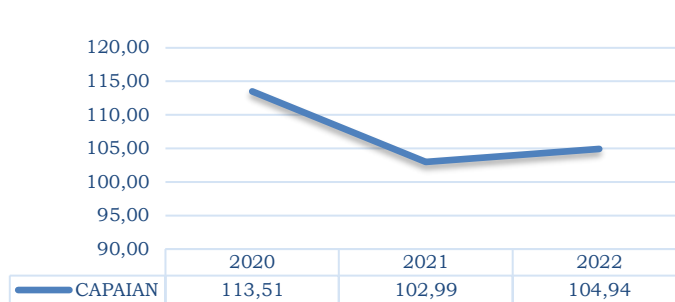
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh pemenuhan data dukung yang disampaikan dan telah menetapkan kebijakan publik internal sesuai dengan 14 komponen Standar Pelayanan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.

Gambar 3.55 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung Tahun 2020 sd 2022



Gambar 3.56 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung Tahun 2020 sd 2022



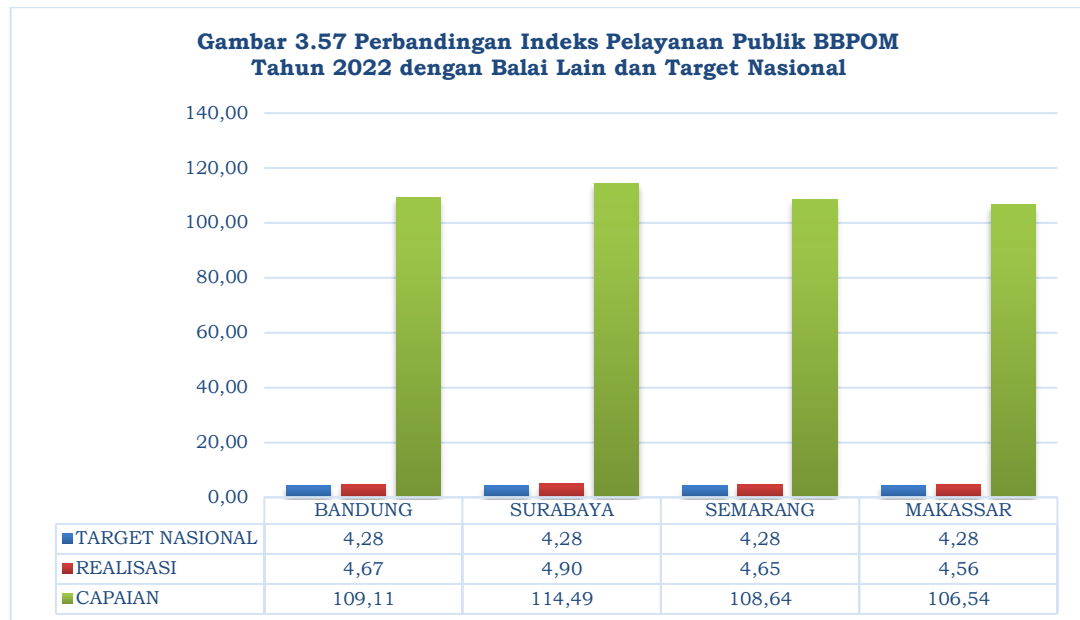
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.70
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.55	4.67	102.63%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 102.63% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah dapat terlampaui, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja untuk periode berikutnya agar tidak terjadi penurunan. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap target Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 dengan target nasional (4.28), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (114.49%), Balai Besar POM di Bandung (109.11%), Balai Besar POM di Semarang (108.64%) dan Balai Besar POM di Makassar (106.54%).

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan capaian kinerja disebabkan antara lain:

- 🏠 Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik. Ruang pelayanan publik telah terintegrasi satu pintu untuk seluruh layanan yang terdiri dari; (1) Layanan Informasi; (2) Layanan Pengujian; (3) Layanan Pengaduan; dan (4) Layanan Sertifikasi. Selain itu, ruang tunggu dilengkapi dengan free coffee, akses wifi gratis, kantin kejujuran, kotak saran, media cetak/media siar (TV), area bermain anak, ruang ibu menyusui dan berbagai akomodasi untuk penyandang disabilitas.
- 🏠 Adanya maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat antara lain: melalui aplikasi SIPETA (Sistem Informasi Pelayanan Tamu) yang dapat diakses oleh seluruh tamu BBPOM di Bandung dan spanduk di depan kantor BBPOM

di Bandung dan penerapannya dilakukan secara konsisten serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- 🏠 Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BBPOM di Bandung antara lain : (1) layanan permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai (PSB) melalui : bit.ly/psbbandung; (2) layanan pengaduan dan informasi melalui program “KABAYAN” (Kepala Balai Melayani); (3) Aplikasi “LACAK” untuk layanan pengujian pihak ketiga; (4) formulir pengaduan melalui aplikasi SIPETA; (5) Program “KELOM GEULIS” (Kenalan Dengan BBPOM di Bandung Berbagi Edukasi Dan Layanan Informasi, Sae Pisan) melalui IG Live dan IG Radio. Seluruh inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandung telah disosialisasikan melalui media sosial dan WAG Mal Pelayanan Publik Kota Bandung.
- 🏠 BBPOM di Bandung menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain: Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB Pada UMKM, Audit PSB, penerbitan SKE 1 HK (SLA 2 HK) serta pengujian Pihak Ke3 sesuai timeline yang ditetapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2022 antara lain:

- 🏠 Kebijakan Pelayanan
 - a) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik agar mengacu pada PermenPANRB No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan FKP
 - b) Pelaksanaan FKP agar mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: (a) tokoh masyarakat; (b) akademisi; (c) dunia usaha; (d) LSM serta melibatkan media massa yang diharapkan juga menjadi corong dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
 - c) Berita Acara FKP agar ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur masyarakat yang hadir
 - d) Memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
 - e) Pada publikasi Standar Pelayanan memuat minimal 6 komponen service delivery pada seluruh media publikasi baik non elektronik dan elektronik.
 - f) Penetapan maklumat pelayanan diperbaharui dengan menyesuaikan narasi berupa janji instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - g) Pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan.
 - h) Agar menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SKM.
- 🏠 Profesionalisme SDM

- a) Peningkatan kompetensi menyesuaikan kebutuhan petugas pelayanan yang disertai data dukung berupa informasi mengenai kompetensi SDM, posisi penugasan, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan sertifikat.
- b) Waktu pelayanan publik pada standar pelayanan agar tercantum secara jelas, minimal sama dengan jam kerja dan termasuk mengatur terkait jadwal pelayanan ekstra.
- c) Perlu menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik. Bagi UPP yang memiliki gap kompetensi, agar menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagi petugas layanan publik.

🏠 Sarana Prasarana

- a) Pada umumnya UPP di lingkungan BPOM telah memiliki CCTV namun agar disertai dengan pemeriksaan karcis untuk memberi rasa aman pada pengguna layanan.
- b) Jika memiliki lokasi yang cukup dapat dilakukan penambahan toilet duduk/jongkok untuk pengguna layanan.
- c) Apabila memungkinkan, sarana font office untuk layanan konsultasi dan pengaduan berada pada ruangan khusus yang mudah diakses pengguna layanan.
- d) Tersedia sarana prasarana berkebutuhan khusus yang mendukung dalam pemberian layanan bagi kelompok rentan seperti petugas khusus, kursi roda, toilet khusus disabilitas, SP huruf braille dan lain sebagainya.

🏠 Sistem Informasi Pelayanan Publik

- a) Agar melengkapi unsur unsur sistem informasi (unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga) pada subsite UPP BPOM.
- b) Untuk keamanan data elektronik, seluruh UPP agar menggunakan subsite yang telah disediakan Pusdatin dengan domain pom.go.id.
- c) Penyebarluasan informasi secara elektronik sangat baik namun agar tidak melupakan penyebaran informasi non elektronik agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT.
- d) Mendorong UPP pro aktif mewujudkan dan berpartisipasi dalam Mall Pelayanan Publik di daerah.
- e) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.

🏠 Konsultasi dan Pengaduan

- a) UPP diharapkan mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan baik secara fisik maupun elektronik, dan secara berkala agar mempublikasikan

hasil layanan konsultasi dan pengaduan baik secara elektronik maupun fisik dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan informasi melalui media sosial dan FAQ pada subsite UPP,

- b) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.
- c) Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.

🏠 Inovasi

- a) Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi.
- b) Dalam pelaksanaan replikasi, UPP mendokumentasikan setiap inovasi yang telah direplikasi oleh organisasi pelayanan publik lain.
- c) Inovasi pelayanan publik agar diikutsertakan dalam KIPP.

G. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.71
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di BAndung	4.45	4.67	104.94	53,613,500	53,328,720	99.47	1.06	0.06	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja sebesar 0.06 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan terus melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan capaian kinejanya

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- 🏠 Membuat standar pelayanan publik yang lebih berdampak pada masyarakat maupun pelaku usaha, mensosialisasikannya dan melaksanakannya secara konsisten.

- ☛ Petugas pelayanan publik diberikan pelatihan terkait peningkatan teknis maupun sosio kultural sehingga semakin meningkat kompetensi dan pemahaman tentang pembangunan budaya kerja yang baik dan berdaya saing.
- ☛ Sarana prasarana yang lebih ditingkatkan lagi yaitu terkait akses pemberian informasi yang lebih mudah, cepat dan terjangkau sebagai contoh pengadaan call centre.
- ☛ Sistem informasi yang diberikan pada masyarakat lebih beragam baik melalui media cetak maupun elektronik. Penyebaran bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik melalui media cetak maupun elektronik lebih intensif.
- ☛ Pemberdayaan system informasi yang sudah ada seperti subsite Balai dibuat lebih informatif dan komunikatif. Sarana konsultasi dan pengaduan disamping diselenggarakan secara langsung juga dilakukan secara online/ daring dan diinformasikan kepada masyarakat secara lebih intensif.
- ☛ Kotak saran selain langsung juga bisa disampaikan secara digital. Inovasi-inovasi terkait pelayanan publik yaitu pelayanan pengujian (aplikasi LACAK), pemberian informasi dan pengaduan (KABAYAN) dan layanan sertifikasi SKE (Surat Keterangan Ekspor) pelaksanaannya secara konsisten dan update.

I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.72
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Kebijakan Pelayanan : Penyusunan SP mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain: (1) tokoh masyarakat (2) akademisi, (3) dunia usaha, dan (4) lembaga swadaya masyarakat. Serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat; Agar ditambahkan data dukung publikasi katalog di area ruang pelayanan; SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah disosialisasikan, dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, serta melakukan monev berkelanjutan; Informasi tentang SP dapat diakses dengan bertanya kepada petugas secara tatap muka, membaca di lokasi tempat layanan, melalui media sms/telepon, email, website/media sosial. Agar ditambahkan data dukung akses melalui SMS; Agar	Sudah dilakukan penilaian UPP, dengan hasil 4,67 dengan kategori Pelayanan Prima		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
<p>ditambahkandata dukung SP yang ditetapkan; Agar dilengkapi data dukung leaflet yang mencantumkan maklumat pelayanan. Pengisian Kuesioner oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/atau online, baik yang permohonannya disetujui maupun ditolak. Dilengkapi data dukung yang sesuai (rekap data); Informasi SKM tersedia dan dipublikasi di berbagai tempat dan media informasi (tersedia di area ruang pelayanan, media sosial,website, baliho/ banner, leaflet/pamflet/brosur, buku saku/katalog, posterdan media cetak); Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran danrekomenasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan penyelenggara; Saran, kritik,dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya sebelum laporan SKMditerbitkan. Agar dilengkapi data dukung yang menunjukkan bahwa hasil SKM telah ditindaklanjuti (dapat berupa monev).</p>			
<p>Profesionalisme SDM : Ketersediaan pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, >80% dari nomenklatur ditetapkan. Agar dilengkapi data dukung jumlah kebutuhan pelaksana layanan, kompetensi, dan gap yang terjadi; Disampaikan data dukung yang menyatakan bahwa layanan dapat diakses pada waktu ekstra; Pelayanan agar dapat diberikan sangat cepat (tidak membiarkan pengguna layanan menunggu untuk dilayani); Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan; Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai setiap 1 (satu) bulan; Pelaksana layanan mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama, PIN/Atribut/logo unitpelayanan, mempraktekkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi). Data dukung atribut unit pelayanan agar dilengkapi.</p>	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		
<p>Sarana Prasarana: Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas televisi, bahanbacaan, monitor antrian, AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas penunjang (hotspot/ wifi, area merokok terisolasi, serta tersedia ruang ibadah baik menyatu ataupun terpisah); Toilet disediakan terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafeldan toiletres.</p>	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		
<p>b Sistem Informasi Pelayanan Publik : Sistem informasi pelayanan publik telah online dan telah memenuhi unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaiankinerja Lembaga; Pemutakhiran</p>	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
informasi pelayanan publik dilakukan secara terus menerus setiap hari, agar dilengkapi data dukung yang sesuai (misal SOP pemutakhiran data); Informasi nonelektronik berupa poster/ spanduk/leaflet/ buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruangpelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.			
c Konsultasi dan Pengaduan : Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya agar dilengkapi data dukung yang sesuai; Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya.	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		
d Inovasi : Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi serta sudah diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik/sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional).	Sudah ada inovasi yang dilaksanakan dan ada yang sudah dalam proses kompetisi ICPA, sudah replikasi inovasi a. 1 SIPETA, SIMANGGA oleh Balai lain		

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut : (1) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD; (2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas

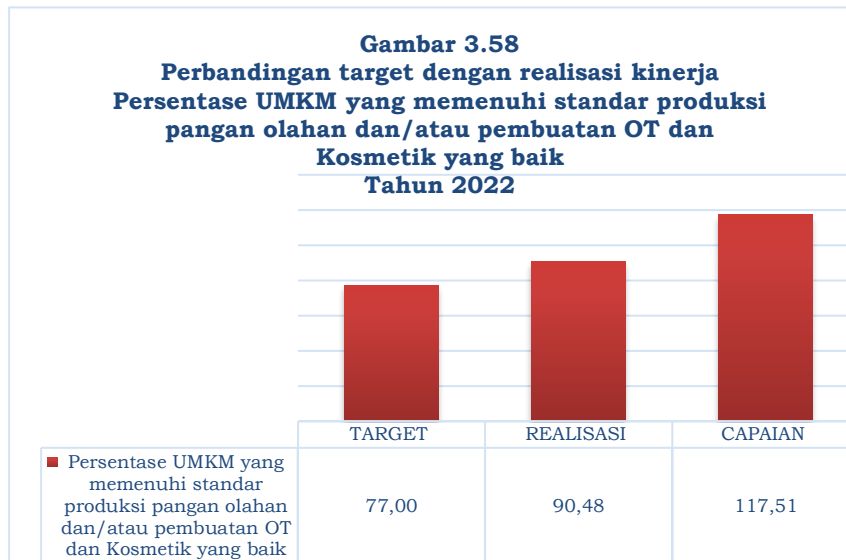
Sektor; dan (3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Sedangkan kriteria UMKM yang memenuhi standar adalah: 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.73
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN
DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00%	90.48%	117.51%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Pada tahun 2022, target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebesar

77.00%, sedangkan realisasi sebesar 90.48%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan bimtek UMKM, tahapan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPPOB, SPA CPKB/rekomendasi BUPN dan CPOTB, tahapan sertifikasi atau monitoring evaluasi dan pelaporan ke Badan POM. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 117.51% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**

TABEL 3.74
TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, KOSMETIK DAN OT

Komoditi		TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	Jumlah 6
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	
Total Progress						

Komoditi		TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	Jumlah 10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	
Total Progres						
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	Jumlah 26
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

**TABEL 3.75
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN. OT DAN KOSMETIK
TAHUN 2022**

No.	Komoditi	Jumlah UMKM Yang Didampingi	Penetapan UMKM	Bimtek UMKM	Pelaksanaan Fasilitasi	Sertifikasi	Pelaporan	% tahapan kegiatan pendampingan
1	Pangan	26	10%	20%	40%	20%	10%	100%
2	OT	6	10%	20%	40%	20%	10%	100%
3	Kosmetik	10	10%	40%	40%	-	10%	100%
TOTAL							100%	

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, realisasi dan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun 2020 dan 2021, karena indikator tersebut baru diukur pada tahun 2022.

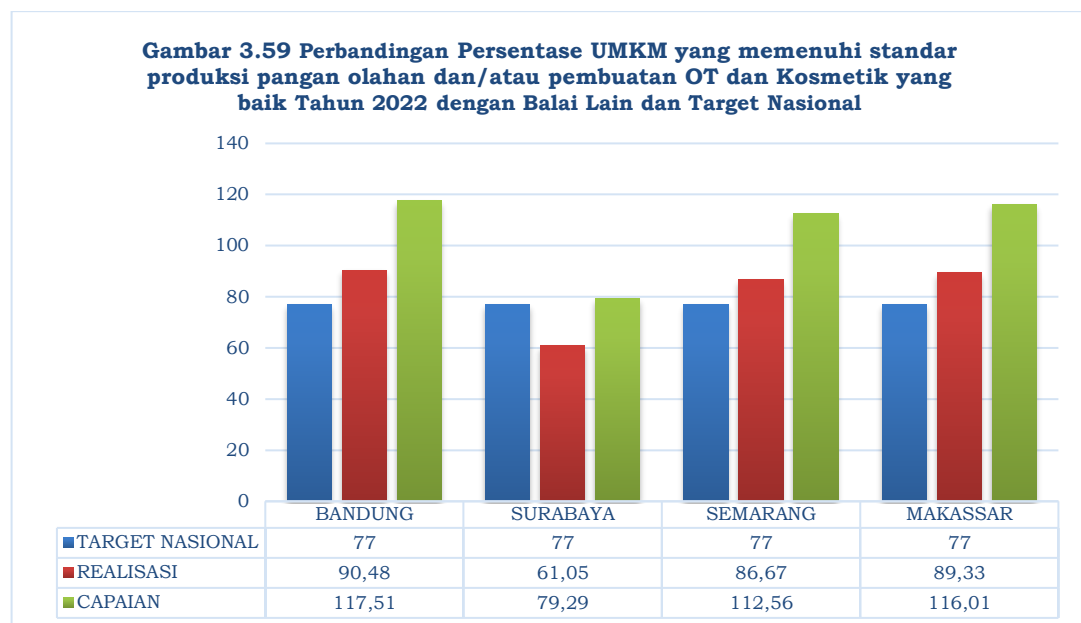
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.76
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN
DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,00%	90.48%	111.70%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 111.70% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 dengan target nasional (77.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (117.51%), Balai Besar POM di Makassar (116.01%), Balai Besar POM di Semarang (112.56%) dan Balai Besar POM di Surabaya (79.29%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan hal-hal berikut ini:

- Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2022, dan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai agenda yang ditetapkan.
- Sosialisasi kegiatan pendampingan UMKM yang secara masif dilakukan oleh BBPOM Bandung, meningkatkan animo/minat para pelaku usaha UMKM dalam terlibat aktif dalam program pendampingan ini.
- Komitmen yang kuat dari para pelaku usaha untuk segera berproses dalam kegiatan pendampingan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan lebih cepat dibandingkan dengan perencanaan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM. BBPOM Bandung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan usulan dan masukan pelaku usaha mana yang akan difasilitasi, diantaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan inkubator-inkubator UMKM dari perguruan tinggi. Di awal proses ini lintas sektor tersebut akan mencari UMKM binaannya dan menyeleksi UMKM yang akan dicalonkan sebagai UMKM yang akan difasilitasi.
- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

- ☛ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.77
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK”
TAHUN 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	90.48	117.51	404,601,000	404,348,713	99.94	1.18	0.18	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- ☛ Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang bertujuan untuk memberikan adanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
- ☛ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur tentang seluruh tahapan proses perizinan termasuk yang berada di bawah kewenangan Badan POM dan dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya.
- ☛ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang kemudahan untuk UMKM.

- Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi ijin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.
- Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.
- Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang merupakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan adanya kegiatan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan oleh BBPOM.



Gambar 3.60 Kegiatan Desk CAPA

- Pada tanggal 25-26 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA merupakan kelanjutan dari kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Januari 2022. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen panduan mutu yang dipersyaratkan pada saat mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB sehingga mereka dapat mengupload dokumen tersebut dan mulai berproses di sistem/aplikasi e-sertifikasi.



Gambar 3.61 Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA

- Pada tanggal 19-20 April 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang diselenggarakan secara luring untuk 5 UMKM obat tradisional dan 5 UMKM kosmetik. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.





Gambar 3.62 Pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM OT dan Kosmetik

- Pada tanggal 18-19 Mei 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara luring untuk 25 UMKM pangan olahan. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.



Gambar 3.63 Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM Pangan Olahan

- Pada tanggal 2 Juni 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan Bimbingan Teknis Booster UMKM Juara yang merupakan tahap awal dari rangkaian Program Booster UMKM Juara yang merupakan kolaborasi BBPOM di Bandung dengan Pemda Propinsi Jawa Barat yaitu dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat.



Gambar 3.64 Bimtek Booster UMKM Juara

- Pada tanggal 5 Agustus 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi Program Booster UMKM Juara secara daring. Pada kegiatan ini para UMK binaan diberikan materi terkait dokumen panduan mutu yang diperlukan dalam pemenuhan Cara Produk Pangan Olahan Yang Baik dan dijelaskan pula bagaimana cara penyusunan dokumen mutu tersebut.



Gambar 3.65 Rapat Koordinasi Booster UMKM Juara

- Pada tanggal 25-26 November 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Booster UMKM Juara yang diikuti oleh 50 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha yang menjadi peserta pada kegiatan ini merupakan UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BBPOM di Bandung untuk tahun 2022. Para pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 21 nomor izin edar (NIE) dan 17 akun perusahaan.



Gambar 3.66 Kegiatan Desk Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

➤ Pada tanggal 8-9 Desember 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan Batch terakhir di tahun 2022 yang diikuti oleh 20 pelaku usaha yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 15 nomor izin edar (NIE) dan 16 akun perusahaan.



Gambar 3.67 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.78
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN
DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK”

Rekomendasi	Tindaklanjut
	Selesai
a Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM	Berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Prov, Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan Booster UMKM Juara. Telah dilaksanakan kegiatan desk e-registrasi pangan olahan
b Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.	Telah dilakukan pendampingan dan kegiatan pelatihan
c Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/Bimtek Pendampingan UMKM, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2022 untuk UMKM Pangan Olahan, 19-20 April 2022 untuk UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional; 18-19 Mei 2022 untuk UMKM Pangan Olahan; tanggal 2 Juni 2022 untuk Kegiatan Booster UMKM Juara dan tanggal 5 Agustus 2022 kegiatan Sosialisasi Panduan Mutu untuk Booster UMKM serta Melaksanakan kegiatan Pendampingan UMKM dan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 25-26 November dan 8-9 Desember 2022
d Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.	Sudah dilakukan Monev sampai Triwulan IV. Melakukan penginputan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan
e Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.	Telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

SASARAN KEGIATAN KE-5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **100,19%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.79.

TABEL 3.79
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.98	100.19%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	76	100.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
3. Jumlah desa pangan aman	28	28	100.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
4. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	13	13	100.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah

menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan I, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.22.224.04.22.114 Tanggal 11 April 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 tahun 2022. Triwulan II berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.2.22.07.22.493 Tanggal 11 Juli 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 tahun 2022. Triwulan III berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.2.22.10.22.754 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 3 tahun 2022. Triwulan IV berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.02.2.22.22.01.23.51 Tanggal 16 Januari 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 tahun 2022.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

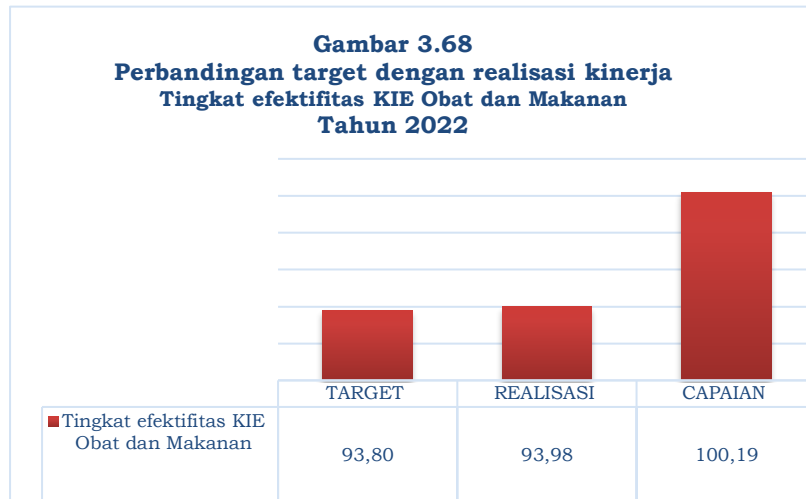
TABEL 3.80
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.81
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.98	100.19%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

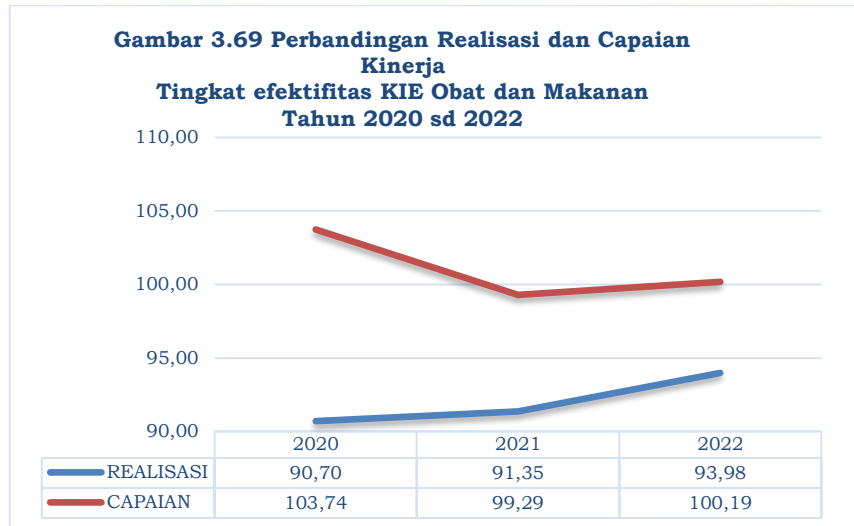


Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 93,80% dengan realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93,98% (Sangat Efektif) sesuai Kategori Penilaian

tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Nilai tersebut di atas Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tingkat nasional UPT Balai Besar/Balai POM sebesar 93,38. Persentase capaian target dengan realisasi kinerja indikator sasaran tersebut adalah sebesar **100.19%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat dan penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE dan penyebaran informasi mengenai obat dan makanan, disamping banyaknya ragam sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga menambah pemahaman masyarakat terhadap konten informasi obat dan makanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Bandung.



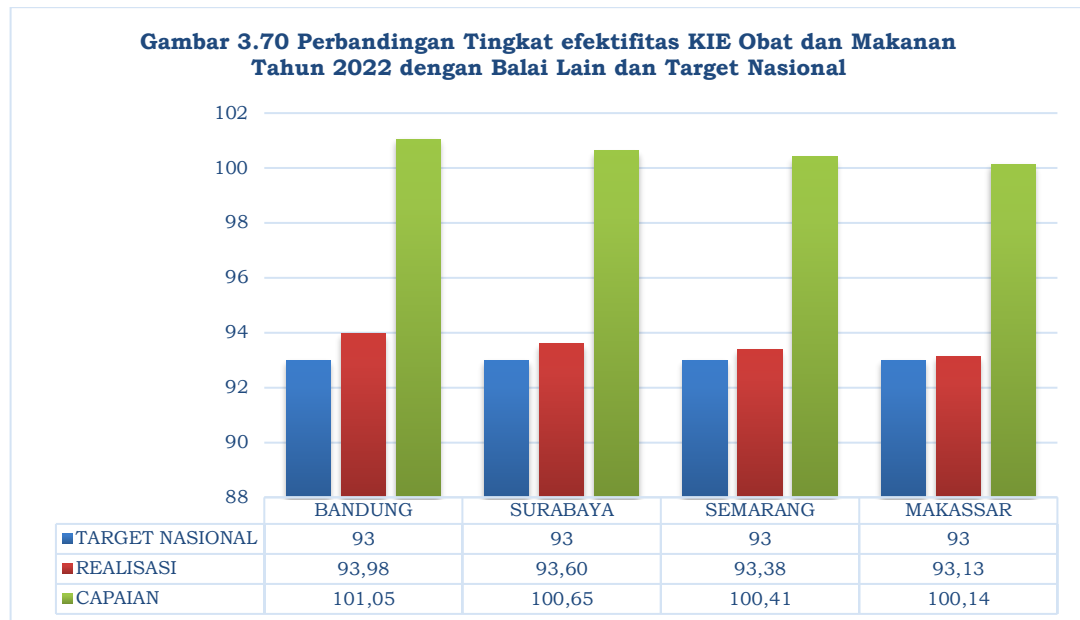
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.82
PERBANDINGAN REALISASI
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.60	93.98	96.29%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 96.29% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 dengan target nasional (93.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (101.05%), Balai Besar POM di Surabaya (100.65%), Balai Besar POM di Semarang (100.41%) dan Balai Besar POM di Makassar (100.14%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

☞ Pelayanan informasi dan pengaduan Balai Besar POM di Bandung dilakukan secara:

1. Tatap muka langsung yang dilakukan pada:
 - a. loket layanan di Kantor Balai Besar POM di Bandung dan,
 - b. loket layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di 4 Kabupaten/Kota (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bekasi)
2. Layanan melalui platform aplikasi, antara lain:
 - a. KABAYAN (Kepala Balai Melayani), yaitu layanan informasi dan pengaduan menggunakan platform WhatsApp,
 - b. SiTeung (Siap Memberikan Informasi untuk Seluruh Negeri), yaitu layanan telekonsultasi menggunakan Google Meet,
 - c. *Direct Message* pada aplikasi Instagram dan Facebook,

d. Layanan melalui email.

Dengan banyaknya saluran layanan informasi dan pengaduan yang telah disediakan, memudahkan masyarakat mendapatkan KIE mengenai obat dan makanan.

- 🏠 Penayangan informasi melalui media sosial dilakukan secara konsisten, baik merupakan penayangan kembali informasi yang disampaikan oleh Badan POM maupun produk informasi yang dihasilkan oleh tim media social Balai Besar POM di Bandung.
- 🏠 Penyelenggaraan konsultasi pada Mall Pelayanan Publik yang selama ini dilakukan di 4 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bandung, memudahkan dan memperpendek jarak masyarakat di sekitar 4 kabupaten/kota tersebut dalam mendapatkan layanan konsultasi.
- 🏠 Disamping layanan informasi dan pengaduan, kegiatan KIE Obat dan Makanan dilakukan secara langsung kepada masyarakat baik berupa kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung secara mandiri maupun kegiatan kolaborasi bersama lintas sector, antara lain:
 1. Kegiatan kolaborasi bersama Tokoh Masyarakat,
 2. Kegiatan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Sarling Jabar),
 3. Kegiatan kolaborasi bersama lintas sector baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, berupa kegiatan Bimtek, workshop maupun sosialisasi,
 4. Kegiatan kolaborasi bersama media elektronik (televisi dan radio), berupa webinar, *Talkshow* ataupun *Podcast*.
- 🏠 Tim Media Sosial Balai Besar POM di Bandung mempunyai program penyebaran informasi melalui acara KELOM GEULIS, merupakan acara Podcast dengan tema mengenai obat dan makanan yang sedang populer di masyarakat.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk meningkatkan pencapaian kinerja antara lain:

- 🏠 Melakukan penayangan informasi melalui layanan dengan berbagai platform aplikasi yang diminati masyarakat dan secara konsisten,
- 🏠 Mengembangkan materi KIE sesuai sasaran dan menarik bagi audiens,
- 🏠 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap umpan balik dari masyarakat melalui survei dan menindak lanjutinya secara cepat dan tepat,
- 🏠 Memperluas cakupan KIE dengan cara mengembangkan Kerjasama dengan tokoh masyarakat, bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.83
TINGKAT EFISIENSI
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.98	100.19	10,168,403,000	10,126,696,326	99.59	1.01	0.01	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

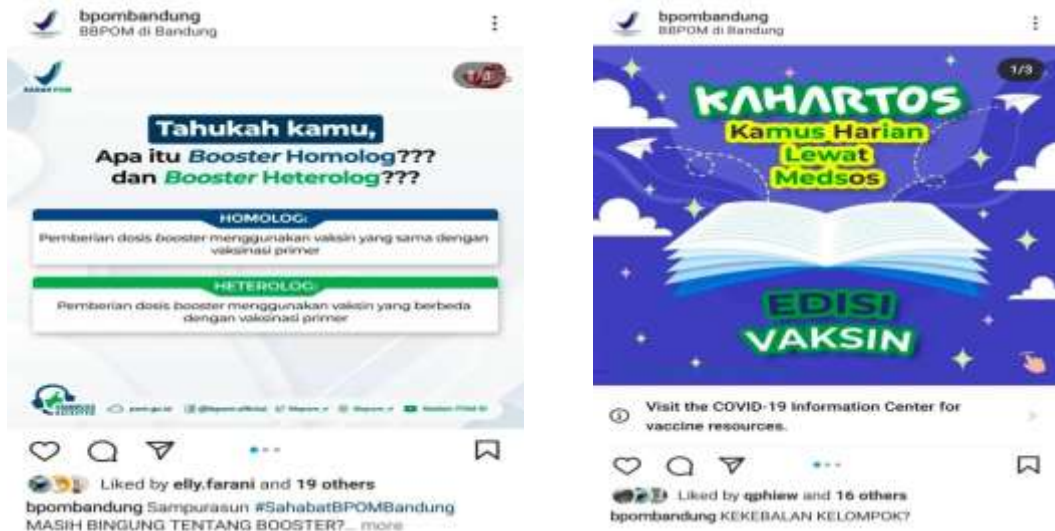
Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian persyaratan kinerja:

- ☛ Selain program-program yang telah disampaikan di atas, program Iklan Layanan Masyarakat juga menunjang keberhasilan karena dengan program ini masyarakat lebih mengenal peran BPOM dalam mengawal produk obat dan makanan dan layanan-layanan yang diberikan Balai Besar POM di Bandung.
- ☛ Penayangan KIE di Media Sosial membutuhkan proses rancangan dan penjadwalan materi. Penayangan materi di media sosial yang tidak terjadwal, hal tersebut membuat petugas tidak melakukan proses rancang materi untuk media sosial secara optimal.
- ☛ Penjadwalan yang tidak konsisten menyebabkan Program penyebaran informasi di Media Sosial tidak rutin ditayangkan, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai produk obat dan makanan.
- ☛ Pelaksanaan layanan di Mall Pelayanan Publik tidak dapat dilaksanakan pada jadwal yang konsisten, hal ini disebabkan padatnya jadwal kegiatan dan terbatasnya Sumber daya di Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi.

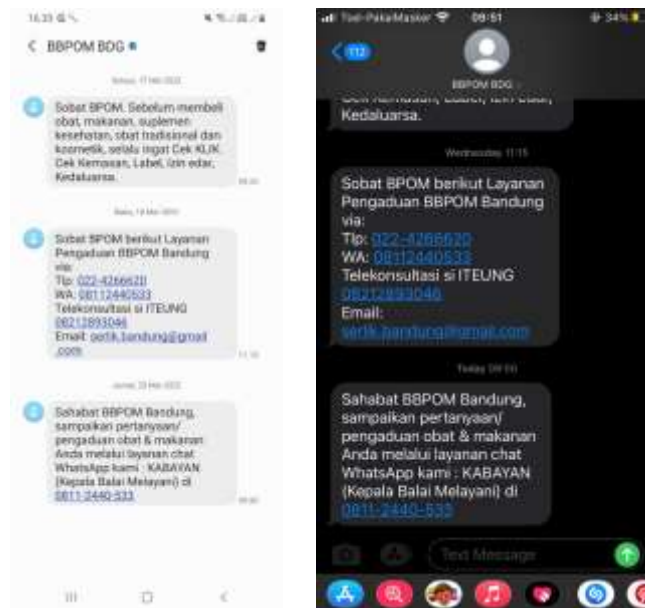
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG



Gambar 3.71 Layanan di Mall Pelayanan Publik



Gambar 3.72 KIE melalui Media Sosial



Gambar 3.73 KIE melalui SMS Blast



Gambar 3.74 KIE melalui Media Transportasi

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.84
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi	Timeline	
a	Selama masa pandemik, KIE dapat dilakukan dengan berbagai media baik secara daring maupun luring	Tahun 2022 sudah dilaksanakan KIE dalam berbagai media baik secara daring maupun luring	-	-
b	Peningkatan frekuensi KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube; diantaranya dengan one day one post, melakukan repost informasi yang penting dari Kementrian/Lembaga lain.	Telah dilakukan penambahan frekuensi KIE dalam berbagai platform aplikasi dan media sosial.	-	-
c	KIE dapat dilaksanakan melalui media cetak/radio/televise untuk memperluas cakupan masyarakat, misalnya melalui ILM atau iklan layanan masyarakat, dan talkshow ke Radio	Telah dilakukan KIE pada media cetak dan elektronik beserta iklan layanan masyarakat di media cetak/elektronik. transfortasi, dan media luar ruang	-	-
d	Kegiatan KIE dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol Kesehatan; dan juga secara daring apabila pemberlakuan PPKM dari pemerintah diterapkan.	KIE telah dilaksanakan secara tatap muka dan daring	-	-
e	Melakukan inovasi program KIE sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat sehingga informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat	Inovasi program KIE yang telah dilakukan adalah program KELOM GEULIS.	-	-

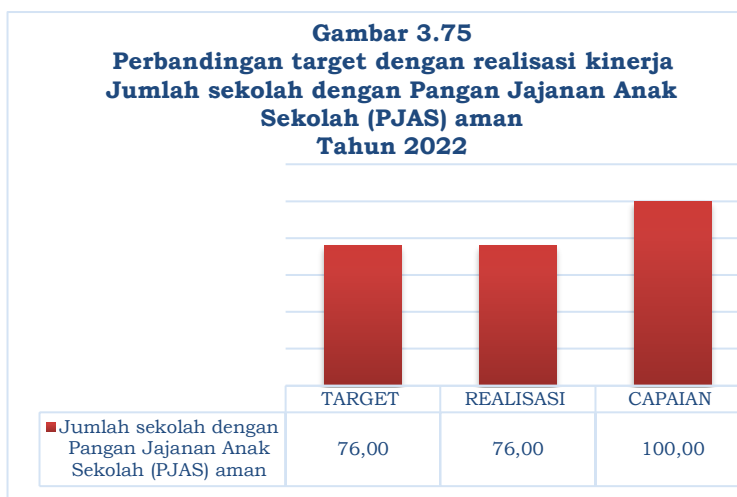
1. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Jumlah sekolah dihitung secara kumulatif dari periode tahun 2022.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.85
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	76	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Target tahun 2022 sebanyak 76 (progress 100%), sekolah yang sudah diintervensi dari tahun 2020 – 2021 sebanyak 42 sekolah, dan target tahun 2022 sebanyak 34 sekolah, sehingga jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah

(PJAS) aman sebanyak 76 sekolah. Jika diukur terhadap target tahun 2022, maka capaiannya sebesar **100%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

Pada tahun 2022, Intervensi PJAS dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Sukabumi dan Banjar, dengan rangkaian kegiatan intervensi, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kota Banjar	Kab. Ciamis	Kota Sukabumi	Kab. Pangandaran	Ket.
1	Advokasi	V	V	V	V	
2	Sosialisasi	34	36	38	38	sekolah
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	9	9	8	8	sekolah
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	V	V	V	V	
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	9	9	8	8	sekolah
7	Pengawasan	42 Sekolah yang sudah diintervensi tahun lalu				

Intervensi yang dilakukan bertahap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan POM RI. Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sektor, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Workshop. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.86
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS
TAHUN 2022

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	10	5.0	5	0	20
2 Sosialisasi Keamanan Pangan	10	2.5	5	2.5	0	10
3 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	0	7.5	7.5	0	15
4 Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10	0	5.0	5	0	10
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawasan tahun sebelumnya)	15			7.5	7.5	15
➤ Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		0	0	0	0	0
➤ Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		0	0	0	0	0
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	0	0	0	20	20
7 Pengawasan	10	3.3	2.2	3.81	0.69	10
TOTAL SKOR	100	15.8	24.20	31.31	28.69	100

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi dan mendapat sertifikat Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Target setiap tahun adalah pengawasan terhadap Sekolah dengan PJAS Aman terdiri dari sekolah yang diintervensi tahun yang bersangkutan ditambah dengan jumlah sekolah yang telah dilakukan pengawasan terhadap sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya.



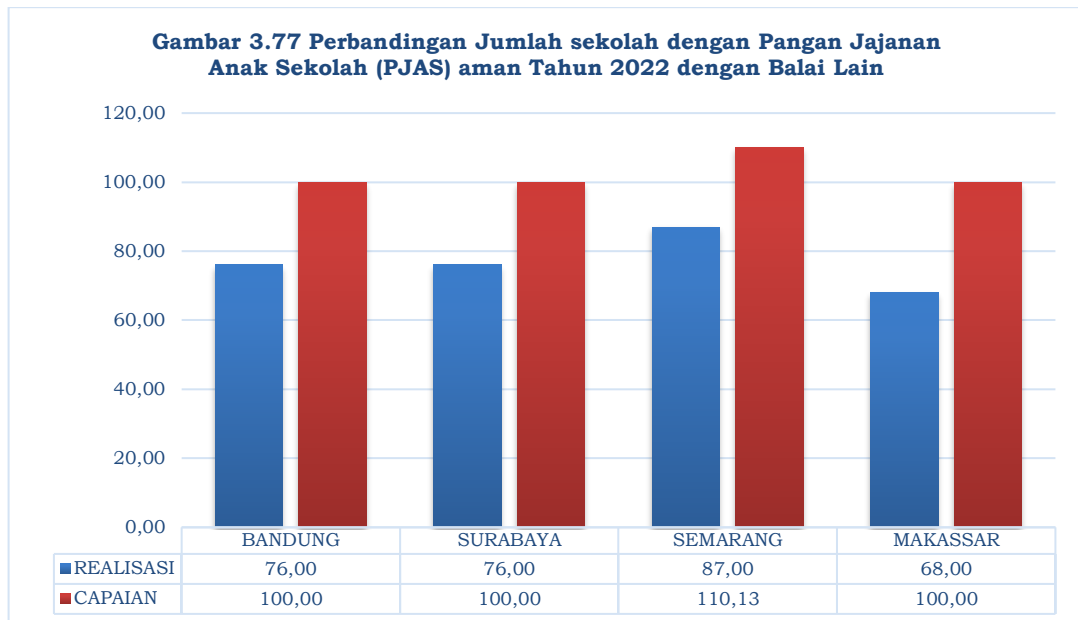
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

TABEL 3.87
PERBANDINGAN REALISASI
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	150	76	50.67%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 50.67% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi dan capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada tahun 2022, maka pencapaian kinerja dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (110.13%), Balai Besar POM di Bandung (100.00%), Balai Besar POM di Surabaya (100.00%) dan Balai Besar POM di Makassar (100.00%). Sedangkan target nasional sebanyak 2.010 sekolah di seluruh Indonesia, sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan:

- 🏠 Dengan telah berakhirnya masa pandemic Covid 19, pelaksanaan tahapan program PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai Besar POM di Bandung dan Pemerintah Daerah yang diintervensi.
- 🏠 Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama,

Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa.

- ☛ Pihak sekolah dan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) memandang pentingnya program Keamanan Pangan di Sekolah.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk periode selanjutnya diantaranya:

- ☛ Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi
- ☛ Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dan menyelaraskan dengan kegiatan pemerintah daerah.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.88
TINGKAT EFISIENSI
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
(PJAS) AMAN” TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76.00	76.00	100.00	896,331,000	888,185,852	99.09	1.01	0.01	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ☛ Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
- ☛ Balai Besar POM di Bandung, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.



Gambar 3.78
Kegiatan Advokasi dengan lintas Sektor



Gambar 3.79
Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader di Sekolah

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.89
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
Kegiatan PJAS tetap dilakukan secara daring dan luring dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah setempat terkait pandemi Covid-19.	Kegiatan program prioritas nasional PJAS aman dilaksanakan secara daring dan luring (kegiatan Daring dilaksanakan hanya pada tahapan advokasi)	-	-

2. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1)

Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawalan. Jumlah desa dihitung secara kumulatif dari desa yang diintervensi pada periode tahun 2020. Desa yang sudah diintervensi pada periode 2020-2021 adalah 19 Desa. Target desa yang diintervensi tahun 2022 adalah 9 Desa yang meliputi 3 Kelurahan di Kota Banjar (Batulawang, Binangun dan Sukamukti), 2 Desa di Kab. Ciamis (Panjalu dan Sindangangin), 1 Desa di Kab. Pangandaran (Selasari) dan 3 Kelurahan di Kota Sukabumi (Jayamekar, Lembursitu dan Sukakarya). Desa dengan status stunting diantaranya Kelurahan Sukakarya dan Jayamekar.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

**TABEL 3.90
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah desa pangan aman	28	28	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 28 Desa, realisasi indikator tersebut sebanyak 28 Desa (progress 100%). Jika diukur terhadap target tahun 2022, maka capaiannya sebesar **100.00%**

dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

**TABEL 3.91
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah desa pangan aman	28	28	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh.... jumlah desa yang diintervensi dan dikawal bertambah. Pada tahun 2022, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan program prioritas nasional keamanan pangan terdiri dari 9 desa yang diintervensi tahun 2022 dan 19 desa yang dikawal (diintervensi tahun 2021 dan tahun 2020). Seluruh target desa yang diintervensi dan di kawal selesai dilaksanakan, sehingga menambah capaian target kinerja.



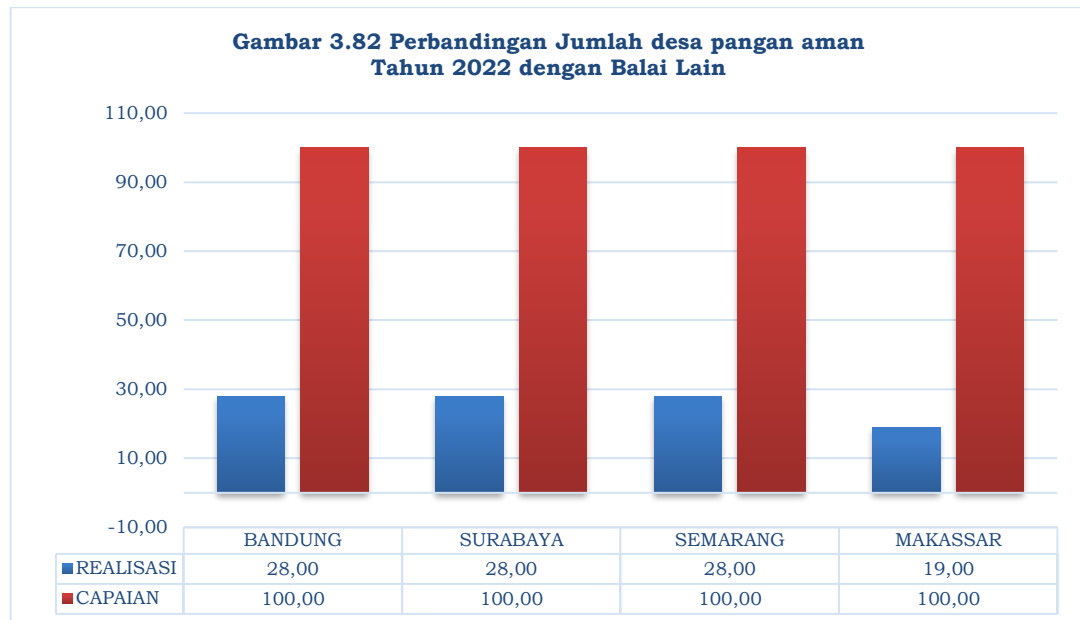
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.92
PERBANDINGAN REALISASI
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah desa pangan aman	47	28	59.57%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi jumlah desa pangan aman pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka pencapaian kinerjanya sebesar 59.57% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi dan capaian kinerja jumlah desa pangan aman pada tahun 2022, pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang sama yaitu sebanyak 28 desa (100.00%), sedangkan BBPOM di Makassar sebanyak 19 desa (100%). Target nasional sebanyak 648 desa di seluruh Indonesia, sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- 🏠 Kegiatan program intervensi desa pangan aman, melibatkan instansi/komunitas yang beragam, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang efisien dan efektif. Dengan koordinasi yang efisien dan efektif, Balai Besar POM di Bandung dapat menyelesaikannya sesuai target.
- 🏠 Keberhasilan juga ditentukan dengan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam membangun Desa Pangan Aman.
- 🏠 Kepadatan kegiatan lainnya yang menjadi target kinerja Balai Besar POM di Bandung dan terbatasnya SDM, menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan intervensi.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk periode berikutnya:

- ☛ Melaksanakan rangkaian kegiatan intervensi sesuai pedoman yang telah ditetapkan,
- ☛ Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah yang diintervensi,
- ☛ Melaksanakan strategi dalam pembagian tugas seefektif mungkin, agar semua kegiatan yang menjadi target kinerja dapat tercapai.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.93
TINGKAT EFISIENSI
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Jumlah desa pangan aman	28.00	28.00	100.00	1,165,106,000	1,154,499,301	99.09	1.01	0.01	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☛ Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
- ☛ Balai Besar POM di Bandung, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.



Gambar 3.83 Advokasi Keamanan Pangan dengan Lintas Sektor



Gambar 3.84 Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Kelurahan Banjar



Gambar 3.85 Bimtek Komunitas Desa di Kab. Ciamis dan Kota Banjar

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.94
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap desa yang diintervensi	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada awal bulan Desember	-	-

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
b Melakukan pengawasan terhadap desa yang diintervensi di tahun sebelumnya	Pengawasan terhadap desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya telah selesai dilakukan	-	-

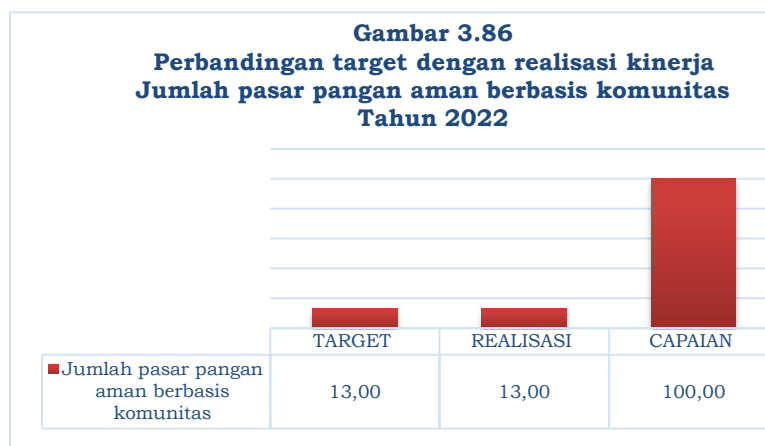
3. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawasan pada tahun berikutnya. Jumlah output target pasar merupakan jumlah kumulatif dari pasar yang diintervensi sejak tahun 2020. Pasar yang sudah diintervensi dari tahun 2020- 2021 sebanyak 8 pasar, target tahun ini sebanyak 5 pasar. Pasar yang di rencanakan di intervensi pada tahun 2022, adalah Pasar Degung dan Pelita di Kota Sukabumi, Pasar Kawali di Kabupaten Ciamis, Pasar Banjar di Kota Banjar serta Pasar Parigi di Kab. Pangandaran.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022

TABEL 3.95
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	13	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 13 Pasar, realisasi indikator tersebut sebanyak 13 Pasar (progress 100%). Jika diukur terhadap target tahun 2022,

maka capaiannya sebesar **100.00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

TABEL 3.96
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2022

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Advokasi	20	10	5	5.00	0	20
2 Survey Pasar	5	2.50	1.25	1.25	0	5
3 Bimtek Pengelola Pasar	15	0	6	9.00	0	15
4 Sampling dan Pengujian Tahap I	15	0	0	3.45	11.55	15
5 Penyuluhan	10	0	0	4.00	6	10
6 Kampanye	10	0	0	4.00	6	10
7 Sampling dan Pengujian Tahap II	15	0	0	2.29	12.71	15
8 Pengawasan	10	0	0	2.30	7.70	10
TOTAL SKOR	100	12.50	12.25	31.29	43.96	100

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021



Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh kegiatan

pasar aman berbasis komunitas terdiri dari pasar yang diintervensi tahun ini sebanyak 5 pasar dan pasar yang diintervensi pada tahun 2020 dan 2021 (pengawasan) sebanyak 8 pasar, sehingga capaian kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan jumlahnya menjadi 13 pasar.

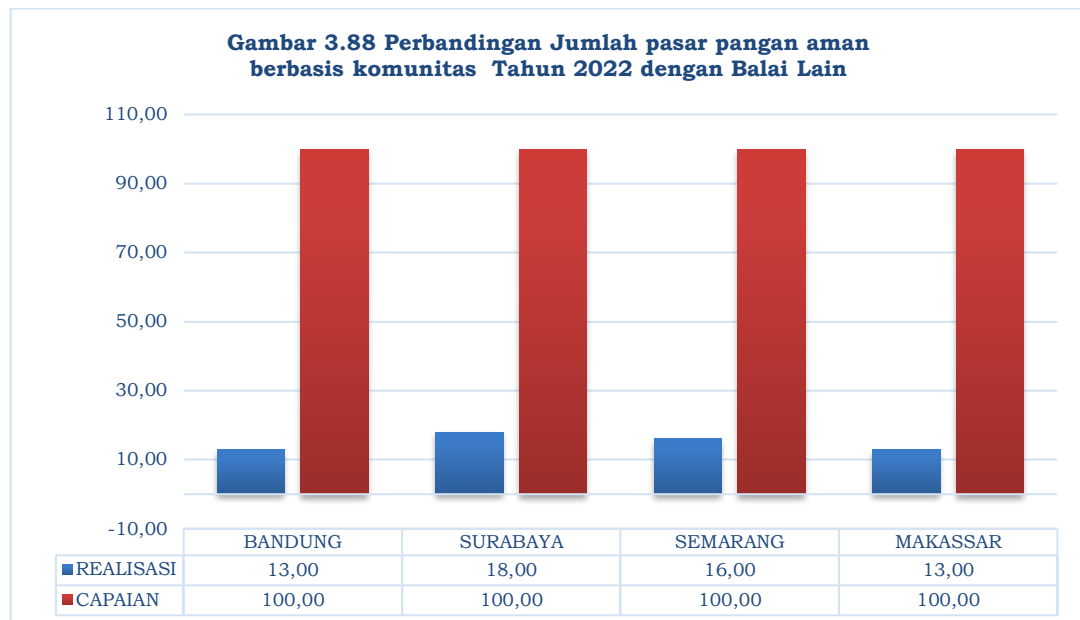
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.97
PERBANDINGAN REALISASI
“JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS”
TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	23	13	56.52%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka pencapaian kinerjanya sebesar 56.52% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2022, maka pencapaian kinerja dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (18 pasar), Balai Besar POM di Semarang (16 pasar), Balai Besar POM di Bandung (13 pasar) dan Balai Besar POM di Makassar (13 pasar) serta pencapaian kinerja keseluruhannya mencapai 100.00%. Target nasional jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebanyak 255 pasar di

seluruh Indonesia, sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan atas peningkatan kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Keberhasilan kinerja kegiatan intervensi Pasar Aman berbasis Komunitas terlaksana karena adanya kolaborasi antara Balai Besar POM di Bandung bersama jajaran Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen terhadap pelaksanaan program ini.
- ☛ Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama yang telah berlangsung baik dengan lintas sektor pembina pasar, Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan komunitas pasar lainnya mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk periode berikutnya:

- ☛ Melaksanakan Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama yang efisien dan efektif bersama Pemerintah Daerah sehingga menumbuhkan komitmen bersama dalam pelaksanaan program keamanan pangan di Pasar.
- ☛ Tetap melaksanakan koordinasi terhadap pasar yang diintervensi pada tahun sebelumnya sehingga keberlangsungan program dapat tetap terpelihara.

G. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.98
TINGKAT EFISIENSI
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13.00	13.00	100.00	357,227,000	354,078,735	99.12	1.01	0.01	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja indikator tersebut sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan sesuai rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya capaian kinerja meningkat dengan penggunaan anggaran secara akuntabel.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain:

- Perubahan Kab/Kota Intervensi menyebabkan tertundanya proses audiensi yang berakibat mundurnya pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman
- Pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tidak hanya dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, tapi dilakukan pula oleh instansi Pemerintah Daerah yang melakukan pembinaan terhadap pasar.



Gambar 3.89 Kegiatan intervensi Pasar di Kota Banjar



Gambar 3.90 Kegiatan intervensi Pasar di Kab. Ciamis



Gambar 3.91 Kegiatan intervensi Pasar di Kota Sukabumi

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.99
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Oleh karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah setempat	Kegiatan Pasar Aman dilakukan secara luring dengan menerapkan protocol Kesehatan dan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah	-	-

SASARAN KEGIATAN KE-6

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **97,97%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.100
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	96,02%	96,02%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	99,91%	99,91%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			97,97%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

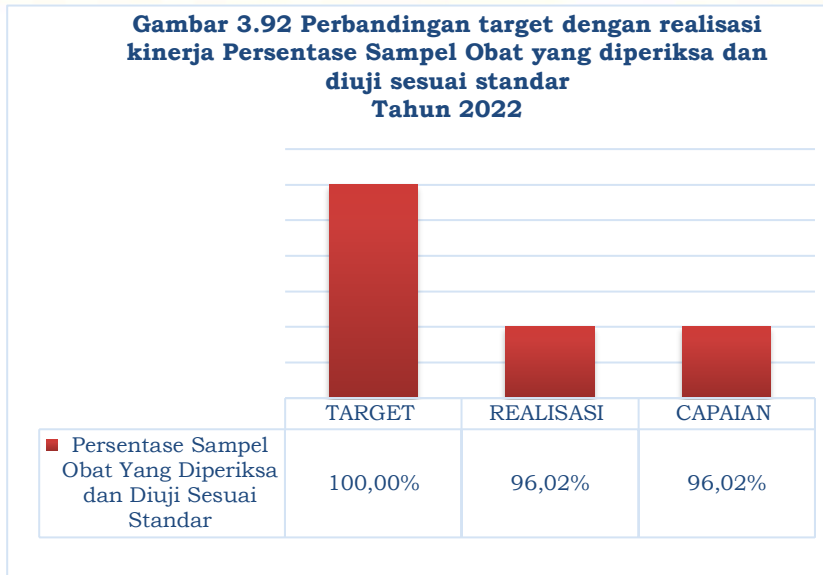
Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.101
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI
SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	96,02%	96,02%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Gambar 3.92 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022



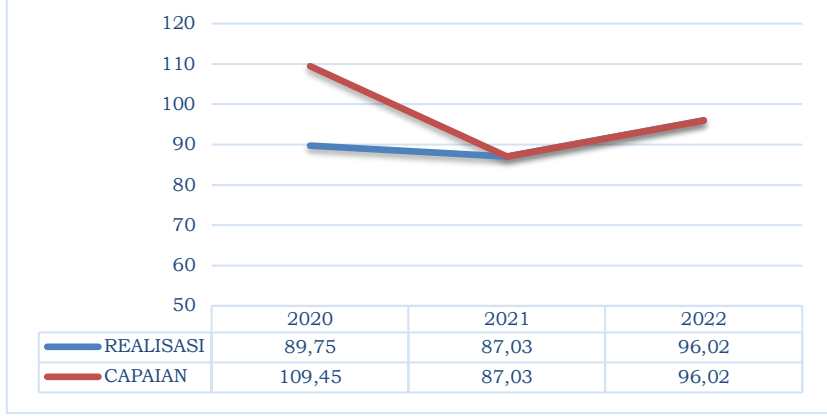
Pada Tahun 2022, jumlah sampel obat yang disampling 2681 sampel dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 3180 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai

persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 96,02%. Target pada tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar 100,00%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **96,02%** dengan Kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase sampel yang diperiksa sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah memenuhi target. Sedangkan persentase sampel obat yang diuji sesuai standar pengujian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 belum memenuhi target. Pada tahun 2020 sampel yang diuji sesuai standar sebesar 79.5%, tahun 2021 sebesar 74,05% dan tahun 2022 sebesar 91.22%.

Gambar 3.93 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 - 2022



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

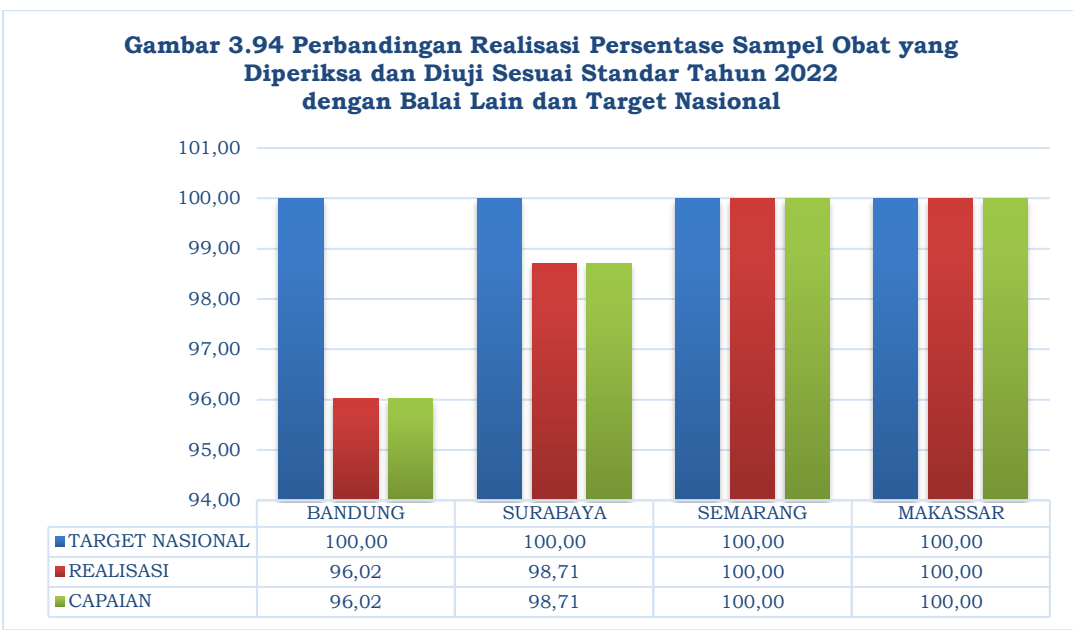
**TABEL 3.102
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	100	96.02	96.02	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 96.02% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Gambar 3.94 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Balai Lain dan Target Nasional



Jika dibandingkan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada tahun 2022 dengan target nasional (100.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (100.00%), Balai Besar POM di Makassar (100.00%), Balai Besar POM di Surabaya (98.71%) dan Balai Besar POM di Bandung (96.02%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas pencapaian kinerja disebabkan oleh:

- ☛ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 100,00% dan realisasinya sebesar 100,83% (2681 sampel dari 2659 sampel yang ditargetkan). Kelebihan sampel yang diperiksa ini karena adanya kasus EG DEG dalam produk sirup obat. Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 100,00% dan realisasinya mencapai 91,22% (3180 sampel dari 3486 sampel yang diuji). Sehingga realisasi tahun 2022 untuk indikator kinerja ini sebesar 96,02%.
- ☛ Persentase sampel yang diperiksa sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah memenuhi target. Sedangkan persentase sampel yang diuji sesuai standar pengujian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 belum memenuhi target. Akan tetapi, terjadi peningkatan realisasi sampel obat yang

diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga 2022 (pada tahun 2020 sebesar 79.5%, tahun 2021 sebesar 74,05% dan tahun 2022 sebesar 91.22%).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- ☛ Pemenuhan sampel obat yang diuji sesuai standar bisa dipenuhi sesuai target (100%), apabila ada penambahan peralatan laboratorium sesuai standar GLP. Sampel obat yang diuji laboratorium bisa melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP, karena adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT, AAS dan GCMS.
- ☛ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☛ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☛ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.103
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	96.02	96.02	770,517,000	768,241,461	99.70	0.96	- 0.04	75 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar -0.04 (75.00%) dengan kriteria tidak efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan disebabkan adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT, AAS dan GCMS, namun dalam pelaksanaan

kegiatan sampling dan pengujian membutuhkan penggunaan anggaran dengan besaran sebagaimana tertera pada tabel tersebut. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, antara lain :

- ☛ Pemenuhan sampel obat yang diuji sesuai standar bisa dipenuhi sesuai target akhir tahun (100%), apabila ada penambahan peralatan laboratorium sesuai standar GLP. Sampel obat yang diuji laboratorium bisa melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP, karena adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT, AAS dan GCMS.
- ☛ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- ☛ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Pada tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022; 4). Bimbingan Teknis Internal Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan judul Penetapan Kadar n-Heksan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat Secara GC Headspace Detektor Spektrofotometri Massa; 5). Bimbingan Teknis Internal Kosmetika dengan judul Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi pada tanggal 6-10 Juni 2022; 6). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium, Kalsium dalam Sediaan Infus Ringer Laktat dengan metode AAS dan Penetapan Kadar Zat Terlarut hasil Uji Disolusi Parasetamol dan Kofein dalam Sediaan Tablet dengan metode KCKT) tanggal 8-12 Agustus 2022; 7). Bimtek peningkatan kompetensi pengujian EG DEG dalam sirup obat secara GCMS di P3OMN pada tanggal 20-21 Oktober 2022; 8). Pelatihan Auditor Internal Untuk Manajemen Mutu Laboratorium Berbasis ISO/IEC 17025:2017 yang diselenggarakan oleh IPB Training Center pada tanggal 15-16 November 2022.



Gambar 3.95 Kegiatan Bimbingan Teknis Internal Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.104
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2022 adalah 75,80%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan tahun 2023	Desember 2023
b Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
berjalan efisien dan efektif.	Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan		
c Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar, Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.	<p>Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium dan Kalsium dalam Infus Ringer Laktat secara AAS) tanggal 6-10 Juni 2022. 2. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Penetapan Kadar n-Hexan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Massa) tanggal 6-10 Juni 2022. 3. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kosmetik (Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) tanggal 6-10 Juni 2022. 4. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium, Kalsium dalam Sediaan Infus Ringer Laktat dengan metode AAS dan Penetapan Kadar Zat Terlarut hasil Uji Disolusi Parasetamol dan Kofein dalam Sediaan Tablet dengan metode KCKT) tanggal 8-12 Agustus 2022. 5. Bimbingan Teknis Analisis Sterilitas tanggal 5-10 Juni 2022 6. Bimbingan Teknis Analisis Kosmetik tanggal 10-15 Juli 2022 		
d Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan	Monev timeline pengujian obat tahun 2022		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.			

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.105
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	99,91	99,91%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

3. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua).

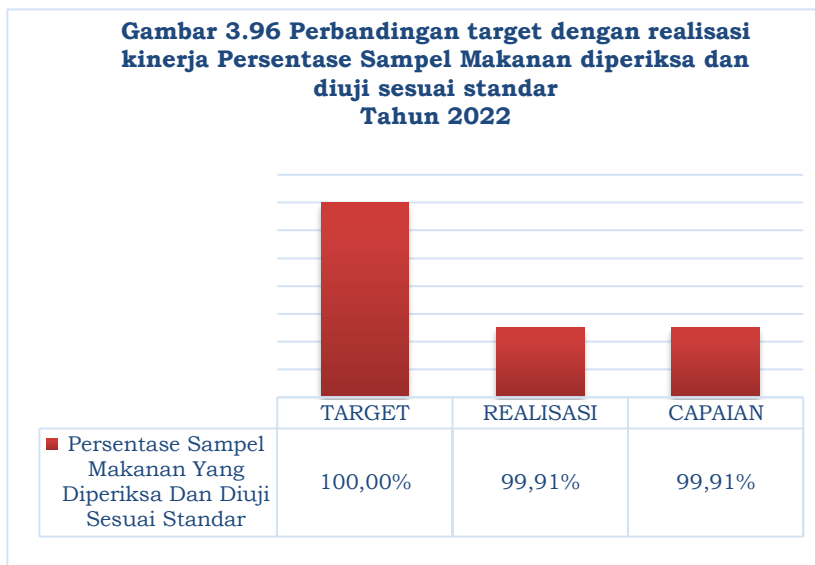
Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

**TABEL 3.106
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	99,91	99,91%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF



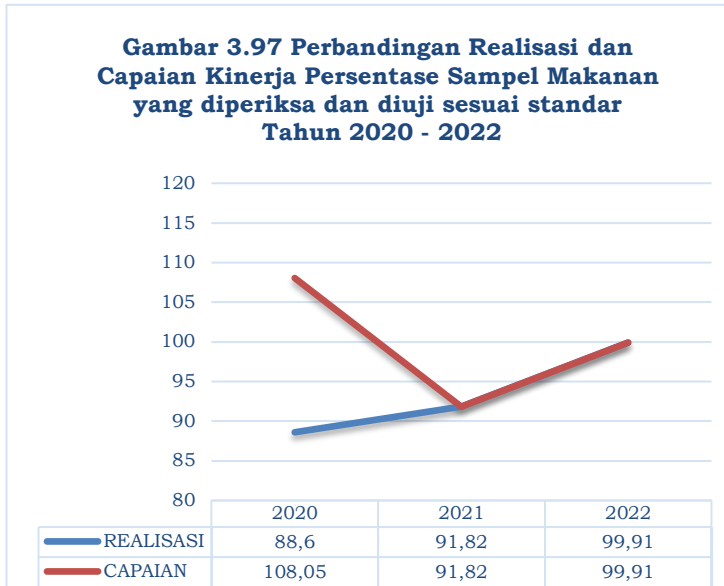
Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 sebesar 99,91%

dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 100,26% (sebanyak 1162 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 1158 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 99,48% (sebanyak 1517 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1525 sampel). Dengan

demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **99,91%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Gambar 3.97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 - 2022



Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase sampel yang

diperiksa sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah memenuhi target. Sedangkan persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar pengujian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 belum memenuhi target. Pada tahun 2020 sampel yang diuji sesuai standar sebesar 77.20%, tahun 2021 sebesar 83,52% dan tahun 2022 sebesar 99.48%.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

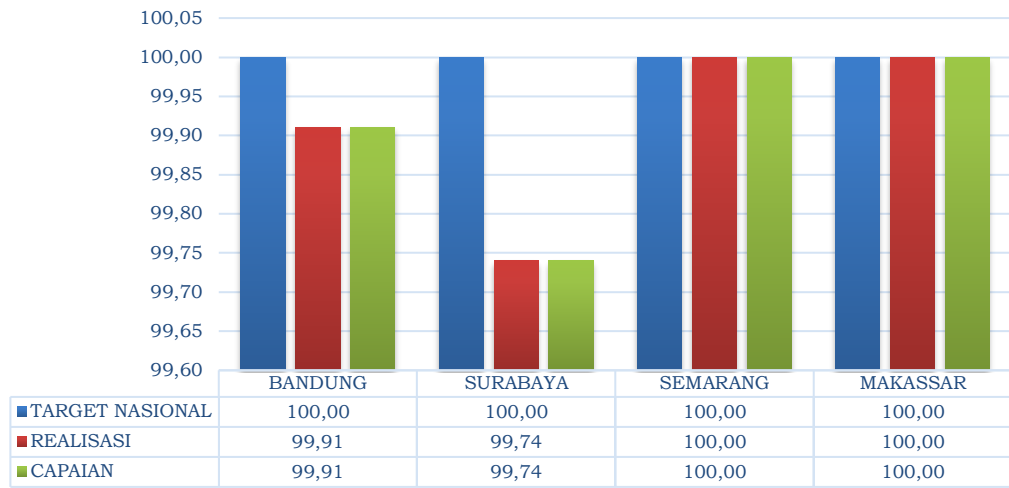
**TABEL 3.107
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI
SESUAI STANDAR” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar	100.00%	99.91%	99.91%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 99.91% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Gambar 3.98 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Balai Lain dan Target Nasional



Jika dibandingkan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar pada tahun 2022 dengan target nasional (100.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (100.00%), Balai Besar POM di Makassar (100.00%), Balai Besar POM di Bandung (99.91%) dan Balai Besar POM di Surabaya (99.74%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas pencapaian kinerja disebabkan oleh:

- ☛ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 100,00% dan realisasinya sebesar 100,35% (1162 sampel dari 1158 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan adalah 100,00% dan realisasinya mencapai 99,48% (1517 sampel dari 1525 sampel yang diuji). Jadi realisasi sampel yang diuji masih dibawah target hal ini karena sampel.
- ☛ Persentase sampel yang diperiksa sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah memenuhi target. Sedangkan persentase sampel yang diuji sesuai standar pengujian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 belum memenuhi target. Akan tetapi, terjadi peningkatan realisasi sampel makanan yang diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga 2022 (pada tahun 2020 sebesar 77.20%, tahun 2021 sebesar 83,52% dan tahun 2022 sebesar 99.48%).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- ☛ Pemenuhan sampel makanan yang diuji sesuai standar bisa dipenuhi sesuai target akhir tahun (100%), apabila ada penambahan peralatan laboratorium sesuai standar GLP. Sampel makanan yang diuji laboratorium bisa melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP, karena adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT, AAS dan GCMS.
- ☛ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☛ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☛ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.108
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	99.91	99.91	198,256,000	196,863,134	99.30	1.01	0.01	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 0.01 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja, antara lain:

- 🏠 Pemenuhan sampel makanan yang diuji sesuai standar bisa dipenuhi sesuai target (100%), apabila ada penambahan peralatan laboratorium sesuai standar GLP. Sampel makanan yang diuji laboratorium bisa melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP, karena adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT, AAS dan GCMS.
- 🏠 Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- 🏠 Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Pada tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia pangan melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022; 3). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD dalam Kecap secara GC-MS) tanggal 6-10 Juni 2022; 4). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian Residu Pestisida dalam Air) tanggal 13-17 Juni 2022; 5). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Penetapan Kadar Simultan Logam Berat dalam AMDK dengan metode ICP-MS) tanggal 8-12 Agustus 2022.
- 🏠 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator dan Subkoordinator.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.109
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindaklanjuti		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2022 adalah 75,80%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP Tahun 2023	Desember 2023
b Terjadi antrian alat karena pemenuhan peralatan yang masih kurang sehingga dilakukan penyesuaian dengan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan		
c Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian sebagai berikut: 1. Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD dalam Kecap secara GC-MS) tanggal 6-10 Juni 2022 2. Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian Residu Pestisida dalam Air) tanggal 13-17 Juni 2022 3. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Penetapan Kadar Simultan Logam Berat dalam AMDK dengan metode ICP-MS) tanggal 8-12 Agustus 2022 4. Bimbingan Teknis Analisis DNA 9-13 Mei 2022 5. Bimbingan Teknis		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
	Internal Analisis DNA 18-22 Juli 2022		
d Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monev timeline pengujian makanan		

SASARAN KEGIATAN KE-7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, namun dilakukan penyesuaian terhadap capaian sebesar 129.31% menjadi sebesar **120,00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.110.

**TABEL 3.110
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,00%	86.64%	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

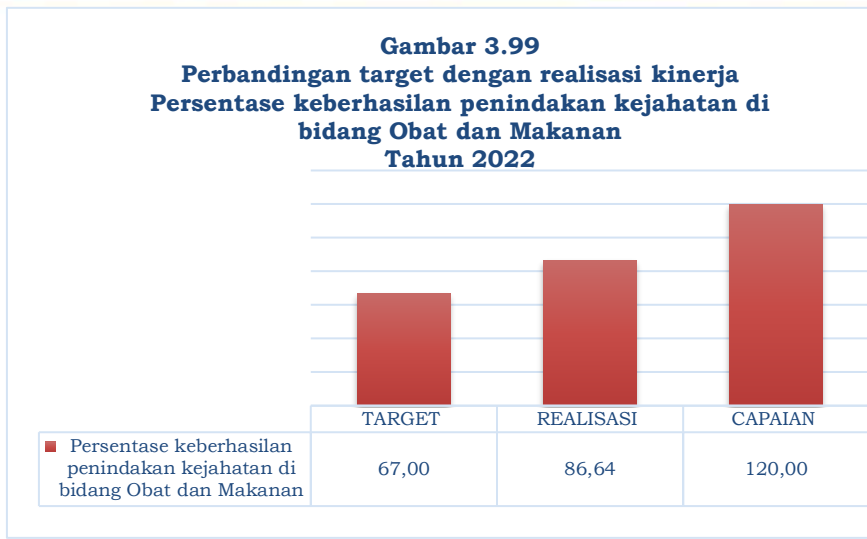
Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

**TABEL 3.111
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG
OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,00%	86.64%	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 67.00%, sedangkan realisasi sebesar 86.64%.

Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 129.31%, namun capaian disesuaikan menjadi 120.00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

TABEL 3.112
PENGUKURAN KINERJA
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG
OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022

Tahapan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over							
SPDP	10	9	1	2	1.00		0.15	15.00%	82.30%	105.26%	86.64
Tahap I			2	3	0.91	0.45	0.4	37.49%			
P21			0	4	0.73	0.30	0.3	21.25%			
Tahap II			8	2	0.73	0.10	0.15	8.56%			
Total	10	9	11	9							

Pada tahun 2022, sebanyak 11 perkara yang ditangani oleh Balai Besar POM di Bandung dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.113
PERKARA YANG DITANGANI BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2022

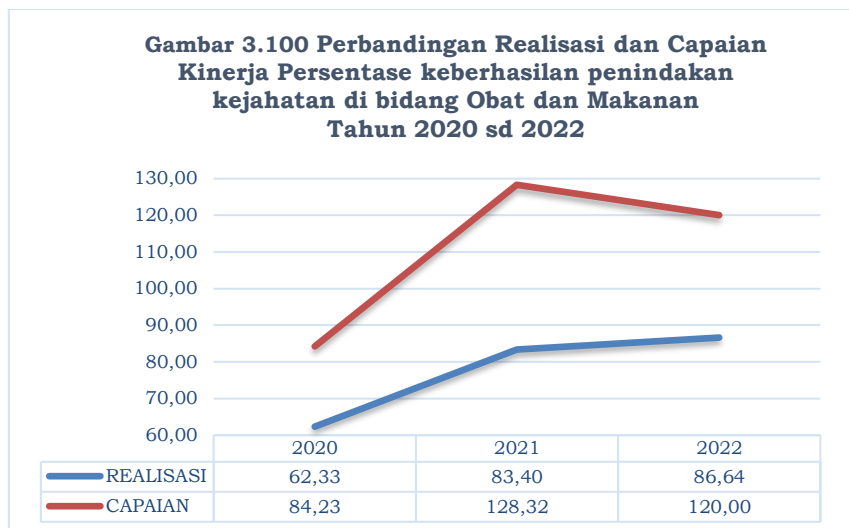
NO	Jenis	Wilayah	Nilai Barang Bukti (Rp)
1	Obat	Kabupaten Garut	639.898.004,-
2	Obat Tradisional	Kota Bandung	81.064.000,-
3	Kosmetika	Kota Bandung	1.054.873.000,-
4	Kosmetika	Kota Bandung	1.427.168.000,-
5	Kosmetika	Kabupaten Sumedang	3.489.540.000,-
6	Kosmetika	Kota Bandung	451.210.000,-
7	Pangan	Kabupaten Bogor	196.615.000,-
8	Pangan	Kabupaten Bogor	55.835.000,-
9	Pangan	Kabupaten Bogor	16.060.000,-
10	Pangan	Kota Depok	30.272.000,-

NO	Jenis	Wilayah	Nilai Barang Bukti (Rp)
11	Pangan	Kabupaten Bogor	67.441.000,-
TOTAL			7.509.976.004,-

Dari 11 perkara yang ditangani oleh Balai Besar POM di Bandung, sebagian besar sudah dilakukan tahap 2 dan masih ada beberapa perkara yang sudah P21. Sebagian besar perkara dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan tidak menjadi carry over perkara ditahun setelahnya.

H. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penting meningkatnya capaian kinerja di tahun 2022 adalah selesainya banyak perkara sampai Tahap 2 di tahun berjalan dan selesainya perkara carry over dari tahun sebelumnya di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya hubungan lintas sektor dengan stakeholder terkait yaitu Criminal Justice System (CJS) terutama pihak kejaksaan. Selain itu, pada tahun 2022 target perkara yang ditetapkan adalah 10 perkara sedangkan Kelompok Substansi Penindakan mampu menangani 11 perkara melebihi target yang ditetapkan. Hal ini bisa dilakukan karena semakin membaiknya hubungan antara pihak terkait sebagai jejaring informasi baik internal ataupun eksternal Badan POM dalam menginformasikan target-target operasi yang potensial untuk dilakukan penindakan. Pengelolaan manajemen yang semakin baik juga berkontribusi dalam peningkatan capaian kinerja tahun 2022. Kemampuan organisasi beradaptasi dengan dengan cepat dalam kondisi pandemi Covid-19 juga memberikan keleluasaan personel di lapangan dalam melakukan kegiatan.



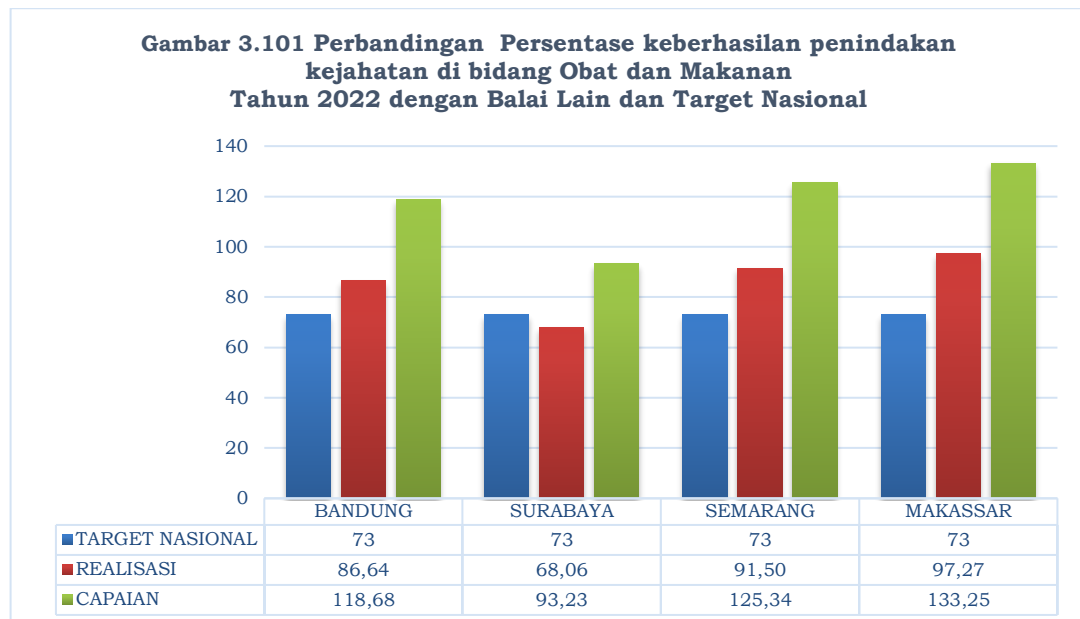
I. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.114
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG
OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,00%	86.64%	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 122.02%, namun karena capaian kinerjanya diatas 120.00% maka dilakukan penyesuaian menjadi 120.00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan reviu kembali terhadap target Renstra Tahun 2020-2024.

J. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 dengan target nasional (73.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (133.25%), Balai Besar POM di Semarang (125.34%), Balai Besar POM di Bandung (118.68%) dan Balai Besar POM di Surabaya (93.23%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Analisis penyebab peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- 🏠 Semakin meningkatnya hubungan baik dengan lintas sektor secara berkelanjutan. Beberapa pendekatan baru yang dilakukan dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor cukup efektif memperkuat hubungan dengan lintas sektor. Hubungan dengan lintas sektor yang baik berpengaruh dalam kelancaran penyelesaian berkas perkara yang ditangani pada Tahun 2022
- 🏠 Jejaring informasi terkait target penindakan semakin kuat dan luas. Semakin kuat dan luasnya jejaring informasi yang terbentuk membuat informasi target penindakan yang diterima semakin banyak dan valid. Hal ini sangat menguntungkan dalam penentuan target operasi intelijen yang nantinya akan menjadi target penindakan
- 🏠 Adanya informasi tambahan dari pengembangan kasus yang sedang ditangani
- 🏠 Terjaganya integritas personel penindakan. Permasalahan integritas pada triwulan sebelumnya telah dievaluasi dan diperbaiki.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- 🏠 Mempertahankan hubungan baik dengan pejabat struktural di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dan Kejati Jabar untuk kelancaran kegiatan penindakan dan pemberkasan tindak pidana bidang obat dan makanan
- 🏠 Menjaga hubungan baik dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat khususnya Korwas PPNS Polda Jawa Barat
- 🏠 Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pengembangan kasus sebelumnya, pelaporan dari masyarakat melalui infokom yang diteruskan ke kelompok substansi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara

- ☛ Mengembangkan dan membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah Jawa Barat
- ☛ Melakukan sistem komunikasi terbatas dalam penentuan target intelijen dan operasi penindakan serta melakukan rotasi atau penggantian terhadap petugas yang bertugas dalam pembuatan surat perintah tugas investigasi dan surat perintah operasi penindakan

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.115
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG
OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.00	86.64	120.00	1,164,622,000	1,164,445,466	99.98	1.20	0.20	100%

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 0.20 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-7, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Intelijen di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

☛ Penyidikan Obat dan Makanan

Pada tahun 2022, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 11 perkara yang dilakukan proses projusticia. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



Gambar 3.102 Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

☛ Intelijen

Kegiatan intelijen obat dan makanan adalah aktivitas intelijen yang bersifat rutin sehari-hari, disusun, diorganisasikan dan disesuaikan dengan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta sasaran program kerja yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan intelijen didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang merupakan serangkaian tindakan, usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang obat dan makanan yang selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur undang-undang. Kegiatan intelijen dapat berawal dari informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi berdasarkan surat dari

Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan intelijen yang dilakukan pada Tahun 2022 terhadap 36 sarana dengan 15 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Dari jumlah tersebut, 11 sarana ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan pada Tahun 2022 dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 11 kasus Pro-justitia ditangani Balai Besar POM di Bandung dan 4 sarana perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut pada tahun setelahnya.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.116
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Peningkatan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan dalam mengatasi perkembangan modus kejahatan tindak pidana bidang obat dan makanan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi	Sharing Knowledge tentang “Kasus Hukum dengan Tersangka Korporasi” dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 14-16 Desember 2022 Sharing Knowledge tentang “Kasus Hukum dengan Tersangka Korporasi” dengan Komisi Bareskrim POLRI pada tanggal 14-16 Desember 2022		
b Menjaga soliditas dan sinergisme lintas sektor ICJS dalam memaksimalkan upaya penindakan tindak pidana bidang obat dan makanan	Melakukan koordinasi dengan Korwas Direskrimsus Polda Jabar Melakukan koordinasi dengan Korwas Direskrimsus Polda Metrojaya Melakukan koordinasi dengan Diresnarkoba Polda Jabar Melakukan koordinasi dengan Kejati Jawa Barat		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
	<p>Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Bareskrim POLRI</p>		
c	<p>Melakukan penyelesaian carry over perkara tahun 2018,2019 dan 2021</p>	<p>Mengirimkan surat permintaan tanggapan/keterangan terkait penyelesaian carry over perkara tahun 2018,2019 dan 2021</p> <p>Telah diperoleh keterangan terkait berkas perkara carry over tahun 2018,2019 dan 2021</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Aspidum dan staff Kejati Jabar</p>	
d	<p>Melakukan pemeliharaan gudang penyimpanan barang bukti secara memadai serta mengikutsertakan Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) diklat</p>	<p>Melakukan pencatatan inventarisasi barang bukti menggunakan Berita Acara Penerimaan, Berita Acara Pengeluaran, dan Buku Daftar Barang Bukti</p> <p>Melakukan pengecekan barang bukti secara berkala dan didokumentasikan dalam Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Buku Kontrol Barang Bukti</p> <p>Melakukan pemeliharaan gudang termasuk kebersihan gudang, terhindar dari binatang pengerat dan melakukan pemeliharaan lainnya</p>	

SASARAN KEGIATAN KE-8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran, yaitu Indeks RB BBPOM di Bandung dan Nilai AKIP BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 2 (dua)

indikator tersebut, capaian kinerjanya sebesar **100.43%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.37.

TABEL 3.117
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-8
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks RB BBPOM di Bandung	83.80	89.17	106.41%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.50	80.76	94.46%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.43%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2022. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM dengan melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

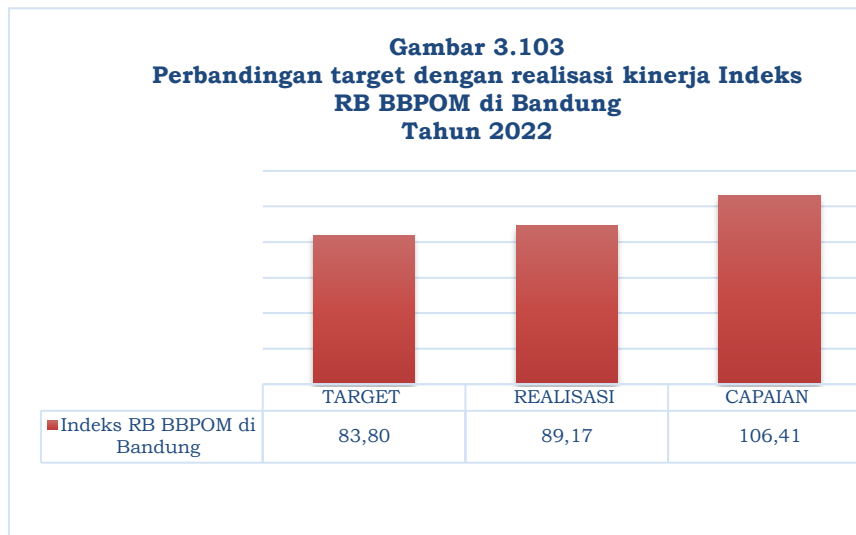
Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang

bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

**TABEL 3.118
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks RB BBPOM di Bandung	83.80	89.17	106.41%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83.80, sedangkan realisasi sebesar 89.17 berdasarkan

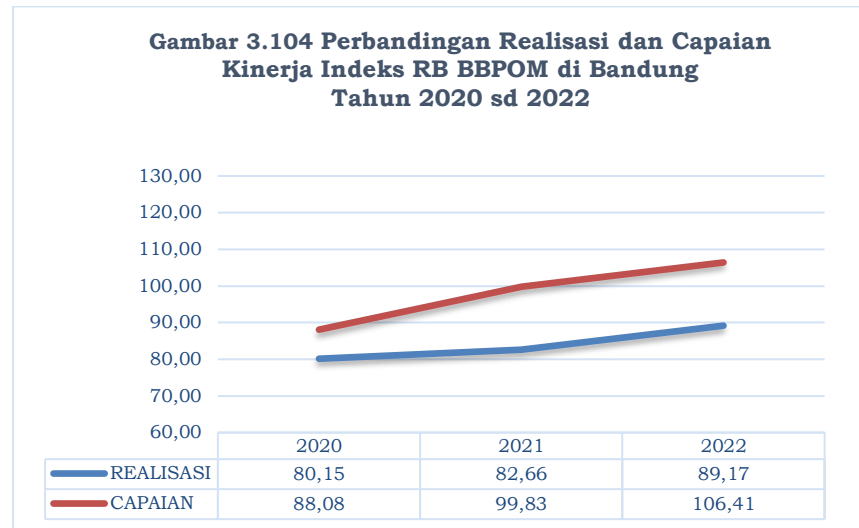
Surat Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.72.10.22.183 tanggal 03 Oktober 2022 Perihal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 106.41% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil PMPZI BBPOM di Bandung secara rinci sebagai berikut:

**TABEL 3.119
PENILAIAN
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

PENILAIAN		BOBOT	ASPEK PEMENUHAN	ASPEK REFORM	TOTAL NILAI	KETERANGAN	
A	PENGUNGKIT	60.00					
	I	Manajemen Perubahan	8.00	3.67	3.67	7.14	MS
	II	Penataan Tatalaksana	7.00	2.92	3.00	5.92	MS
	III	Penataan Sistem Manajemen SDM	10.00	4.81	4.60	9.41	MS
	IV	Penguatan Akuntabilitas	10.00	5.00	3.41	8.41	MS
	V	Penguatan Pengawasan	15.00	7.22	7.5	14.72	MS
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pbluk	10.00	4.57	5.00	9.57	MS	

PENILAIAN		BOBOT	ASPEK PEMENUHAN	ASPEK REFORM	TOTAL NILAI	KETERANGAN
TOTAL PENGUNGKIT					55.37	
B	HASIL	40.00				
I	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.50			17.96	
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17.50			16.71	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5.00			1.25	TMS
	3. Pelayanan Publik yang Prima	17.50			15.84	
II	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17.50			15.84	MS
TOTAL HASIL					33.80	
NILAI PMPZI					89.17	

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021



Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, disebabkan oleh monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan secara berkala, serta seluruh rekomendasi telah dilaksanakan,

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

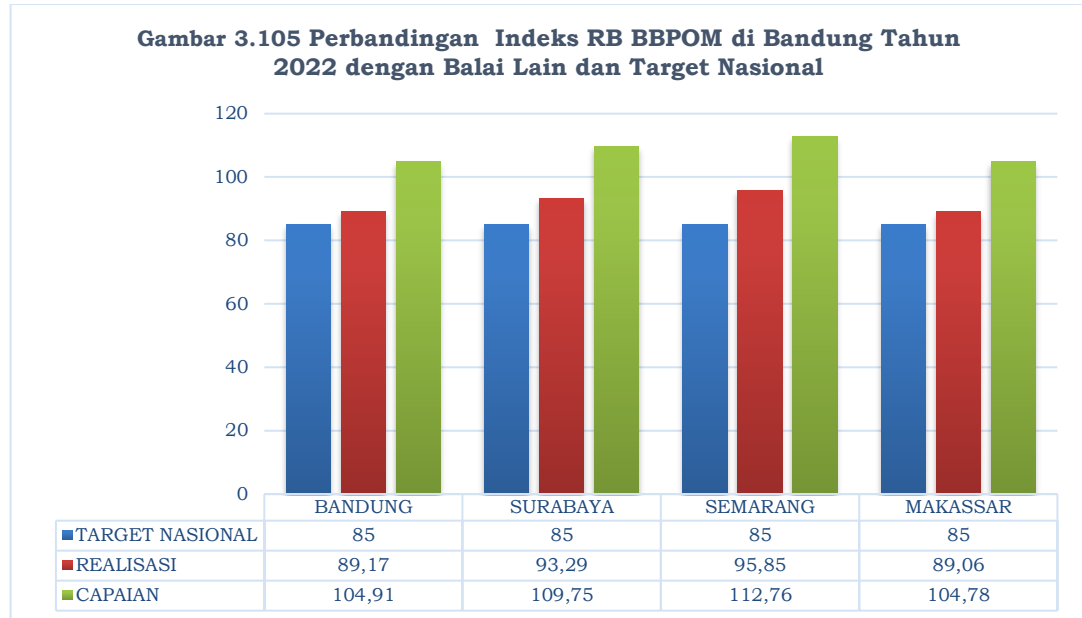
**TABEL 3.120
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks RB BBPOM di Bandung	85.8	89.17	103.92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks RB BBPOM di Bandung pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian

kinerjanya sebesar 103.92% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap target Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Indeks RB BBPOM pada tahun 2022 dengan target nasional (85.00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (112.76%), Balai Besar POM di Surabaya (109.75%), Balai Besar POM di Bandung (104.91%) dan Balai Besar POM di Makassar (104.78%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☛ Telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan termasuk penetapan Target Prioritas;
- ☛ Telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan dan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- ☛ Unit Kerja telah melakukan penataan sistem manajemen SDM secara memadai mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, rekrutmen

mengacu pada kebutuhan, mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;

- 🏠 Pimpinan Unit telah terlibat dalam pengelolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja, selain itu pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh sebagian besar SDM yang kompeten;
- 🏠 Upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan dengan cukup baik diantaranya dengan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;
- 🏠 Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah) diantaranya SiPeta dan Bandung Smart Connection (BSC) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi seputar BBPOM di Bandung misalnya informasi layanan publik, alur pendaftaran dan lainnya

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.72.10.22.183 tanggal 03 Oktober 2022 Perihal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 antara lain:

- 🏠 Melaksanakan internalisasi core value ASN terbaru secara menyeluruh dan menuangkannya bentuk penerapannya kedalam SOP setiap kegiatan yang telah dibuat;
- 🏠 Berupaya untuk melakukan validasi dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monev terhadap transformasi digital pada bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan, pelayanan publik yang telah dilakukan;
- 🏠 Mengukur kesenjangan kompetensi dengan memperhitungkan pemenuhan standar kompetensi baik yang bersifat teknis maupun sosio kultural manajerial terhadap seluruh pegawai;
- 🏠 Memanfaatkan hasil capaian/monitoring atas seluruh perjanjian kinerja untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment;
- 🏠 Terus melakukan perbaikan maupun penyempurnaan atas inovasi baik yang sudah ada dan dilakukan dokumentasi yang memadai, serta menyusun analisis dampak kebermanfaatannya atas inovasi terhadap perbaikan Unit Kerja;
- 🏠 Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu mendukung dan meningkatkan ketercapaian target kinerja utama yang mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.121
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks RB BBPOM di Bandung	83.80	89.17	106.41	3,950,203,000	3,949,348,579	99.98	1.06	0.06	100 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Indeks RB BBPOM di Bandung sebesar 0.06 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

a) ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☛ Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung tahun 2022.
- ☛ Forum Group Discussion Konsultasi Publik dan penandatanganan komitmen bersama lintas sector.
- ☛ Inovasi Pelayanan Publik antara lain LACAK PASTI, KELOM GEULIS, KABAYAN, SIPETA, SI ITEUNG, WARTA POPA, MELODI POPA, Kerjasama TV dan Radio Desa dalam Iklan Layanan Masyarakat, , Layanan Sertifikasi secara Daring, Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola. Beberapa inovasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada subsite BBPOM di Bandung yang berisi berbagai link aplikasi dan media pelayanan publik seperti LACAK PASTI, BIC, KABAYAN, SI ITEUNG, LAPOR, Sertifikasi UMKM JUARA dll. Dan terintegrasi dengan BANDUNG SMART CITY smarcity.bandung.go.id.
- ☛ Inovasi Internal yang dapat diakses portal GEULIS seperti SIADO, SIMANGGA, SIDAKEP, BIC, SIPT, SIASN, SIPETA, KMS dll. Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja tersebut secara berkala (bulanan).
- ☛ Pemanfaatan berbagai media sosial yang dimiliki BBPOM di Bandung sebagai media komunikasi publik untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan, kinerja dan KIE Obat dan Makanan yang terkini dll.

b) TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.122
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Mengembangkan inovasi yang telah dibangun secara berkelanjutan dalam hal penguatan integritas dan sistem pelayanan untuk mewujudkan WBBM	Monitoring dan Evaluasi efektifitas inovasi yang telah dibangun secara berkala dan melakukan pengembangan inovasi-inovasi lainnya khususnya dalam hal penguatan integritas dan sistem pelayanan		
b Membangun unit kerja dengan orientasi pelayanan prima sehingga dapat menjadi unit kerja percontohan, baik di lingkup BPOM maupun di lingkup antar instansi pemerintah	BBPOM di Bandung mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2022 dari BPOM dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,67 Tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2022		
c Memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal	Melengkapi data dukung tindaklanjut rekomendasi dan mengupload data dukung tersebut pada aplikasi SAPA APIP, serta berkoordinasi dengan PIC Auditor Inspektorat Utama BPOM.		
d Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja	Pengembangan inovasi-inovasi sesuai karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan		

2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

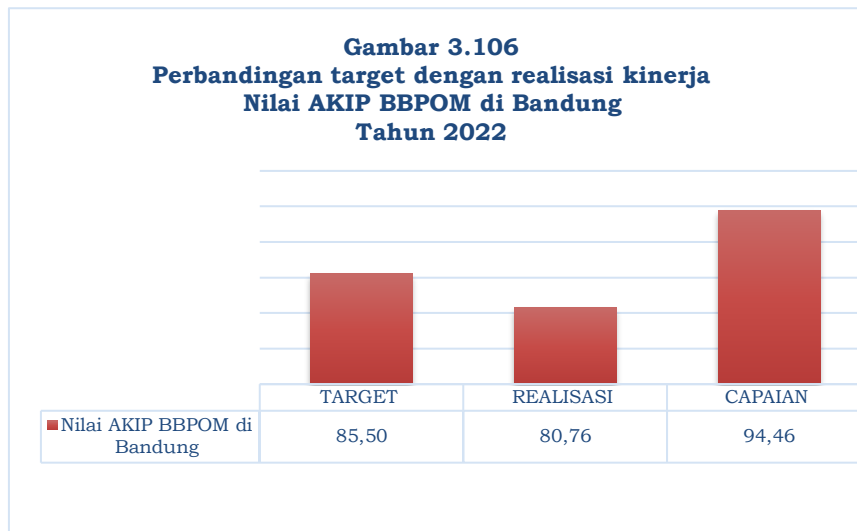
SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada

pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.123
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.50	80.76	94.46%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85.50, sedangkan realisasi sebesar 80.76%

berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.72.02.23.61 tanggal 10 Februari 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 94.46%, dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 dapat dikategorikan **A (Memuaskan)**. Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan

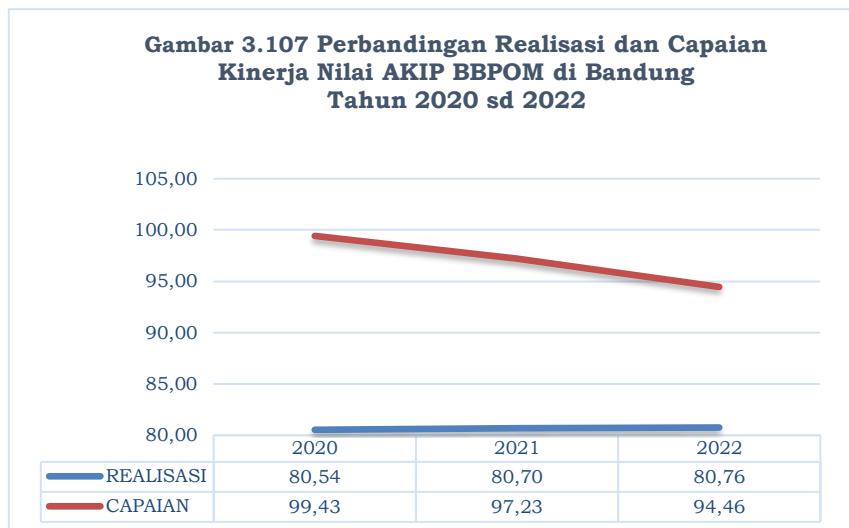
capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Balai Besar POM di Bandung, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 3.124
PENILAIAN
“NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	24	19,68
2	Pengukuran Kinerja	24	21,60
3	Pelaporan Kinerja	12	10,08
4	Evaluasi Internal	20	16,40
5	Capaian Kinerja	20	13,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,76
Tingkat Akuntabilitas			A

E. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan seluruh rekomendasi peningkatan capaian kinerja telah dilaksanakan antara lain : Reviu Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, adanya aplikasi SIMAKIN dalam penyusunan perencanaan kinerja hingga monitoring dan evaluasinya, pengukuran dan pelaporan dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala.



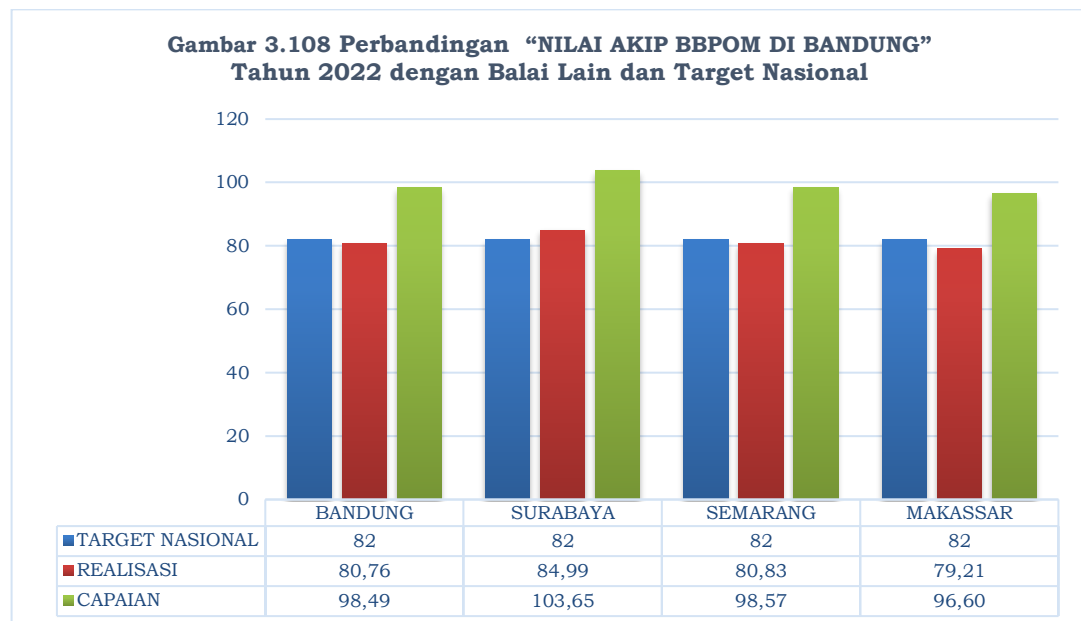
F. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.125
PERBANDINGAN REALISASI
“NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	90.5	80.76	89.23	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandung pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 89.23% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif). Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan revaluasi kembali terhadap target Renstra Tahun 2020-2024 karena target terlalu tinggi.

G. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL



Jika dibandingkan realisasi Nilai AKIP BBPOM di Bandung pada tahun 2022 dengan target nasional (82.00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (103.65%), Balai Besar POM di Semarang (98.57%), Balai Besar POM di Bandung (98.49%) dan Balai Besar POM di Makassar (96.60%).

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Analisis penyebab peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

🏠 Perencanaan

Balai Besar POM di Bandung telah membuat dokumen Renstra tahun 2020-2024 yang memuat sasaran dan tujuan yang berorientasi hasil serta setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Namun beberapa pemetaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja kurang memadai serta adanya perbedaan target indikator "Persentase Obat yang Aman" pada Laporan Kinerja dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021.

🏠 Pengukuran

Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), serta melakukan pengukuran target kinerja setiap bulannya namun SOP Manajemen Kinerja belum mencakup mekanisme penginputan data kinerja pada aplikasi internal dan apabila terjadi kesalahan data kinerja.

🏠 Pelaporan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung telah disusun secara berkala dengan menyajikan informasi kinerja tentang pencapaian kinerja serta telah dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu pada website esr.menpan.go.id. Namun belum ada penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan/ atau penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.

🏠 Evaluasi Internal

Balai Besar POM di Bandung telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja namun masih terdapat kelemahan pada laporan evaluasi internal dan laporan interim tahun 2022 yaitu tidak terdapat rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian target kinerja.

🏠 Capaian Kinerja

a. Output

Capaian kinerja output tahun 2021, sebanyak 4 (21,05%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding capaian kinerja tahun 2020.

b. Outcome

Capaian kinerja outcome tahun 2021 sebanyak 16 (58,62%) indikator kinerja tidak mencapai target dan sebanyak 14 (51,72%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding capaian kinerja tahun 2020.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- 🏠 **Perencanaan Kinerja**
 - a. Melakukan reviu Renstra terkait pemetaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja.
 - b. Melakukan reviu secara memadai agar indikator dan target pada Renstra, RKT, PK dan RAPK selaras.
- 🏠 **Pengukuran Kinerja**

Melakukan perbaikan terhadap SOP Manajemen Kinerja terkait mekanisme penginputan data kinerja pada aplikasi internal dan apabila terjadi kesalahan data kinerja.
- 🏠 **Pelaporan Kinerja**

Mencantumkan penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan/atau penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
- 🏠 **Evaluasi Internal**

Laporan evaluasi internal dan laporan interim agar mencantumkan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 🏠 **Capaian Kinerja**
 - a. Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur.
 - b. Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.

G. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

TABEL 3.126
TINGKAT EFISIENSI
“NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.50	80.76	94.46	6,630,000	6,630,000	100.00	0.94	-0.06	75 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar -0.06 (75.00%) dengan kriteria kurang efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Sehingga Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi yang telah disusun sehingga pada periode selanjutnya capaian kinerja meningkat. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap target Renstra Tahun 2020-2024, karena target terlalu tinggi.

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pembentukan Tim Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung tahun 2022, serta pengembang aplikasi MANEKIN yang sebelumnya berupa google.site menjadi website.
2. Reviu terhadap SOP mikro Manajemen Kinerja dan Pengelolaan Keuangan.
3. Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja.

I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.127
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
1 PERENCANAAN			
a Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM	Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024		
b Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	Telah disusun Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024		
2 PENGUKURAN			
a Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.	Telah disampaikan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor BOT.01.02.12A.12A5.06.22.1622 perihal Penyampaian Masukan untuk Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan tanggal 17 Juni 2022 kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Ditanggapi dengan Surat Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : B-PR.08.01.21.213.07.22.232 perihal Tanggapan atas Masukan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan tanggal 29 Juli 2022.		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
b Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Surat Edaran Nomor : KP.09.01.2.24.01.22.01 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS dalam Penilaian Kinerja Individu melalui Aplikasi SIMAKIN BPOM Sebagai Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan SE tersebut, pada tahun 2022 telah disusun SKP setiap individu berdasarkan indikator kinerja tingkat unit. Pengukuran dan penilaian kinerja individu dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi SIMAKIN tersebut yang menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.		
3 PELAPORAN			
Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Interim merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam melakukan Reviu Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 (penetapan target). Selain itu, dalam analisa keberhasilan dan kegagalan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana tindaklanjut dalam upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya		
4 EVALUASI INTERNAL			
a Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.	Melengkapi monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi		

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
b Melengkapi rencana aksi tindak lanjut yang dituangkan pada laporan evaluasi berkala dan/atau laporan kinerja interim dengan Person in Charge (PIC) maupun timeline penyelesaian tindak lanjut.	Melengkapi Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, Laporan Kinerja Tahunan dengan rekomendasi, PIC dan timeline penyelesaian tindaklanjut		
5 CAPAIAN KINERJA			
Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal secara optimal.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya		

SASARAN KEGIATAN KE-9

TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran, yaitu indeks profesionalitas ASN BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, capaian kerjanya sebesar **107.38%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.128.

TABEL 3.128
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-9
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80.00	85.90	107.38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			107.38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG

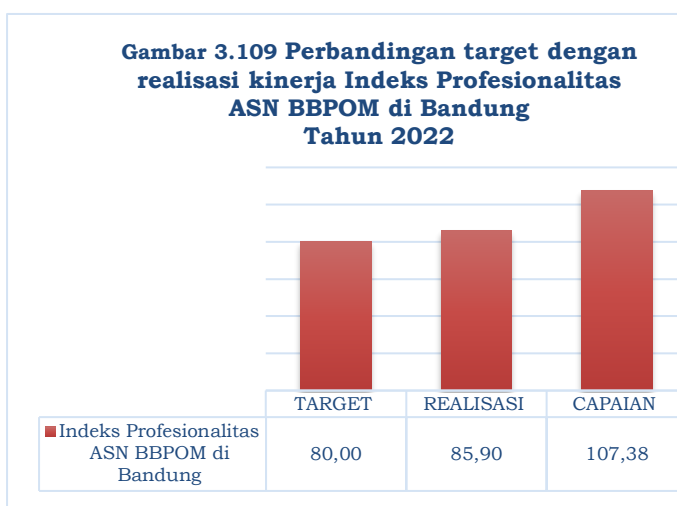
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Pengukuran IP-ASN tahun 2022 diukur pada akhir tahun menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/ipasn>. Selain itu, hasil pengukurannya disampaikan melalui Surat Sekretaris Utama Nomor: B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 tanggal 27 Januari 2023, perihal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.129
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80.00	85.90	107.38%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Gambar 3.109 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung Tahun 2022



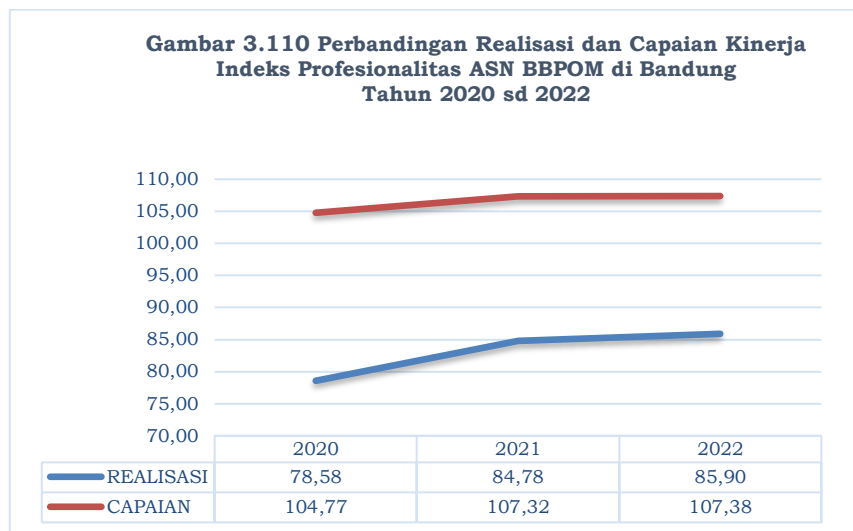
Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80.00, sedangkan realisasi sebesar 85.90. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 107.38% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Secara umum,

capaian IKU IP-ASN merupakan gambaran bahwa sasaran strategis Badan POM untuk terwujudnya SDM yang berkinerja optimal dapat direalisasikan. Sebagaimana diuraikan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN, semakin tinggi realisasi IP-ASN dapat diartikan pula kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN BBPOM di Bandung semakin baik. Pada akhirnya, dengan SDM yang berkinerja optimal, seluruh tugas pokok dan fungsi BBPOM di Bandung dapat dilaksanakan dengan optimal.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan semakin meningkatnya sinergi berupa arahan serta monitoring dan evaluasi pimpinan, selain itu kerjasama yang baik dari tim kepegawaian dan seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk pemenuhan komponen IP-ASN seperti pelaksanaan pengembangan kompetensi, kedisiplinan, dan capaian kinerja



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.130
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

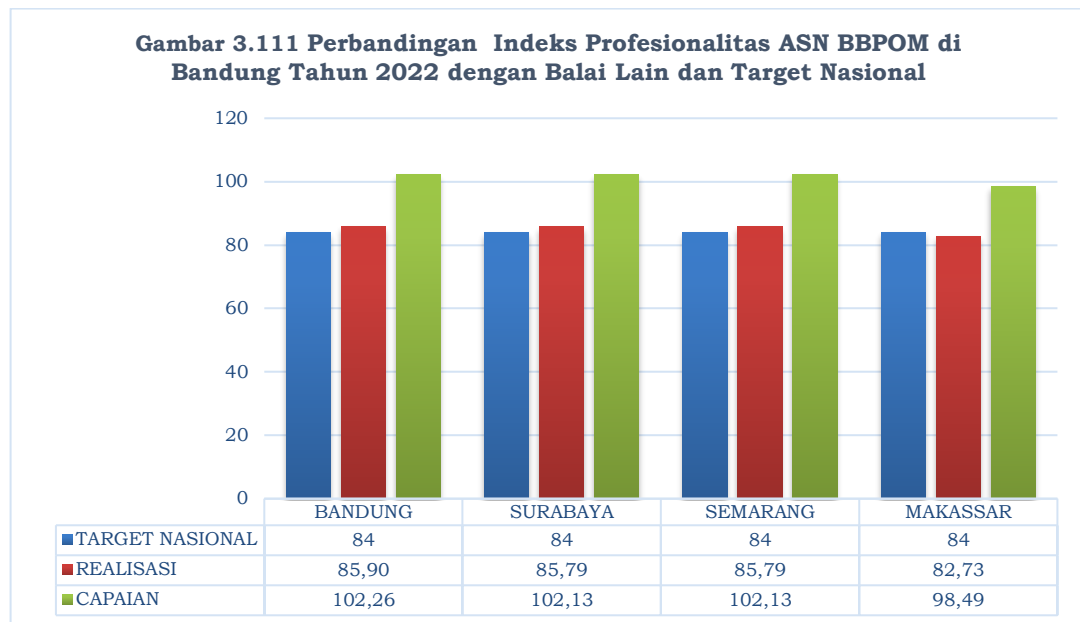
INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	82.00	85.90	104.75%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai

pencapaian kinerjanya sebesar 104.75% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian kinerja dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun. Selain itu, perlu dilakukan reviu kembali terhadap target Renstra Tahun 2020-2024.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Jika dibandingkan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung pada tahun 2022 dengan target nasional (84.00), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (102.26%), Balai Besar POM di Surabaya (102.13%), Balai Besar POM di Semarang (102.13%) dan Balai Besar POM di Makassar (98.49%). Sedangkan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Badan POM pada tahun 2022 sebesar 84,78, jika dibandingkan maka hanya BBPOM di Makassar yang realisasinya dibawah realisasi Indeks Profesionalitas ASN Badan POM.



E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kebahasan atas peningkatan kinerja disebabkan oleh:

🏠 Dimensi Kualifikasi Pendidikan:

Dimensi Kualifikasi Pendidikan mempunyai bobot 25%, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan Pegawai, maka semakin tinggi IP-ASN dimensi Kualifikasi Pendidikan, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut,

BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 16,50 (enam belas koma lima puluh). Upaya yang dilakukan BBPOM di Bandung memfasilitasi peserta Tugas Belajar serta Ijin Belajar untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Pada TW4 tahun 2022 ada sejumlah 7 (tujuh) Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar dan 6 (enam) pegawai Ijin Belajar.

DIMENSI 01 KUALIFIKASI			
Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kualifikasi	Riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS	25%	
	S-3		25
	S-2		20
	S-1/D-IV		15
	D-III		10
	SLTA/D-III/D-IV/Sederajat		5
	Dibawah SLTA		1

🏠 Dimensi Kompetensi:

Dimensi Kompetensi mempunyai bobot 40%, yang terdiri atas Kompetensi Diklat Kepemimpinan/ Fungsional, Diklat teknis 20 JP, Seminar/Workshop/ Magang/ dan sejenisnya bagi Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana). BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 37,96% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh enam).

Pemenuhan persyaratan Diklat Fungsional Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan difasilitasi aplikasi IDEAS. Sedangkan melalui target SKP Pengembangan Kompetensi 20 JP untuk seluruh pegawai sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi. Selain itu, program Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional, terutama PFM, juga berpengaruh dalam peningkatan Kompetensi Pegawai

DIMENSI 02 KOMPETENSI 07			
Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40%	
	Diklat Kepemimpinan (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas)		15
	Sudah		15
	Belum		0
	Diklat Fungsional (PNS yang menduduki jabatan fungsional)		15
	Sudah		15
	Belum		0

🏠 Dimensi Kinerja:

Dimensi Kinerja mempunyai bobot 30% (tiga puluh), yang terdiri atas Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 25% (dua puluh lima) atau indikator “Baik”.

Capaian Kinerja seluruh Pegawai yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel oleh seluruh pegawai dan pemberi masukan penilaian oleh Koordinator dan Plh. Kepala Bagian Tata Usaha melalui aplikasi SIMAKIN.

DIMENSI : U3 KINERJA			
Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kinerja	Riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30%	
	91 - 100		30
	76 - 90		25
	61 - 75		15
	51 - 60		5
	50 ke bawah	1	

🏠 Dimensi Disiplin:

Dimensi Disiplin mempunyai bobot 5%, yang terdiri atas Data Informasi Pegawai yang pernah mendapat hukuman disiplin. BBPOM di Bandung mencapai rata-rata 4,94% (empat koma sembilan empat). Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung-

DIMENSI : U4 DISIPLIN			
Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Disiplin	Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima	5%	
	Tidak Pernah		5
	Ringan		3
	Sedang		2
	Barat		1

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor: B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 tanggal 27 Januari 2023, perihal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022, yaitu:

- ☛ Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.
- ☛ Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

J. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.131
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80.00	85.90	107.38	27,229,129,000	27,145,568,235	99.69	1.08	0.08	100 %

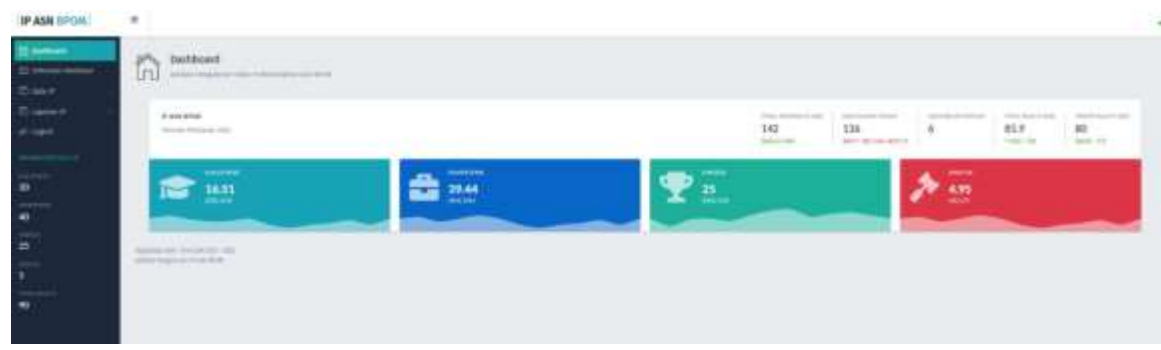
Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 0.08 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IP-ASN:

- ☛ Fasilitasi pendaftaran, serta monitoring evaluasi berkala tugas belajar dan ijin belajar pegawai melalui SIASN;
- ☛ Pemanfaatan aplikasi IDEAS untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi secara daring dan tidak terjadwal;
- ☛ Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi berkala pengembangan kompetensi seluruh pegawai
- ☛ Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi berkala pengisian Sasaran Kinerja Pegawai;
- ☛ Sosialisasi dan Pelaporan Disiplin secara berkala tepat waktu setiap bulan.

☞ Pemanfaatan fitur aplikasi IP-ASN di SIASN untuk memudahkan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengukuran IP-ASN.



H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.132
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Pelaporan Pegawai yang telah selesai tugas belajar tahun 2022 (2 pegawai) Monev pegawai sedang tubel (7 pegawai) dan ijin belajar (6 pegawai)	Pada akhir tahun 2022, terdata sejumlah 9 Pegawai melaksanakan tugas belajar dan 6 pegawai melaksanakan ijin belajar, dimana hasil monev dan pelaporan menunjukkan tubel/ibel dilaksanakan dengan baik	-	-
b Monev Pengembangan Kompetensi 2022 dan capaian target 20 JP	Pada akhir tahun 2022 seluruh pegawai mencapai target pengembangan kompetensi yang ditentukan, terutama dengan tersedianya aplikasi IDEAS	-	-
c Monev pengisian SKP melalui aplikasi SIMAKIN 2022	Capaian SKP tahun 2022 seluruh pegawai adalah "baik atau sangat baik" dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu	-	-
d Monev akumulasi disiplin kehadiran 2022 dan sosialisasi peraturan disiplin kepada seluruh pegawai	Pada tahun 2022 tidak ada SK pelanggaran disiplin yang diterbitkan dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu	-	-

SASARAN KEGIATAN KE-10

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP yang diukur pada akhir tahun dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **109.05%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.133.

**TABEL 3.133
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%	82.40%	98.10%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.88	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			109.05%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan

oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

👉 Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).

👉 Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.

👉 Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

3. Penilaian Standar Peralatan

👉 Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.

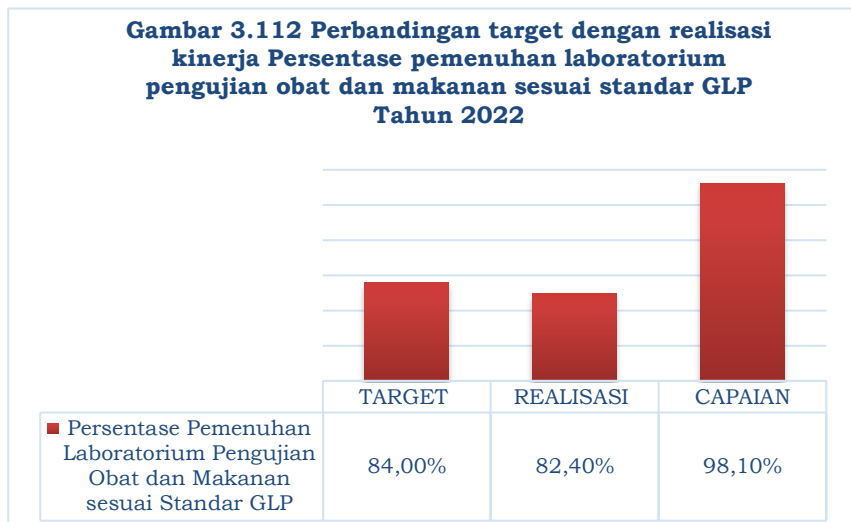
👉 Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.

👉 Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.134
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
SESUAI STANDAR GLP”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%	82.40%	98.10%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

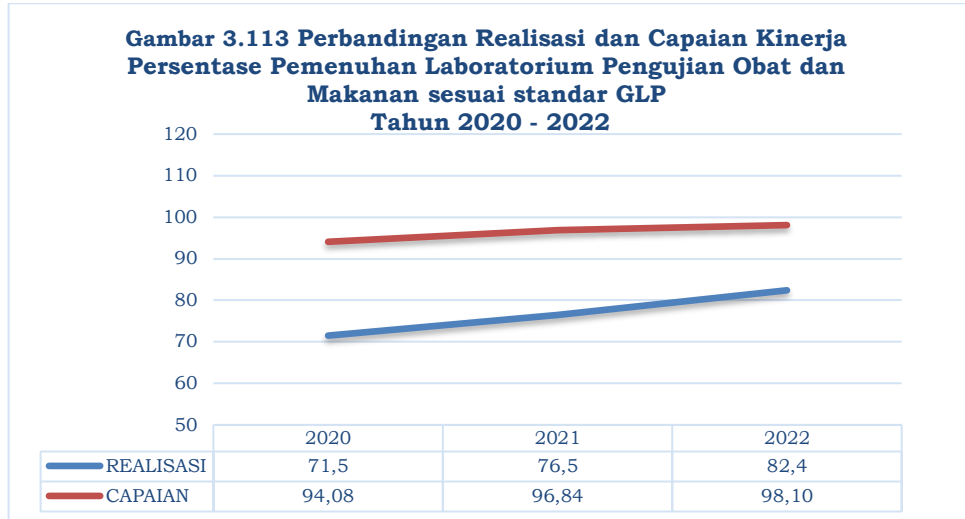


Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84,00%. Persentase pemenuhan laboratorium pada tahun 2022 sebesar

82,40%, Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **98,10%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pemenuhan standar ruang lingkup, standar kompetensi dan standar peralatan. Persentase pemenuhan standar ruang lingkup tahun 2020 sebesar 66.60%, tahun 2021 sebesar 73.50%, dan tahun 2022 sebesar 85.40%. Persentase pemenuhan standar kompetensi tahun 2020 sebesar 81.50%, tahun 2021 sebesar 84.40% dan tahun 2022 sebesar 86.10%. Persentase pemenuhan standar peralatan tahun 2020 sebesar 66.40, tahun 2021 sebesar 71.60% dan tahun 2022 sebesar 75.80%.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.135
PERBANDINGAN REALISASI
“PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
SESUAI STANDAR GLP” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

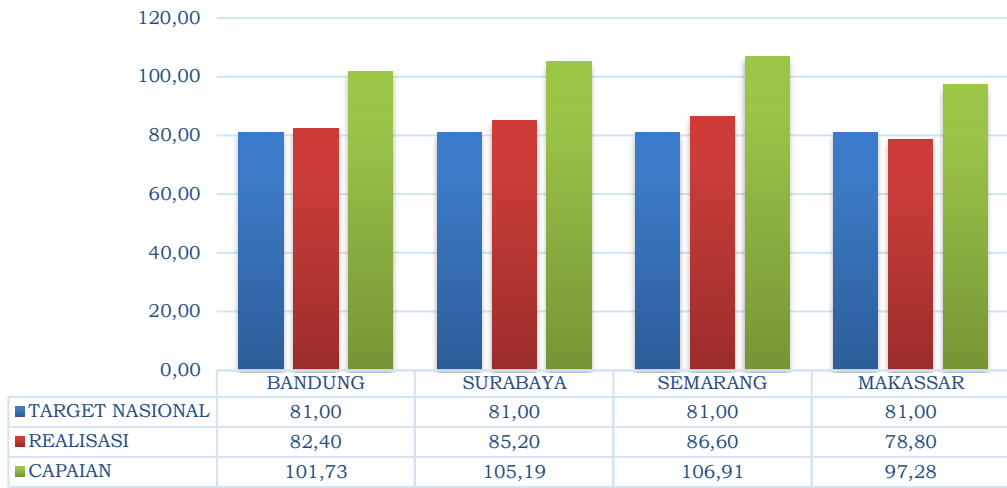
INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	94.00%	82.40%	87.66%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP pada tahun 2022 terhadap target akhir Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 87.66% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP pada tahun 2022 dengan target nasional (81.00%), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (106.91%), Balai Besar POM di Surabaya (105.19%), Balai Besar POM di Bandung (101.73%) dan Balai Besar POM di Makassar (97.28%).

Gambar 3.114 Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2022 dengan Balai Lain dan Target Nasional



E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan atas pencapaian kinerja disebabkan oleh:

☞ Untuk pemenuhan Standar Ruang Lingkup:

Kimia: SRL Obat Nappza: sampel yang masuk RL banyak tidak tersampling karena sulit diperoleh dipasaran, dan yang bisa tersampling pun terkendala dengan kemampuan uji karena BBP dan kolom belum tersedia; SRL Pangan: untuk Penetapan Kadar Asam laktat dalam produk susu dan olahannya menggunakan MA PPOMN No. 19/PA/08 tidak dapat dipenuhi karena tidak berhasil dilakukan. Dalam matriks sampel susu fermentasi peak baku berdekatan dengan pengotor sampel sehingga harus dilakukan pengembangan metode; SRL OTSK: Untuk Penetapan Kadar Orlistat menggunakan LC MS/MS sedangkan terdapat MA terbaru dapat menggunakan KCKT. Untuk acuan masih banyak MA nya belum tersedia (MA 2022); SRL Kosmetik: BBP belum tersedia.

Mikrobiologi : SRL Obat : untuk Sediaan Inhalasi (Sediaan Cair untuk Nebulisasi) belum dilakukan verifikasi MA karena tidak dilakukan sampling dan tidak termasuk kelas terapi sampling Regional, Untuk SRL Potensi Antibiotik terdapat Metode Analisa yang belum diverifikasi, seperti vancomycin dan Neomycin Polymixin B/Neomycin Basitrasin, karena tidak masuk dalam prioritas sampling pengujian mikrobiologi; SRL Suplemen Kesehatan : sosialisasi Metoda Analisa Sediaan Suplemen Kesehatan

mengandung probiotik baru dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pemenuhan ruang lingkupnya di jadwalkan di tahun 2023-2024; SRL Pangan : verifikasi Pangan yang ditambahkan bakteri asam laktat dijadwalkan tahun 2023 – 2024.

☛ Untuk pemenuhan standar kompetensi:

Kimia: untuk penilaian kompetensi kimia pangan yang tidak dilakukan seperti uji indeks bias, kadar air (metode karl fisher), kadar air (metode toluene) masih belum terpenuhi karena bukan parameter uji wajib atau ruang lingkup akreditasi. Untuk uji indeks bias juga di komoditi OTSK sudah bukan parameter uji wajib; Untuk penilaian kompetensi kimia obat, pengujian menggunakan spektrofotometri dan uji spesifik menggunakan Ion kromatografi dan LC MS/MS dinilai padahal belum tersedia alatnya; Untuk penilaian kompetensi spesifik, validasi/verifikasi metode sesuai level kompetensi sulit terpenuhi, karena uji spesifik terbatas.

Mikrobiologi : Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Bandung tidak memiliki personel PFM Terampil sehingga parameter pengujian terampil dilakukan oleh PFM Ahli hal ini berpengaruh terhadap capaian nilai DUPAK (tidak bisa klaim nilai lintas jenjang); Adanya regionalisasi menyebabkan laboratorium harus melakukan pengadaan sampel mandiri untuk pemenuhan standar ruang lingkup seperti Uji Potensi Antibiotik, Uji cemaran ALT, AKK, S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans pada sediaan obat nonsteril; Pemenuhan ruang lingkup dan kompetensi uji efektifitas pengawet pada sediaan kosmetik belum dapat dipenuhi karena parameter uji tersebut tidak termasuk dalam parameter wajib dalam pedoman sampling dan belum dilakukan pelatihan.

☛ Untuk pemenuhan standar peralatan:

Kimia: Pemenuhan peralatan masih kurang karena keterbatasan anggaran; ada beberapa alat yang rusak sehingga menurunkan nilai pemenuhan standar peralatan.

Mikrobiologi : Sudah dibuat roadmap untuk pemenuhan standar minimum alat laboratorium tahun 2020 – 2024 tetapi pada tahun 2023 Lab. Mikrobiologi BBPOM di Bandung tidak mendapatkan tambahan anggaran, sehingga pemenuhan standar minimal alat laboratorium tidak akan mengalami kenaikan; terdapat alat laboratorium yang rusak dan memerlukan pemeliharaan tetapi karena anggaran yang terbatas, pengadaan alat terhambat dan hal ini berpotensi untuk menurunkan nilai standar minimal alat laboratorium mikrobiologi.

Mikrobiologi : SRL Obat : untuk Sediaan Inhalasi (Sediaan Cair untuk Nebulisasi) belum dilakukan verifikasi MA karena tidak dilakukan sampling dan tidak termasuk kelas terapi sampling Regional, Untuk SRL Potensi Antibiotik terdapat Metode Analisa yang belum diverifikasi, seperti

vancomycin dan Neomycin Polymixin B/Neomycin Basitrasin, karena tidak masuk dalam prioritas sampling pengujian mikrobiologi; SRL Suplemen Kesehatan : sosialisasi Metoda Analisa Sediaan Suplemen Kesehatan mengandung probiotik baru dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pemenuhan ruang lingkupnya di jadwalkan di tahun 2023-2024; SRL Pangan : verifikasi Pangan yang ditambahkan bakteri asam laktat dijadwalkan tahun 2023 – 2024.

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☛ Pemenuhan Standar Ruang Lingkup: Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, OTSK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada.
- ☛ Pemenuhan Standar Kompetensi: Membuat roadmap pelatihan peningkatan standar kompetensi terutama personil yang nilainya masih rendah dan dirotasi dari fungsi lain masuk ke pengujian, melalui peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☛ Pemenuhan Standar Peralatan: Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di tahun anggaran 2023.
- ☛ Masih tingginya gap pemenuhan peralatan, mengakibatkan antrian peralatan yang sangat tinggi sehingga pemenuhan timeline pengujian juga tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dilakukan pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.136
TINGKAT EFISIENSI
“PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
SESUAI STANDAR GLP”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00	82.40	98.10	8,755,897,000	8,753,417,824	99.97	0.98	-0.02	75 %

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar -0.02 (75.00%) dengan kriteria

tidak efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih besar dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan disebabkan belum terpenuhinya standar peralatan laboratorium, namun dalam pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium membutuhkan anggaran dengan besaran sebagaimana tertera pada tabel tersebut. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain:

- ☛ Untuk pemenuhan standar ruang lingkup tahun 2022 telah dilakukan verifikasi metode analisa sebanyak 42 metode analisa pada laboratorium pengujian kimia dan 11 metode analisa pada laboratorium pengujian mikrobiologi.
- ☛ Untuk pemenuhan Standar Kompetensi tahun 2022, telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis internal dan webinar terkait teknis laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian, antara lain yaitu 1). Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022; 4). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Penentuan Kadar n-Hexan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Massa) tanggal 6-10 Juni 2022; 5). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kosmetik (Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) tanggal 6-10 Juni 2022; 6). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD dalam Kecap secara GC-MS) tanggal 6-10 Juni 2022; 7). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian Residu Pestisida dalam Air) tanggal 13-17 Juni 2022; 8). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium dan Kalsium dalam Infus Ringer Laktat secara AAS) tanggal 6-10 Juni 2022; 9). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium, Kalsium dalam Sediaan Infus Ringer Laktat dengan metode AAS dan Penetapan Kadar Zat Terlarut hasil Uji Disolusi Parasetamol dan Kofein dalam Sediaan Tablet dengan metode KCKT) tanggal 8-12 Agustus 2022; 10). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Penetapan Kadar Simultan Logam Berat dalam AMDK dengan metode ICP-MS)

tanggal 8-12 Agustus 2022; 7). Bimtek peningkatan kompetensi pengujian EG DEG dalam sirup obat secara GCMS di P3OMN pada tanggal 20-21 Oktober 2022; 8). Pelatihan Auditor Internal Untuk Manajemen Mutu Laboratorium Berbasis ISO/IEC 17025:2017 yang diselenggarakan oleh IPB Training Center pada tanggal 15-16 November 2022.

- ☛ Untuk pemenuhan Standar peralatan Laboratorium telah dilakukan pengadaan peralatan laboratorium pada laboratorium Pengujian terdapat penambahan sebanyak 14 alat, yaitu KCKT, ICP MS, Refrigerator, Homogenizer/analytical grinder, handy step, pipete controller, Biosafety Cabinet Class II Tipe A2, pH Meter dan Particle Counter, mikropipet 10-100 uL (2 buah), mikropipet 100-1000 uL (2 buah), dan mikropipet 0.5-5 mL. Terdapat dua alat penambahan nilai untuk MVU pada AAS dan detector fluorescent pada HPLC.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.137
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
SESUAI STANDAR GLP”
TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, OTSK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada		Pemenuhan SRL Tahun 2023	Desember 2023
b Pemenuhan Standar Peralatan: Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di tahun anggaran 2023.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP tahun 2022 adalah 75,80%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP Tahun 2023	Desember 2023
c Membuat roadmap pelatihan peningkatan standar kompetensi terutama personil yang nilainya masih rendah dan dirotasi dari fungsi lain masuk ke pengujian	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian	Membuat roadmap pelatihan peningkatan standar kompetensi terutama personil yang nilainya masih rendah dan dirotasi dari fungsi lain masuk ke pengujian	Maret 2023

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

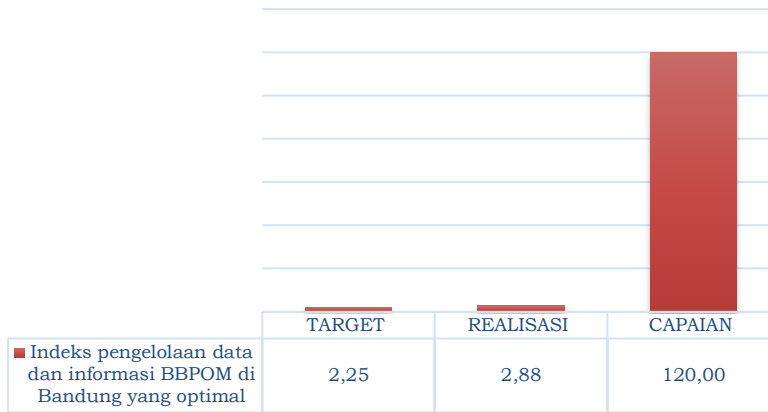
Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM Operational Centre (BOC). Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Seluruh rekapitulasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT tercatat dan di monitoring secara real time melalui subsite Badan POM Operational Centre <https://boc.pom.go.id/cmdcenter/menu/pengelolaandata>

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

TABEL 3.138
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.88	120.00%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Gambar 3.115 Perbandingan target dengan realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal Tahun 2022



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,25 sedangkan realisasinya sebesar 2,88. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data

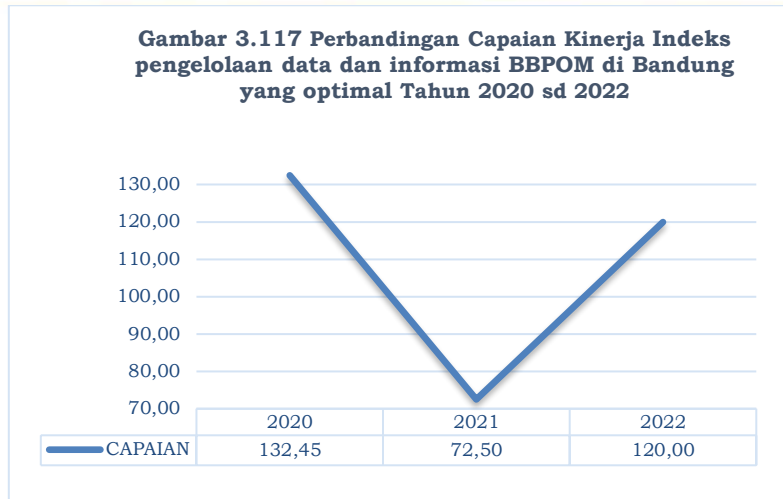
dan Informasi sebesar 2,75 dan komponen Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 3. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 128.00%, namun karena capaian kinerjanya diatas 120.00% maka capaian kinerja disesuaikan menjadi **120.00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2020 DAN 2021

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan oleh penambahan fitur monitoring dan evaluasi pada aplikasi Badan POM Operasional Centre, sehingga setiap realisasi dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki apabila ada yang belum sesuai target. Selain itu peningkatan peran serta pimpinan dan kerjasama seluruh pegawai dengan tim TIK BBPOM di Bandung juga berperan dalam pencapaian target kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung.

Gambar 3.116 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal Tahun 2020 sd 2022





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024

**TABEL 3.139
PERBANDINGAN REALISASI
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL” TAHUN 2022
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2022	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	3	2.88	96.00%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Jika dibandingkan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal pada tahun 2022 terhadap target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, maka nilai pencapaian kinerjanya sebesar 96.00% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Untuk dapat mencapai target akhir tahun Renstra Tahun 2020-2024, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN REALISASI KINERJA BALAI LAIN YANG SEJENIS/SETARA DAN TARGET NASIONAL

Jika dibandingkan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal pada tahun 2022 dengan target nasional (2.25), maka pencapaian kinerja untuk Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Semarang dan Balai Besar POM di Makassar diatas 120.00% sehingga dilakukan penyesuaian menjadi sebesar **120.00%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

Gambar 3.118 Perbandingan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal Tahun 2022 dengan Balai Lain dan Target Nasional



E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kebhasilan atas pencapaian kinerja disebabkan antara lain:

- ☛ Pemanfaatan email: Masih belum optimal pemanfaatan email corporate oleh pegawai pada tahun 2022, yaitu rata-rata kumulatif 81,79 %, seperti tampak dari tabel berikut:

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email												
	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	146	147	150	150	149	149	149	149	147	147	147	147
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	85	102	103	122	125	90	119	89	119	111	88	85
total_individu_aktif	85	102	103	122	125	90	119	89	119	111	88	85
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	17,47	20,82	20,6	24,4	25,17	18,12	23,96	17,92	24,29	22,65	17,96	17,35
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	17,47	20,82	20,6	24,4	25,17	18,12	23,96	17,92	24,29	22,65	17,96	17,35
Perhitungan (%)	74,94	81,64	81,2	88,8	90,34	76,24	87,92	75,84	88,58	85,3	75,92	74,7
Perhitungan per TW	74,94	78,29	79,26	81,65	83,38	82,19	83,01	82,12	82,83	83,08	82,43	81,79
Nilai Indeks	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

- ☛ Hal tersebut disebabkan, pegawai lebih banyak menggunakan akses email gmail untuk akses komunikasi dan belum ada manfaat tambahan untuk penggunaan fitur email corporate.
- ☛ Akses BOC dan Login BOC: Pada tahun 2022 akses dan login BOC dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga indeks pemanfaatan maksimal yaitu 3 (tiga).
- ☛ Akses Sharing Folder: Pada tahun 2022 kecenderungan peningkatan akses sharing folder semakin tinggi, yaitu rata-rata 125,3 dengan Indeks 3 (tiga),

sebagian besar akses shared folder adalah untuk download label produk e-Registration.

Aktifitas	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	44	53	73	182	110	102	46	352	166	96	265	71
Perhitungan	44	48,5	56,67	88	92,4	94	87,14	120,25	125,33	122,4	135,36	130
Nilai Indeks	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

- ▶ Berita Aktual: Pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah upload pada TW2 dan TW3, dan ada kecenderungan penurunan jumlah viewer seiring tahun berjalan. Secara Namun secara rata-rata yang diukur kumulatif masih dalam kisaran optimal. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id untuk upload kegiatan BBPOM di Bandung sangat besar dalam peningkatan indeks tersebut.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Jumlah Upload	8	2	16	16	12	19	20	25	6	9	10
Jumlah Viewer	6284	446	2930	2060	694	1240	776	587	281	208	111	164
Perhitungan Rata2 Berita	8	5	8,67	10,5	10,8	12,17	13,29	14,75	13,78	13,3	13	12,67
Perhitungan Rata2 Pengunjung	785,5	673	371,54	279,05	229,89	187,04	155,16	127,26	123,37	116,59	109,21	103,82
Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

- ▶ SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik pada Tahun 2022; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi, yaitu kumulatif 99,45% dengan indeks komposit maksimal 0,6; untuk SIPT pada tahun 2022, pemanfaatan kumulatif mencapai 97,08% dengan indeks komposit maksimal 2,4.

Aktifitas	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry	85	135	144	136	133	83	160	175	107	93	123	112
Jumlah Verifikasi	85	135	143	136	133	83	160	166	107	93	122	112
Perhitungan	100	100	99,31	100	100	100	100	94,86	100	100	99,19	100
Perhitungan per TW	100	100	99,77	99,83	99,86	99,89	99,9	99,27	99,35	99,42	99,4	99,45
Nilai Indeks per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Penilaian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	% Sarana	45,51	45,51	45,51	58,44	63,96	71,27	75,43	82,62	105,12	108,6	108,22
% Sampling	85,62	85,62	85,62	92,98	97,65	101,34	102,53	105,46	108,35	108,33	109,26	100,76
% Pengujian												
Rata-Rata	65,57	65,57	65,57	75,71	80,81	86,31	88,98	94,04	106,74	108,47	108,74	97,08
Indeks per Bulan	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Komposit SIPT	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Rekomendasi untuk peningkatan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, yaitu:

- ▶ Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk

optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.

- ☛ Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

K. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

**TABEL 3.140
TINGKAT EFISIENSI
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TAHUN 2022**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian TE
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.88	120.00	410,872,000	410,868,669	100.00	1.20	0.20	100%

Tingkat efisien penggunaan sumber daya (anggaran) dalam mencapai kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 0.20 (100.00%) dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan penggunaan sumber daya (anggaran) lebih kecil dibandingkan dengan pencapaian kinerja. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Bandung akan melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

- ☛ Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta notifikasi akses aplikasi internal,
- ☛ Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- ☛ Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.
- ☛ Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian input SIPT serta diharapkan ada peningkatan nilai Indeks setelah tim Pusdatin bergabung dengan WA grup SIPT BBPOM di Bandung.
- ☛ Tersedianya fitur Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Badan POM Operational centre, sehingga secara realtime dapat dilaksanakan monitoring

dan evaluasi capaian dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan apabila diperlukan.



H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.141
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	Timeline
a Movev aplikasi SIPT oleh admin SIPT Balai dan koordinasi dengan role sampling serta role pengujian serta PUSDATIN di grup whatsapp; Input data Gaji setiap awal bulan ke email seluruh pegawai	Capaian input SIPT Sampling dan Pengujian dilaksanakan tepat waktu dan pada akhir tahun 2022 input mencapai 100%; akses email meningkat dengan penambahan informasi potongan gaji melalui email corporate	-	
b <u>Movev shared folder simpan.pom.go.id</u> berkoordinasi dengan pengelola e-registrasi secara berkala setiap awal bulan	PIC shared folder e-registrasi melaksanakan tugas akses dan input sesuai ketentuan, selain itu tingginya permintaan layanan e-registrasi sangat berpengaruh terhadap akses aplikasi tersebut	-	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, anggaran Balai Besar POM di Bandung semula sebesar Rp. 57.361.818.000,- dengan rincian: (1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.257.850.000,-; dan (2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.595.745.000,-. Pada akhir tahun 2022, anggaran Balai Besar POM di Bandung menjadi sebesar Rp. 60.974.131.000,-

(1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.761.070.000,- dan (2) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26,595,745,000,-. Selisih anggaran sebesar Rp. 1.532.040.000,- untuk penambahan pelaksanaan titik KIE berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.03.03.21.212.05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 tentang Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Namun, berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.21.629 tanggal 6 Desember 2021 perihal Data Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2022, anggaran BBPOM di Bandung yang diblokir dalam rangka Automatic Adjustment sebesar Rp. 2.542.957.000,- (Tahap I). Kemudian berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.03.03.2.21.05.22.370 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penyampaian Tambahan Automatic Adjustment TA 2022, anggaran BBPOM di Bandung yang diblokir dalam rangka Automatic Adjustment sebesar Rp. 2.903.346.000,- (Tahap II). Sehingga anggaran BBPOM di Bandung yang diblokir dalam Automatic Adjustment sebesar Rp. 5.446.303.000,-. Pada Triwulan IV, anggaran BBPOM di Bandung meningkat menjadi Rp. 63.916.221.000,-. Penambahan anggaran tersebut antara lain : (1) Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: B-PR.03.03.21.212 05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, disampaikan BBPOM di Bandung mendapatkan tambahan pelaksanaan KIE sebanyak 17 titik dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 1.532.040.000,-; (2) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022, disampaikan revisi kekurangan belanja pegawai; (3) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.03.03.2.21.09.22.675 tanggal 13 September 2022 perihal Realokasi dan Optimalisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KIE Obat dan Makanan, disampaikan Hasil Rapat Dengar Pendapat bersama

Komisi IX DPR RI bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman, maka Balai Besar POM di Bandung ditambahkan sebanyak 7 titik KIE dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 591.990.000,-. Berdasarkan OMSPAN realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 60.812.224.069 yaitu 99.73%.

TABEL 3.73
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BERDASARKAN OMSPAN
TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Tahun: 01 s.d. 06

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432753 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	PAGU	23.300.000,000	33.180.836,000	7.455.385,000	0	0	0	0	0	0	63.916.221,000
		REALISASI	17.016.657,843 (73,04%)	16.581.168,954 (50,03%)	6.685.754,570 (89,69%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.295.581,787 (63,04%)
		SISA	6.283.342,157	16.599.667,046	769.630,430	0	0	0	0	0	0	23.620.639,213
GRAND TOTAL		PAGU	23.300.000,000	33.180.836,000	7.455.385,000	0	0	0	0	0	0	63.916.221,000
		REALISASI	17.016.657,843 (73,04%)	16.581.168,954 (50,03%)	6.685.754,570 (89,69%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.295.581,787 (63,04%)
		SISA	6.283.342,157	16.599.667,046	769.630,430	0	0	0	0	0	0	23.620.639,213

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.74
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1.824.022.000	1.823.656.709	99.98%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	34.885.000	34.881.000	99.99%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	249.897.500	249.736.500	99.94%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	3.434.515.500	3.428.774.908	99.83%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12.471.139.000	12.407.534.414	99.49%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	968.773.000	965.104.595	99.62%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1.164.622.000	1.164.445.466	99.98%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	3.956.833.000	3.955.978.579	99.98%
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	27.364.853.000	27.280.005.255	99.69%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9.166.769.000	9.164.286.493	99.97%
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	337.822.000	337.820.150	100%
Jumlah		60.974.131.000	60.812.224.069	99.73%

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung 2022 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal Desember 2021 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2022, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: sembilan (9) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada 2022 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 104,11 % dengan kriteria memenuhi kriteria, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua dan ketiga masing-masing memiliki nilai 111,66 % dan 100,61% menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 107,60 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan Balai Besar POM di Bandung berhasil mencapai target efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 100,05% dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.
- 🏆 Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 97,97%% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan belum berhasilnya Balai Besar

POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan, namun perlu dilakukan strategi praktis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 120,00 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan dan kesembilan masing bernilai 100.43 % dan 107.38 % dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal serta mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
 - 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 109.05 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 - 🏆 Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 95.22 % dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi , ini menunjukkan belum berhasilnya Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel.
3. Pada triwulan I tahun 2023, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) didapatkan hasil sebesar Efisiensi (TE = 2,13).
 4. Pada tahun 2022, BBPOM di Bandung berhasil memperoleh hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk ke dalam kategori kategori Efisien dengan TE 0,42 dengan Capaian TE 92%. BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE 0,25 dengan capaian TE sebesar 95%. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (TE=2.84), nilai TE terendah adalah Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00), Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (TE=-0,00), dan Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada tahun 2022 terlaksana secara efisien (TE=0,25,) dengan capaian TE 95%

4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada tahun 2022 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalani kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.

BALAI BESAR PENGAWAS



WBK BBPOM BANDUNG
JUARA!
GOES TO **WBBM**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



bandung.pom.go.id



[bpom.bandung](https://www.facebook.com/bpom.bandung)



[bpombandung](https://twitter.com/bpombandung)



Balai Besar POM di Bandung